



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

Jalan Dakota Nomor 24 Makassar 90242

Telp. (0411) 4813452, 4813539, 555120 Fax. (0411) 555159, Laman : makassar@bkipm.kkp.go.id

Nomor : B.2488 /BBKIPM.MKS/TU.140/X/2024 14 Oktober 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2024

Yth. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu
Hasil Kelautan dan Perikanan
Di Jakarta

Bersama ini kami sampaikan laporan kinerja periode triwulan III Tahun 2024 pada Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar, sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai yang tertuang dalam dokumen penetapan kinerja (terlampir).

Demikian penyampaian kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala BBKIPM Makassar,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Mohammad Zamrud



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

TRIWULAN III



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan Rahmat-Nya kegiatan Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik. Laporan Kinerja ini sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan misi organisasi yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

LKj ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang pencapaian kinerja operasional perkarantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang ditetapkan untuk periode triwulan III tahun 2024 yang disusun dengan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC). LKj menyajikan realisasi IKU yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Kami menyadari bahwa LKj masih jauh dari kata sempurna, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Makassar, 14 Oktober 2024

Pt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar



Mohammad Zamrud

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi	2
3. Arah Kebijakan dan Strategis	3
4. Sistematika dan Penyajian	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
1. Visi dan Misi	6
2. Tujuan Strategis	7
3. Sasaran , Indikator dan Kinerja	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
1. Capaian Kinerja	11
2. Analisis dan evaluasi	12
IK1. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	14
IK2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	20
IK3 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	28
IK4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	32
IK5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	43
IK6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	53
IK7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	61
IK8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	69
IK9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	82
IK10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	89
IK11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	95
IK12. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	100

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK13. Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	108
IK14. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	118
IK15 Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	126
IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	136
2. Rekomendasi	137
3. Tindaklanjut.....	138

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

LAMPIRAN

Lampiran Capaian Kinerja (LCK)

IK1.	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	1
IK2.	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	5
IK3	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	11
IK4.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	15
IK5.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	25
IK6.	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	35
IK7.	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	42
IK8.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	47
IK9.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	55
IK10.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	59
IK11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	64
IK12.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	67
IK13.	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	71
IK14.	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	77
IK15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%).....	83

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 110,12 (istimewa) Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BKIPM yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut :

- A. Dari 15 (lima belas) IKU yang targetnya telah ditetapkan sesuai PK Tahun 2024 ada 9 (sembilan) IKU yang melebihi target, 1 (satu) IKU yang belum terealisasi karena adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA), 2 (dua) IKU yang tidak mencapai target triwulanan dan 3 (tiga) IKU yang belum teralisasi karena perhitungan diakhir tahun.
- B. Uraian Indikator Kinerja Utama KU yang capainnya memenuhi atau melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu :
 1. Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)
 2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)
 3. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)
 4. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)
 5. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)
 6. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)
 7. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
 8. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
 9. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- C. Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum dilaksanakan hingga triwulan III disebabkan karena masih mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu :
1. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi karena adanya kebijakan anggaran pusat yang masih dalam posisi *Automatic Adjustment* (AA)
- D. Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target pada triwulanan III, yaitu :
1. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan Sistem *Traceability* (UPI)
 2. Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
- E. Uraian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang belum mencapai target disebabkan karena perhitungannya berdasarkan perhitungan diakhir tahun.
1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)
 2. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)
 3. Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Kinerja Keuangan Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2024 sebesar Rp 13,467,838,000 dan realisasi 8,639,233,988 atau 64,15 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengendalian dan Pengawasann Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), dalam melaksanakan tugas dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban BPPMHKP dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan BPPMHKP serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja BPPMHKP. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nonor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2024 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP.

1.2. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai Besar KIPM) Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Balai Besar KIPM Makassar terdiri dari (1). Sub bagian Umum, (2) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksanaan teknis pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Struktur organisasi Balai Besar KIPM Makassar dapat dilihat pada struktur organisasi dibawah ini.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR

(Nomor: 43/KEPMEN-KP/2023)



1.3 Arah Kebijakan dan Strategis

Arah kebijakan dan strategis pembangunan Balai Besar KIPM Makassar disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran strategis Balai Besar KIPM Makassar adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara mitra, Penjaminan mutu hasil perikanan di wilayah RI, Unit Penanganan dan/atau pengolahan yang menerapkan sistem *traceability*, Sertifikat *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif dengan didukung Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar, Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (*Official control*), lingkup otoritas kompeten, Lokasi usaha perikanan yang menerapkan *Quality assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi
3. Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP yang mendukung Indeks profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Tingkat Kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar.

1.4 Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan penyajian LKj Tahun 2024 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut:

- a. Bab I. Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi;
- b. Bab II. Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;
- c. Bab III. Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi yang



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Bab IV. Penutup, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;
 - e. Lampiran, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hal-hal lainnya.

II. PERENCANAAN KINERJA

1. Visi dan Misi

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi – Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu : Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “ Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan dan kemaritiman, kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Aspek yang berkaitan dengan visi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) adalah :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan pendukung pengolahan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.
2. Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

berkelanjutan, serta

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk BKIPM

Oleh karena itu, BKIPM menetapkan visi pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020 - 2024, yaitu :

VISI

Terwujudnya masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan untuk “ Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong “.

MISI

1

Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Pningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional

2

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan

3

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan Tata kelola pemerintahan di KKP

2. Tujuan Strategis

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020 – 2024 maka sasaran strategis (SS) dan kondisi *output/impact*

yang diinginkan dapat dicapai BPPMHKP dari program yang dilaksanakan , maka BPPMHKP telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Sasaran Strategis | 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif |
| 2. Sasaran Strategis | 2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif |
| 3. Sasaran Strategis | 3. Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP |

3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran strategis Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Makassar merupakan penjabaran operasional dari visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini menggambarkan hasil yang hendak dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai rencana tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara

LAPORAN KINERJA

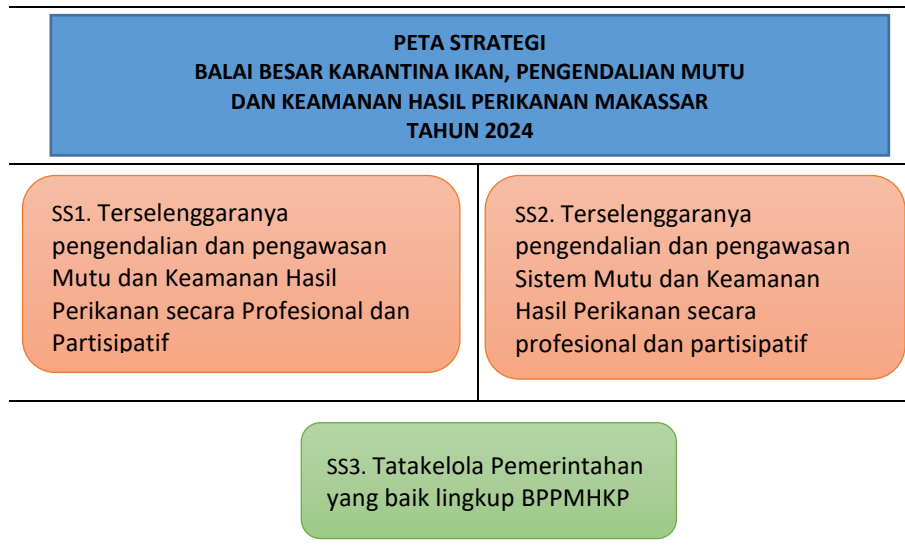
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Kegiatan Pengembangan Sistem Manajemen Kinerja Organisasi dan Penyusunan IKU pada KKP mampu membangun sistem mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur.

BKIPM telah menyusun Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.44/BKIPM/2020. Peta Strategis adalah suatu dashboard yang memetakan sasaran organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi nasional. Dari Peta Strategi tersebut, dijabarkan indikator dan target kinerja yang akan dicapai BKIPM pada 2023, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja BKIPM.



Gambar 1. Peta Strategi Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja tahun 2024. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan analisis lebih mendalam terutama terhadap indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target. Hal ini perlu dilakukan untuk mengenali faktor penyebabnya selanjutnya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penetapan strategi untuk peningkatan kinerja (*performance improvement*) di tahun-tahun selanjutnya.

Hasil capaian indikator kinerja Balai Besar KIPM Makassar untuk triwulan III tahun 2024 yang menunjukkan capaian sasaran strategis secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel : 2.1

Capaian Kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024				
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	-	-	99,99	99,99	101,99	99	99	100	101	101
	2 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	-	-	5	4	4	4	2	3	150	100
	3 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	-	8	15	21	25	60	4	2	50	35
	4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang Lingkup pada UPI	-	239	312	374	335	345	113	123	108,00	108,00

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Periklanan secara Profesional dan Partisipatif	5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	89,8	91,12	84	84	93,05	110,7	110,7
	6	Unit Kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control)	-	-	-	-	-	1	1	1	100	100,0
	7	Lokasi usaha yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	-	-	-	4	2	18	0	0	0	0,0
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	68,01	81,44	82,23	90,27	84	0	0	0,00	0,00
	9	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	91,93	98	95,3	87,13	82	0	0	0	0,0
	10	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100,0
	11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	-	82	65	100	100	80	80	100	125	125
	12	Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	88	89	98,44	96,38	93,76	93,76	97,55	117,50	117,50
	13	Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar			86	87,87	86,2	82	82	74,24	86,32	86,32
	14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar				79,56	78,26	80	0	0	0	0,0
	15	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar				100	99,83	80	0	0	0	0,0

2. ANALISIS DAN EVALUASI

Elaborasi capaian kinerja berdasarkan sasaran strategi secara lebih detail menurut indikator kerjanya dijelaskan sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sasaran Startegis 1

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif

Pengendalian dan pengawasan dan Kemaanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif, maka diperlukan dukungan 4 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . Adapun penjelasan pencapaian 4 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif : <ol style="list-style-type: none">1. Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan2. Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem <i>traceabilty</i>4. Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI	<ol style="list-style-type: none">1. 99 %2. 4 Lokasi3. 60 UPI4. 345 sertifikat

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

IK 1. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	1 Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan	-	-	99,99	99,99	102	99	99	100	101	101

Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikanan, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik;

Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor.

Triwulan III 2024 didapatkan total volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 54,84 ton senilai Rp. 3,72 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.617 sertifikat, sedang pada Triwulan II 2024 tercatat volume

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 24,44 ton senilai Rp. 1,4 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.156 sertifikat. Dari nilai tersebut terlihat bahwa terdapat selisih jumlah sertifikasi ekspor atau mengalami kenaikan sebanyak 21,4 %

Adapun pada Triwulan III 2023 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 59,92 ton senilai Rp. 2,02 T dengan jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang diterbitkan sebanyak 2.596 sertifikat. Apabila dibandingkan persentase jumlah sertifikasi ekspor antara Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan III 2024 didapatkan selisih atau kenaikan sebesar 0,81 %.

Indikator Kinerja efektifitas ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya sertifikat mutu (HC) di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan, dan pada Triwulan III 2024 tidak ada terjadi kasus penolakan produk perikanan;

Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu :

$$X = \frac{A + B}{2}$$

dimana :

A : $\frac{\text{Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan} - \text{penolakan oleh negara tujuan}}{\text{Jumlah HC karantina ekspor yang terbit}} \times 100\%$

Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi, Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

B : Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan x 100%
 Jumlah HC mutu ekspor yang terbit

$$: \frac{2.617-0}{2.617} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

- Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, dari Triwulan I hingga Triwulan III didapatkan realisasi sama yaitu 100 % dikarenakan tidak adanya kasus penolakan oleh negara tujuan;
- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran s/d TW III 2024	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran TW II 2024	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	3989.ADF.001.051.a Sertifikasi CPIB pada supplier hasil perikanan	Rp. 25.925.000,-	Rp. 25.925.000,-	Rp. 16.987.000,-	65,52%	Rp. 16.127.000,-	43,11%	Rp. 8.938.000,-
2	3989.ADF.001.051.b Bimbingan Teknis CPIB Supplier	Rp. 6.575.000,-	Rp. 6.575.000,-	0	0	0	0	Rp. 6.575.000,-
3	3989.ADF.001.051.c Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 5.501.000,-	73,35%	Rp. 4.641.000,-	48,41%	Rp. 1.999.000,-

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran s/d TW III 2024	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran TW II 2024	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
4	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor nya	Rp. 20.000.000,-	Rp. 17.000.000,-	Rp. 12.575.000,-	73,97%	Rp. 1.675.000,-	4,92%	Rp. 4.425.000,-
	TOTAL	Rp. 60.000.000,-	Rp. 57.000.000,-	Rp. 35.063.000,-	61,50%	Rp. 22.443.000,-	37%	Rp. 21.937.000,-

Target Sertifikasi CPIB pada supplier produk perikanan pada TW II 2024 sudah terpenuhi sehingga pada Triwulan III 2024 anggaran dialokasikan untuk kegiatan SJMHKP lainnya dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.987.000,- atau sebesar 65,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.938.000,-. Untuk Bimtek CPIB pada supplier belum dilaksanakan karena menunggu arahan pelaksanaan jadwal dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.

Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra pada Triwulan III 2024 telah dialihkan untuk kegiatan pengendalian mutu lainnya, yaitu ke kegiatan monitoring dan evaluasi UPI, dan telah terealisasi sebanyak Rp. 5.501.000,- dengan persentase realisasi sebesar 73,35 % dengan sisa anggaran Rp. 1.999.000,-

Anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan III 2024 dialihkan ke kegiatan surveilan HACCP dan konsumsi rapat, didapatkan realisasi sebesar Rp. 12.575.000,- atau 73,97 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.425.000,-

Dengan demikian total realisasi anggaran hingga Triwulan IV 2024 sebesar Rp. 35.063.000,- atau 61,5 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar Masalah

Penyerapan anggaran belum optimal yaitu sampai Triwulan III 2024 realisasi anggaran sebesar 61,5 %, masih berada di bawah target sebesar 75%

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Untuk mendapatkan realisasi anggaran sesuai target maka sisa anggaran dialokasikan ke kegiatan SJMHKP lainnya.
- Pada tanggal 12 Agustus 2024, BPPMHKP Makassar menghadiri dan menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bagi Nelayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. YKL Indonesia adalah salah satu organisasi non pemerintah yang gerakannya berorientasi pada tiga aspek yaitu (1) Konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut; (2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kecil; dan (3) Penerapan Teknologi Alternatif Ramah Lingkungan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan nelayan penangkap gurita dan pengepul yang berada di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang kota Makassar. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari di Hotel Aston Makassar. Pada kesempatan tersebut, BPPMHKP Makassar yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyampaikan konsep kemunduran mutu, sanitasi hygiene, persyaratan dan prosedur sertifikasi CPIB di kapal dan di unit supplier;
- Telah dilaksanakan sharing session hasil magang kompetensi di BUSPM oleh 3 (tiga) analis laboratorium pada tanggal 18 September 2024 terkait parameter pengujian organoleptik, logam berat dan mikrobiologi. Kegiatan sharing session ini merupakan salah satu upaya evaluasi pemahaman yang diperoleh peserta magang sekaligus peningkatan kompetensi bagi pegawai lainnya yang menjadi peserta sharing session. Analis yang telah mengikuti magang dapat menyampaikan materi

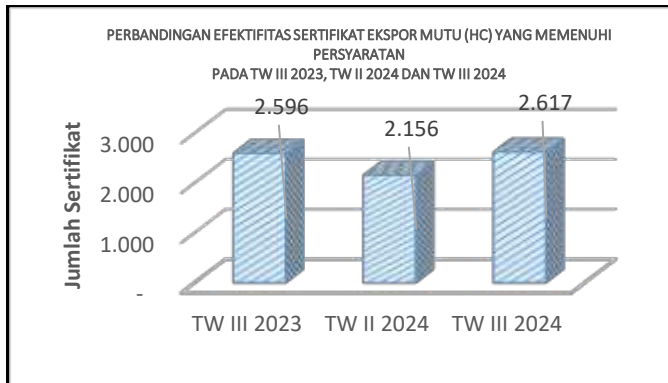
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

dan merespon dengan baik semua pertanyaan yang diajukan peserta sharing session.

Rekomendasi rencana aksi

Guna percepatan anggaran, pada Triwulan IV 2024 akan dilaksanakan :

- Mengkomunikasikan kegiatan BIMTEK CPIB supplier pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer;
- Melaksanakan kegiatan sertifikasi SPDI yang merupakan pengganti sertifikasi CPIB supplier



Kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bagi Nelayan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK2. Penjaminan Mutu Hasil Perikanan di wilayah RI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	2 Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI	-	-	5	4	4	4	2	3	150	100	4	4

Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota.

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang masuk ke sentra penyedia pangan sehat seperti pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sentra penyedia pangan sehat.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.

Pada triwulan III tahun 2024 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 2 lokasi kabupaten yaitu Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa, namun ditambahkan Kabupaten Pinrang dengan pertimbangan dirangkaikan dengan kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Adapun 3 lokasi pengawasan dengan jumlah 6 lokus :

1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Minasa Maupa dan Pasar Balang-Balang.
2. Kabupaten Takalar sebanyak 2 lokus yaitu PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar.
3. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya

Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan III tahun 2024 yaitu:

- Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, PPI/TPI.
- Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional dan PPI/TPI serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene.
- Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Berdasarkan hasil penilaian sarana prasarana dan sanitasi higiene pasar/TPI/PPI yang menjadi lokus pengawasan mutu hasil kelautan perikanan triwulan III tahun 2024:

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus:
 - a. Pasar Minasa Maupa dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Balang-Balang dengan Kriteria Cukup
2. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 lokus:
 - a. Pasar Sentral Pinrang dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Kampung Jaya dengan kriteria Cukup
3. Kabupaten Takalar
 - a. TPI Beba Takalar dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Sentral Takalar dengan kriteria Kurang

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di 6 lokus, masing-masing lokus terdapat 5 sampel, terdapat jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya dan telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, Formalin dan histamin. Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya
2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan
3. Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tabel 1. Kegiatan Utama dan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Utama dan Pendukung	Anggaran TH. 2024	Realisasi Tw III TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Utama)	60.000.000	45.382.086	75.64	14.617.914
2	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya (Pendukung)	80.000.000	38.397.969	48.00	41.602.031
3	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan (Pendukung)	13.070.000	13.070.000	100	0
4	Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Pendukung)	288.656.000	274.874.925	95.23	13.781.075
Jumlah		441,726,000	371,724,980	84.15	70,001,020

Pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 83.240.000, terjadi revisi anggaran pada triwulan III menjadi sebesar Rp. 60.000.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 36.992.086 atau 44,44%, maka pada triwulan III tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi sebesar 31.2%.

Untuk kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 9.516.000 atau 11,07%, maka terjadi peningkatan pada triwulan III sebesar 36,93%. Lokasi kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya di triwulan III adalah PPI Beba Takalar. Jenis sampel uji yang diambil adalah ikan barakuda, baronang, kanek, katamba

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

dan kerapu. Adapun pengujian parameter uji ciguatoksin dilakukan pengujian di Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSPM) dan untuk pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Untuk kegiatan Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan terealisasi sebesar 100% untuk uang harian pengawasan impor dan transportasi pengawasan.

Realisasi kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 274.874.925 atau 95.23% pada lokasi Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang. Bulan Mutu Kelautan dan Perikanan merupakan kolaborasi kegiatan antara BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja. Kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sasaran Reformasi Birokrasi Tematik yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan indikator jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti peningkatan pemahaman melalui Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada kegiatan Bulan Mutu, juga dilakukan edukasi dan penyadartahuan tentang ikan sehat bermutu kepada masyarakat penerima bantuan.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan III tahun 2024 adalah 22 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Dinas Perikanan Kabupaten, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS.

Akar Masalah

Kondisi sarana dan prasarana serta pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dikonsumsi khususnya di pasar tradisional dan PPI/TPI masih kurang

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

hal ini ditemukan secara berulang-ulang dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan III tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang.
2. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa'Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1909/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
3. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan Kabupaten Pinrang terhadap pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya yang nilainya CUKUP pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1910/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
4. Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik Pada tanggal 3 - 5 Juli 2024 bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi

1. Melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada triwulan IV 2024 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Menyampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota tentang Hasil Penilaian Sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene Pengawasan Mutu Domestik Pada Pasar Tradisional yang nilainya Cukup dan Kurang.



Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Kabupaten Gowa

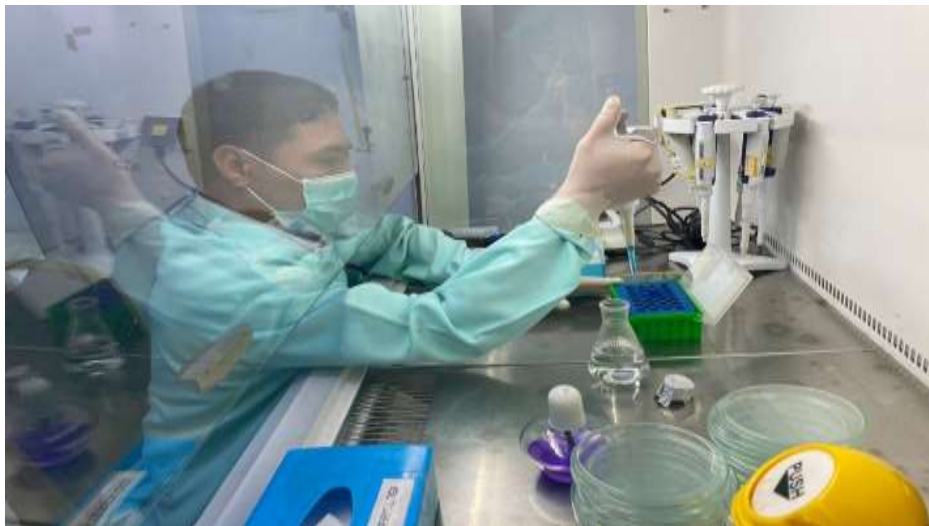
LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik di Kabupaten Pinrang



Rangkaian kegiatan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK3. Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	3 Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability	-	8	15	21	25	60	4	2	50	35	-	-

Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor komoditi perikanan. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan ditelusuri;

Realisasi kegiatan verifikasi traceability sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 21 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari target 60 UPI sehingga capaiannya sebesar 35%. Adapun lokus UPI/UPRL yang telah dilakukan verifikasi traceability disajikan pada tabel berikut.

No	Nama UPI	Alamat
1.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia
2.	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia

Pada tahun 2024 target pelaksanaan verifikasi traceability adalah sebanyak 60 UPI, dan terjadi perubahan target pada triwulan II menjadi 23 UPI dan pada periode triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebanyak 2 UPI dari yang ditargetkan 4 UPI, sehingga

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

tingkat capaiannya 50%. Tidak tercapainya target tersebut karena menyesuaikan dengan program pelaksanaan traceability yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengendalian Mutu dengan No. 1943/BPPMHKP.3/TU.140/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Penyampaian Revisi Target Kegiatan Traceability tahun 2024. Pada lampiran II, dinyatakan bahwa 2 (dua) UPI yang belum terealisasi tersebut akan direalisasikan pada bulan Oktober 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024, maka pada realisasi triwulan III tahun 2024 terjadi penurunan sebanyak 50% dari 4 (empat) UPI menjadi 2 (dua) UPI.

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2024 maka pada triwulan III tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 75% dari 8 (delapan) UPI menjadi 2 (dua) UPI

Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi traceability, ke 2 (dua) UPI tersebut dinyatakan telah mampu telusur terhadap produk yang dihasilkan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir, namun masih memerlukan perbaikan terutama pada pelaksanaan simulasi penarikan produk (mock recall), penetapan personil khusus dan pengarsipan dokumen traceability.

Sebagai bukti penerapan traceability maka Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) Hasil Perikanan dan akan diserahkan kepada pihak UPI/UPRL yang bersangkutan;

Untuk menunjang keberhasilan kegiatan verifikasi traceability, didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 4 orang yang merupakan fungsional Inspektur Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Kegiatan Traceability di dukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- yang mengalami revisi dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 210.060.000,- Adapun sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah terelealisasi sebesar Rp. 9.946.000,- atau sebesar 20,72% yang digunakan untuk belanja ATK, Belanja perjalanan biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024 dengan menggunakan pagu awal sebesar Rp. 210.060.000,- telah direalisasikan 4,18 %, mengalami kenaikan 16,54% pada triwulan III tahun 2024

Jika dibandingkan realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2023 yang sebesar 36,16%, pada triwulan III tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 15,44%;

Akar Masalah

Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III masih sangat rendah (20,72%) yang di sebabkan karena alokasi anggaran yang diterima masih menggunakan perhitungan target awal (60 UPI)

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaporkan Hasil kegiatan verifikasi traceability ke Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen melalui email traceability.2024@gmail.com
- Penyerahan Surat Keterangan Penerapan Traceability kepada 15 pelaku usaha pada tanggal 15 Juli 2024.
- Kegiatan verifikasi traceability telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/tahun 2019 tentang Penerapan system ketelusuran di Unit Pengolahan Ikan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Rekomendasi rencana aksi

- Merevisi anggaran traceability ke kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer



Kegiatan Verifikasi Traceability UPI PT. Trans Anugrah Mulia

IK4. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup Produk pada UPI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara profesional dan partisipatif	4 Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang Lingkup pada UPI	-	239	312	374	335	345	113	123	108,00	108,00	-	-

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJKMHP pada setiap UPI. Persyaratan SJKMHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJKMHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

di tempat (*On Site Visit*). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJMKHP yang dilakukan oleh UPI.

Pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan untuk melihat penerapan sistem HACCP yaitu suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan yang telah diterapkan oleh UPI/UPRL. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat HACCP yang dilaksanakan 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun baik untuk UPI baru maupun perpanjangan.

Adapun pelaksanaan kegiatan monev dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap UPI yang telah disertifikasi dan diterbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan manual IKU BKIPM tahun 2024 bahwa formula IKU diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical Control Point* (PMMT/HACCP). Nilai tersebut merupakan penggabungan dari hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan Sertifikat yang diterbitkan pada tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP dengan rumus :

$$A = B + C$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

A = Ruang lingkup produk yang disertifikasi PMMT/HACCP

B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan sertifikat yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monev

$$\begin{aligned} A &= 35 + 88 \\ &= 123 \text{ sertifikat.} \end{aligned}$$

Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama TW III Tahun 2024 adalah sebanyak 123 sertifikat dari target 113 sertifikat ruang lingkup HACCP atau sebesar 108.84%. Jumlah tersebut terdiri dari 35 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan inspeksi PMMT/HACCP dan 88 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan monev PMMT/HACCP. Peningkatan capaian kinerja melebihi target sebesar 10 ruang lingkup atau 8.13% disebabkan karena:

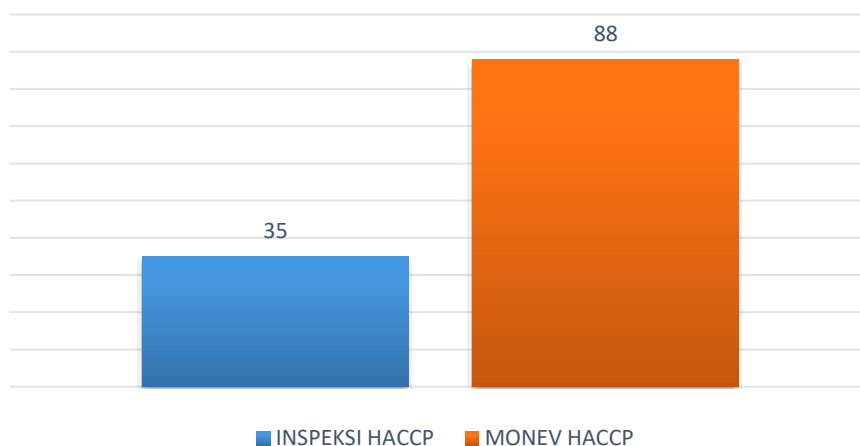
1. Adanya permohonan sertifikasi baru
2. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup
3. Adanya permohonan perpanjangan sertifikat HACCP

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Perbandingan Jumlah Kegiatan Inspeksi dan Monev HACCP
TW III Tahun 2024



Jika dibandingkan dengan TW II tahun 2024, capaian realisasi jumlah sertifikat ruang lingkup HACCP mengalami peningkatan dari 107 sertifikat menjadi 123 sertifikat atau sebesar 13% . Peningkatan ini disebabkan karena adanya permohonan sertifikasi baru dan penambahan ruang lingkup dari Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut.

Jika dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2023, capaian realisasi jumlah sertifikat ruling HACCP pada TW III Tahun 2024 mengalami penurunan dari 131 sertifikat menjadi 123 sertifikat atau sebesar 6.1%. Penurunan ini disebabkan karena tahun 2024 bukan tahun perpanjangan sertifikat HACCP.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama TW III tahun 2024 adalah 16 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Calon Inspektur mutu untuk kegiatan monev PMMT/HACCP. Jumlah ini beda dengan TW III Tahun 2023 sebanyak 19 orang. Penurunan ini disebabkan karena ada transformasi organisasi sehingga sebanyak 3 orang mutasi alih tugas ke Badan Karantina Indonesia.

Anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sampai dengan TW III sebesar Rp. 98.203.830 atau 75,54 %, yang terdiri atas belanja bahan ATK dan Komputer Suplies Rp. 759.000, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 57.473.000, belanja perjalanan dalam kota Rp. 15.340.000, perjalanan dinas biasa pengembangan kompetensi inspektur mutu sebesar Rp. 9.357.350, perjalanan dinas dalam kota pengembangan kompetensi inspektur mutu sebesar Rp. 2.250.000.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 42.801.390 atau 32.92% dari total anggaran Rp.130.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW III 2024 sebesar 42.62%.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 77.297.500 atau 57.26% dari total anggaran Rp.135.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW III 2024 sebesar 18.28%.

Akar Masalah

Terdapat UPI yang masih terkendala didalam proses perpanjangan sertifikat HACCP karena SKP kadaluarsa.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
2. Penanggung jawab kegiatan telah memantau masa berlaku sertifikat HACCP setiap UPI/UPRL melalui aplikasi HACCP Online Sistem dan berkomunikasi secara intensif dengan pihak UPI/UPRL untuk mengantisipasi keterlambatan permohonan dari pihak UPI/UPRL yang dapat berdampak pada kelancaran ekspor UPI yang bersangkutan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan *uploading* dokumen inspeksi di aplikasi HONEST untuk mendukung kelancaran proses penerbitan Sertifikat HACCP sesuai dengan janji layanan.
4. Telah dilaksanakan kegiatan forum konsultasi publik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diikuti oleh pelaku usaha dan stakeholder terkait sebanyak 90 orang secara luring dan daring di hotel Dalton Makassar. Salah satu materi yang disampaikan adalah Sertifikat Kelayakan Pengolahan, regulasi dan sanksi yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan, Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP Muhammad Wahidin.

Rekomendasi rencana aksi

Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi awal dengan pihak UPI untuk mengantisipasi keterlambatan pengurusan SKP

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Triwulan III Tahun 2024

No.	Nama UPI / UPRL	Produk	Grade	Keterangan
1	PT. Aiki Megah Jaya	Fresh Pelagic Fish Frozen Milkfish Frozen Pelagic Fish	B B B	Inspeksi
2	CV. Anugrah Bahari	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Inspeksi
3	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B C	Inspeksi
4	PT. Blue Ocean Resources	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna	B B B	Inspeksi
5	CV. Elitism Makassar	Dried Shark Fin	B	Inspeksi
6	PT. Karisa Timur Indonesia	Dried Fish Maw Dried Fish Skin	B B	Inspeksi
7	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Dried Flying Fish Roe Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Flying Fish Roe Frozen Pelagic Fish	B B B B B	Inspeksi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

8	PT. Kenndo Fisheries Indonesia	Frozen Cooked Cephalopods	B	Inspeksi
9	CV. Lintas Samudera Mandiri	Fresh Demersal Fish Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Milkfish Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp Frozen Tuna	B B B B B B B B	Inspeksi
10	CV. Mitra Alam	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B	Inspeksi
11	CV. Najwa Bahari	Fresh Tuna	B	Inspeksi
12	PT. Perikanan Indonesia (Persero)	Frozen Demersal Fish	B	Inspeksi
13	PT. Piala Laut Indonesia	Frozen Shrimp	B	Inspeksi
14	CV. Sumber Marina Semesta	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	C C	Inspeksi
15	PT. Changleong Maritim Indonesia	Dried Shrimp	B	Monev
16	CV. Simpul Agro Globalindo	Dried Seaweed	B	Monev
17	CV. Maros Timur	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Monev
18	PT. Lontara Jaya Sakti	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B	Monev
19	PT. Asnur Anton Jaya	Dried Seaweed	B	Monev
20	CV. Anugrah Bahari Mnadiri	Frozen Cooked Cephalopods Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Milkfish Frozen Tuna	B B B B B B B	Monev
21	PT. MAA Ataita Indah	Dried Seaweed	B	Monev
22	PT. Rika Rayhan Mandiri	Dried Seaweed	B	Monev
23	PT. Rahmat Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Monev
24	PT. Dunia Marine Products	Dried Flying Fish Roe Frozen Abalone Frozen Cephalopods Frozen Cooked Abalone Meat Frozen Cooked Cephalopods	B B B B B	Monev
25	CV. Karya Nelayan	Dried Fish Maw Dried Sea Cucumber Dried Shark Fin	B B B	Monev
26	CV. Faris Indo Seaffod	Fresh Tuna	C	Monev

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

27	PT. Bumi Menara Internusa	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna	B B B	Monev
28	PT. Yin Jing Internasional	Frozen Shrimp	A	Monev
29	PT. Celebes Berkah Niaga	Dried Seaweed	B	Monev
30	PT. Jaya Utama Quality	Dried Sea Cucumber	C	Monev
31	CV. Elitism Makassar	Sea Cucumber Meal Dried Fish Maw Dried Fish Skin Dried Sea Cucumber	B B B B	Monev
32	PT. Jireh Commodity	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe	A A	Monev
33	PT. Anugrah Mapan Jaya	Alkali Treated Chips Semi Refined Carrageenan	B B	Monev
34	PT. Multi Monodon Indonesia	Dried Flying Fish Roe Frozen Cephalopods Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp	A A A A	Monev
35	CV. Putra Putri Iskandar	Dried Seaweed	C	Monev
36	PT. Kelola Mina Laut	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna Fresh Tuna	A A A A	Monev
37	PT. Mitra Kartika Sejati	Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Breaded Shrimp	A A A	Monev
38	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Dried Flying Fish Roe Dried Shrimp Fresh Cephalopods Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Milkfish Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp Frozen Slipper Lobster Frozen Tuna	B B B B B B B B B B B B B B	Monev

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

39	CV. Sumber Bahari Mandiri	Dried Abalone Dried Fish Maw Dried Flying Fish Roe Dried Sea Cucumber Dried Seaweed Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	B B B B B B	Monev
40	CV. Najwa Bahari	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Monev
41	PT. Mina Maju Sejahtera	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B C C	Monev
42	PT. Sakinah Bahari Indonesia	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna		Monev
43	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Fresh Cephalopods Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B C C C	Monev



Kegiatan INSpeksi Penerapan PMMT/HACCP

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Monev Penerapan PMMT/HACCP

Sasaran Startegis 2

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif

Pengendalian dan pengawasan sistem mutu keamanan hasil karantina secara profesional, maka diperlukan dukungan 3 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 3 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Indikator Kinerja	Target
<p>Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar 2. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (<i>Official control</i>) lingkup Otoritas Kompeten 3. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 84 Indeks 2. 1 Unit 3. 18 Lokasi

IK5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	89,8	91,12	84	84	93,05	110,7	110,7	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>.

Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasan masyarakat) melalui link <https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14>. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.

Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :

1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (*Health Certificate for Fish and Fishery Products*) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Ekspor**)
2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Impor**)
3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis and Critical Control Point* (**PMMT/ HACCP**)

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

- Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air

Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:

Formula Isaac & Michael

$$S = \frac{X^2 NP (1-P) / d^2 (N-1) + X^2 P (1-P)}{}$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
 dimana $df = 1$ dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47 + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)}$$

$$S = \frac{46.092}{1.092} = 42.166 = 43$$

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	10	220	140	1200	291
15	14	230	144	1300	297
20	19	240	148	1400	302
25	24	250	152	1500	308
30	28	260	156	1600	313
35	32	270	160	1700	319
40	36	280	164	1800	324
45	40	290	168	1900	330
50	44	300	172	2000	335
55	48	310	176	2100	341
60	52	320	180	2200	346
65	56	330	184	2300	352
70	60	340	188	2400	357
75	64	350	192	2500	363
80	68	360	196	2600	368
85	72	370	200	2700	374
90	76	380	204	2800	379
95	80	390	208	2900	385
100	84	400	212	3000	390
110	92	420	220	3200	402
120	100	440	228	3400	414
130	108	460	236	3600	426
140	116	480	244	3800	438
150	124	500	252	4000	450
160	132	520	260	4200	462
170	140	540	268	4400	474
180	148	560	276	4600	486
190	156	580	284	4800	498
200	164	600	292	5000	510
210	172	620	300	5200	522

Jumlah sertifikat yang terbit pada Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.603 sertifikat, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 674, hal ini telah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran Customer Service telah berfungsi dengan baik di Triwulan III ini.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111.$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKM unit pelayanan} \times 25$$

Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

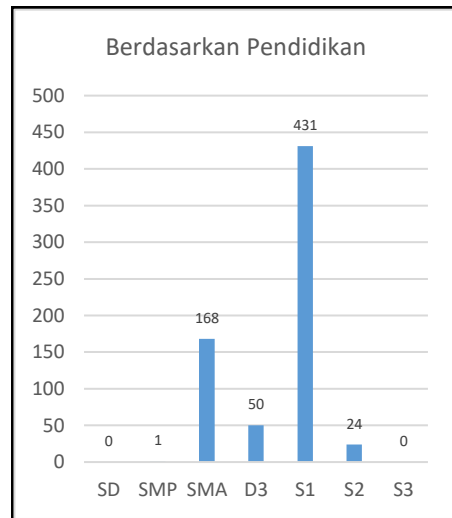
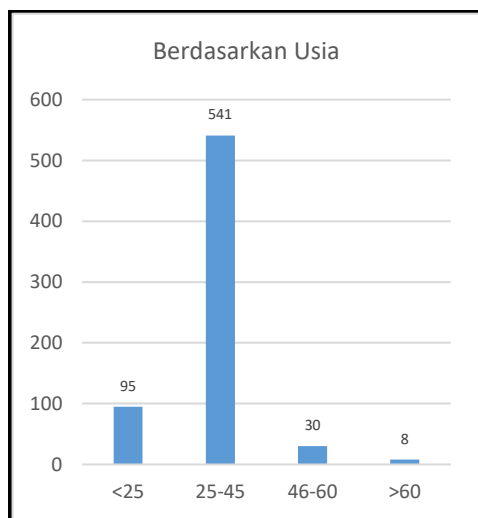
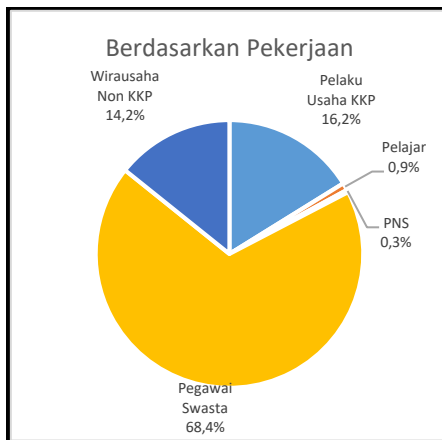
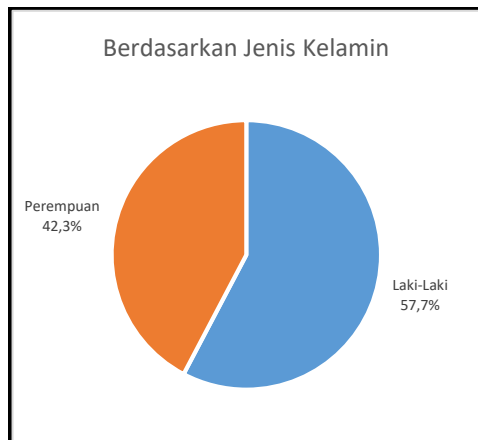
TAHUN 2024

Pada triwulan III Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 674 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,05 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau capaian 110,8%. Apabila data Hasil IKM Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan TW II Tahun 2024, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan II - 2024	Triwulan III - 2024	
1	Kesesuaian persyaratan	3.725	3.734	↑
2	Kemudahan prosedur	3.681	3.709	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.700	3.706	↑
4	Kesesuaian biaya	3.696	3.739	↑
5	Kesesuaian produk	3.686	3.715	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.691	3.705	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.643	3.690	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.792	3.769	↓
9	Kualitas isi/konten	3.700	3.731	↑
	Nilai IKM	92,54	93,05	

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan III Tahun 2024 yaitu :



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kemudahan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

dalam penggunaan fitur. Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Walaupun jarang terjadi, namun kendala dalam aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode yang sama pada tahun 2023, maka nilai IKM pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari 90,47 menjadi 93,05. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Triwulan III Tahun 2024 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 25 Juli 2024, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat “INFORMATIF” yang diserahkan langsung oleh Sekjen KKP di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diikuti oleh pelaku usaha dan stakeholder sebanyak 90 orang peserta secara luring di hotel Dalton Makassar dan juga secara daring melalui online meeting. Dalam Forum Konsultasi Publik ini disampaikan beberapa kebijakan layanan sehingga dapat menghimpun saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan dan perbaikan layanan menjadi lebih berkualitas.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Hingga Triwulan II tahun 2024, anggaran ini belum terealisasi karena masih di blokir oleh Kementerian Keuangan. Pada Triwulan III tahun 2024 ini, anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent.

Akar Masalah

Aplikasi PPK Online dan Sister Karoline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP dan digunakan dalam pelayanan penerbitan Health Certificate terkadang mengalami kendala dan memperlambat proses pelayanan. Telah direncanakan akan menggunakan sistem baru sesuai dengan tugas dan fungsi baru BPPMHKP yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu (SIAP Mutu).

Tindakan yang telah dilaksanakan

Telah dilakukan monitoring dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan HC Ekspor sehingga jumlah responden meningkat lebih dari tiga kali lipat. Pada Triwulan II, jumlah responden hanya sebanyak 207 dan di Triwulan III ini telah meningkat menjadi 674 responden. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran tim pelaksana surveilan dan inspeksi HACCP dalam memberikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Rekoemendai rencana aksi

Untuk memaksimalkan pelayanan HC Ekspor mampu beradaptasi dengan sistem aplikasi baru yaitu SIAP MUTU, maka BPPMHKP Makassar perlu memastikan kesiapan petugas dan prasarana dengan sistem informasi yang baru.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



Monitoring Pengisian Survei Kepuasan masyarakat



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik

IK6. Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (official control) lingkup Otoritas Kompeten

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	6 Unit Kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control)	-	-	-	-	-	1	1	1	100	100,0	-	-

Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu;

Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Surveilans merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) berjalan secara konsisten dan efektif;

Tujuan dilaksanakannya surveilans adalah untuk memastikan penerapan GMP-SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut berjalan secara konsisten dan efektif yang nantinya menjadi data dukung dalam penyusunan laporan surveilans tahunan. Hasil dari surveilans menjadi dasar bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (*Health Certificate /HC*)

Output dari pelaksanaan surveilans adalah penerbitan Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yaitu surat keterangan yang diberikan kepada UPI/UPRL yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara efektif sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor;

Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan surveilans sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL);

Berdasarkan program tahunan surveilans penerapan GMP-SSOP dan HACCP lingkup Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 yang telah disusun, pada triwulan III Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan surveilans penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL, dari target 95 dapat direalisasikan 83 sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar **87,36 %**.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun 12,64 % yang tidak terealisasi disebabkan adanya unit pengolahan ikan sebanyak 15 UPI yang tidak melakukan kegiatan proses produksi dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai dari pihak UPI yang bersangkutan dan 1 UPI yang tidak terealisasi disebabkan sertifikat HACCPnya expired. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai Besar KIPM Makassar telah menerapkan sistem pengendalian (*Official Control*) pada triwulan III Tahun 2024.

Jika dibandingkan dengan realisasi TW II 2024 terjadi peningkatan capaian pelaksanaan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL dari 83 % menjadi 87,36 % atau terjadi peningkatan sebesar 4,36 % yang disebabkan jumlah target berdasarkan program pada TW III lebih banyak dibandingkan dengan TW II Tahun 2024.

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023;

Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 184.440.000,- menjadi 198.370.000,- yang digunakan untuk :

- (1) Belanja bahan semula sebesar **Rp. 960.000,-**; menjadi **Rp. 2.890.000,-**;
- (2) Belanja barang persediaan bahan baku semula sebesar **Rp. 47.000.000,-** menjadi **Rp. 59.000.000,-**;
- (3) Belanja perjalanan dinas biasa sebesar **Rp. 109.180.000,-**
- (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar **Rp. 27.300.000,-**

Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 163.994.282,-** atau **82,67%**, dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Belanja bahan	2.890.000	885.000	2.005.000
2	Belanja barang persediaan bahan baku	59.000.000	46.818.182	12.181.818
3	Belanja perjalanan dinas biasa	109.180.000	89.050.100	20.129.900
4	Belanja perjalanan dinas dalam kota	27.300.000	27.191.000	109.000
	Jumlah	198.370.000	163.994.282	34.425.718

Realisasi anggaran untuk TW III adalah sebesar **Rp. 163.994.282. atau 82,67 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 198.370.000,;** Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di TW II sebesar **Rp. 124.364.282. atau 67,43 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 184.440.000 .** Terjadi peningkatan sebesar **15,24 %;**

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 19 orang Inspektur Mutu.

Akar Masalah

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan surveilan di TW III untuk belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tidak tersedia.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan kegiatan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada unit Pengolahan ikan/unit Pengolahan Rumput Laut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021;
- Telah melakukan pelaporan ke Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen terkait dengan laporan surveilan penerapan GMP/SSOP dan HACCP TW III Tahun 2024 pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Telah dilaksanakan pelaporan kegiatan surveilan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Berkas kelengkapan kegiatan surveilan merupakan salah satu persyaratan pada saat pengajuan laporan giat sebelum ditanda tangani pimpinan sehingga sangat membantu dalam proses kelancaran administrasi.

Rekomendasi rencana aksi

Penyampaian kepada seluruh inspektur mutu dan asisten inspektur mutu tentang alternatif metode pelaksanaan kegiatan surveilan GMP-SSOP dan HACCP pada Unit Pengolahan Ikan/Unit Pengolahan Rumput Laut secara daring/virtual sesuai Keputusan Kepala BKIPM No.32 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Points.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun Rincian Nama-nama Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut yang telah terealisasi pada Triwulan III 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama UPI/UPRL	Alamat
1.	PT. Tujuh Samudra Jaya	Jl. Malino Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Gowa, South Sulawesi - Indonesia
2.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV KAV. P-3A, KIMA Makassar, South Sulawesi - Indonesia
3.	PT. Cahaya Cemerlang	Jl. Ir Sutami 22, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
4.	UD. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3 NO.10, Komp. Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
5.	CV. Anugerah Lin Perkasa	Jl. Kima No. 20 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, South Sulawesi - Indonesi
6.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
8.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
9.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10 Kav. C - 3A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar - Pangkep) Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros South Sulawesi - Indonesia
11.	CV. Najwa Bahari	Jl. Sabutung Baru III No. 25 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
12.	PT. South Suco	Jl. KIMA VI Blok G - 4, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G8, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
14.	CV. Alga Marina Sukses	Jl. Ir. Sutami 107, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. KIMA 15 Kav. R4D-R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
16.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10T - 2B, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
17.	PT. Maa Ataita Indah	Jl. Kapasa Raya No.29 B, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
18.	PT. Asnur Anton Jaya	Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
19.	CV. Karya Murni	Kampung Parang Dusun Jonggo Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
20.	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima III Kav. 5AB, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
21.	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. KIMA Raya I Kav. D-1B Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
22.	PT. Anugrah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
23.	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Hombes, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, South Sulawesi-Indonesia
24.	PT. Mari Sejahtera Indonesia	Jl. KIMA 4 Gudang 3 Kav. M-1a, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
25.	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya 1 Blok D-2B Kawasan Industri Makassar

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

26.	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Pendidikan No. 8, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
27.	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4-B1 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
28.	PT. Rahmat Bahari	Jl. Poros Pattene, Kompleks Pergudangan Pattene Busines Park, Blok H No. 1 Kel. Temmappadaue, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
29.	CV. Lintas Samudera Mandiri	Kompleks PPI Lonrae Kav. 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, South Sulawesi - Indonesia
30.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
31.	CV. Faris Indo Seafood	Pattene Business Park Blok K No. 2, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
32.	PT. Siriman Jaya Abadi	Palalakkang, Kel. Pa'lalakkang, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
33.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu Runcing No. 99 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
34.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD No. 15 - 16 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
35.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
36.	PT. Celebes Berkah Niaga (Garuda)	Pergudangan Garuda Blok B2, Jl. Lantebung No.42, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
37.	PT. Sakinah Bahari Indonesia	Pusat Distribusi Regional, Jl. KIMA-8, Kelurahan Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
38.	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K-9/Kav.B2 Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
39.	PT. Biota Laut Ganggang	Jl. Kebangkitan No.8, Dusun Belabelawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, South Sulawesi - Indonesia
40.	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No.1 Bulu-Bulu, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
41.	PT. Simpul Agro Globalindo	Patene Business Park Blok C No. 11 Maros, South Sulawesi - Indonesia
42.	CV. Nur Bahari Abadi	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
43.	CV. Buana Laut Nusantara	Jl. Kima VI Kav. F.1 B1, Kota Makassar, 90243, South Sulawesi - Indonesia
44.	PT. Elitism Makassar	Jl. Andi Mappainga Ruko 58, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
45.	PT. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
46.	PT. Tobiko Utama	Jl. Sultan Alauddin No. 47-54, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
47.	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng Batu - Batu, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi Indonesia
48.	PT. Kenndo Fisheries Indonesia	Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
49.	CV. Maros Timur Jaya	Jalan Poros Makassar - Maros Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa, Kec. Marusu, South Sulawesi - Indonesia
50.	PT. Sukses Raya Food	Jl. Bahagia No. 2 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

51.	CV. Asryl Perkasa	Perumahan Citra Sanggalea Indah, Blok D4 No. 4, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
52.	PT. Aiki Megah Jaya	Jl. Perintis Kemerdekaan Kima 2 No. 3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
53.	CV. Anugrah Lestari	Kunjung Mae, Jl. Pendidikan Desa Bonto Lanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
54.	PT. Inti Mulia Cahaya	Jln. Pelabuhan Paotere Makassar, South Sulawesi - Indonesia
55.	PT. Dwira Masagena	Jl. Kima Raya 1 Kav. B5, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
56.	PT. Anugrah Cahaya Samudera	Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Lantebung Blok A11 No. 9B, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
57.	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jalan Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
58.	PT. Giwang Citra Laut	Jln. Poros Pabrik Gula Takalar KM.1,5 Desa Parappunganta, Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
59.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
60.	Kospermindo Koperasi	Jl. Kima 8 Kav. 3A1 Makassar South Sulawesi - Indonesia
61.	PT. Bahari Makmur Sejati	Jl. KIMA 16 Kav BB No. 4 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
62.	PT. Celebes Berkah Niaga/ Pelita Agro	Pergudangan Pelitagro Blok A No.15, Jl. Ir. Sutami No 24, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
63.	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No. 1 Gudang A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
64.	CV. Guna Agung	Jl. Kapasa Raya No 1 Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
65.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Ujungpandang Baru No. 17 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
66.	CV. Guna Bahari Indonesia (Patene)	Pergudangan Patene 88 Blok N No.1, Jl. Business Park, Ds.Pabentengan, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
67.	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No. 42 Km. 147 Bojo Barru Kec. Mallusetasi, Barru, South Sulawesi - Indonesia
68.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Business Park Blok U 3B, Maros, South Sulawesi - Indonesia
69.	PT. Blue Ocean Resources	Jl. Kompleks Perhubungan No. 5, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
70.	CV. Adiwandi Hanania Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 1 Gudang Blok 1, Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
71.	CV. Anugerah Jaya Fishery	Jl. Poros Maros, Ruko Graha Cemerlang Blok C No. 10-11, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
72.	PT. Armita Laut Nusantara	Jl. Tarakan Lr 155 No. 14, Kel. Malimongan Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
73.	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Jl. Lantebung No. 99 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
74.	PT. Sumber Gratia Mandiri	Pergudangan Pattene Business Park Blok B No. 8-9, Desa Pa'benteng, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
75.	PT. Sumber Lautan Nusantara	Jl. Lantebung No. 168, Makassar, South Sulawesi - Indonesia

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

76.	CV. Karya Nelayan	Ruko Graha Cemerlang Blok E No. 16-17 Poros Makassar- Maros Km 21, Kelurahan Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
77.	PT. Perikanan Indonesia (Persero) Cabang Makassar	Jl.Sabutung I No.1, Kelurahan Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
78.	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jln. Sabutung No. 3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
79.	CV. Sumber Marina Semesta	Jl. Poros Makassar Maros No. 138, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
80.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
81.	CV. Gembira Galesong	Jl. Abdul Kadir, Desa Galesong Kota, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
82.	CV. Sugarindo Trading Co	Jl. Bakau No.60, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, South Sulawesi - Indonesia
83.	CV. Basma Bahari	Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok. D1 Nomor 15, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia

IK7. Lokasi usaha perikanan yang menerapkan quality assurance sesuai standar, sistem dan regulasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
		Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif	7 Lokasi usaha yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar, sistem dan regulasi	-	-	-	4	2	18	0	0	0	0,0

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan membuahkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut. Kegiatan Verifikasi *Quality Assurance* ini mendukung Program Prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan

Dalam mendukung program prioritas KKP ketiga, BPPMHKP melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas hasil budidaya untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan aman dikonsumsi dan diterima di negara tujuan. Selain itu, BPPMHKP mendukung pembudidaya untuk memenuhi standar internasional dalam meningkatkan mutu hasil perikanan melalui sertifikasi hasil budidaya yang memenuhi standar (CPIB, CBIB). BPPMHKP juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan bahan kimia dan obat-obatan dalam budidaya untuk memastikan tidak adanya residu berbahaya dalam produk akhir dan penerapan praktek penggunaan bahan kimia yang aman.

Quality Assurance sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. BPPMHKP selaku otoritas kompeten mendapat mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tahun 2024 Verifikasi *Quality Assurance* terhadap produksi hulu-hilir berdasarkan manual IKU Balai Besar KIPM Makassar, formula IKU diukur dengan menghitung jumlah lokasi yang telah dilakukan yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.

Adapun lokasi kegiatan Verifikasi QA tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2023 tentang Lokasi Kampung Nelayan Maju sebanyak 4 (empat) lokasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya sebanyak 14 (empat belas)

Lokasi Kampung Nelayan Maju :

1. Pontap Desa/Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kabupaten/Kota Palopo
2. Bonto Lebang, Desa/Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng
3. Mattirotasi, Desa/Kelurahan Matirotasi, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang
4. Lonrae, Desa/Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone

Lokasi Kampung Perikanan Budidaya :

1. Rumput laut, Kabupaten Bantaeng,
2. Bandeng, Kabupaten Bone
3. Rumput laut, Kabupaten Luwu
4. Bandeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

5. Windu, Kabupaten Pinrang
6. Rumput laut, Kabupaten Takalar
7. Rumput laut, Kabupaten Wajo
8. Mas, Kabupaten Toraja Utara
9. Nila, Kabupaten Bulukumba
10. Nila, Kabupaten Enrekang
11. Nila, Kabupaten Gowa
12. Rumput laut, Kabupaten Maros
13. Nila, Kabupaten Sinjai
14. Nila, Kabupaten Soppeng

Pada triwulan III tahun 2024, kegiatan Verifikasi QA terhadap produk perikanan hulu-hilir di Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya dengan 18 (delapan belas) lokasi belum dilaksanakan karena adanya kebijakan penambahan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan *Quality Assurance* terdiri dari inspektur Mutu Ahli Madya, Inspektur Mutu Ahli Muda, Asisten Inspektur Mutu dan dukungan manajerial.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Kegiatan Pendukung

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2024	Revisi	Realisasi
1.	3990.PBR.001 Penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM dalam rangka <i>Quality Assurance</i> produk hasil perikanan	90.000.000	70.000.000	28.275.957 (40,39 %)
2.	3990.PDD.001 Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter <i>Destructive Fishing</i>	65.000.000	56.500.000	6.589.630 (11,66 %)
3.	3990.PDD.002 Penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi (ISO 17020) untuk mendukung BKIPM sebagai <i>Quality Assurance</i> produk hasil perikanan	25.000.000	20.000.000	18.439.600 (9,20 %)
4.	3990.QIA.001 Verifikasi Penerapan Standar <i>Quality Assurance</i> pada proses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP)	179.580.000	185.000.000	-

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan kegiatan Verifikasi Penerapan Standar *Quality Assurance* pada proses produksi perikanan budidaya berubah menjadi kegiatan Inspeksi Penerapan Sertifikasi Produk Primer yang divalidasi

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024 bersumber pada kegiatan usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi dengan total anggaran sebesar Rp. 199.000.000, terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 185.000.000.

Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 28.000.000 terdapat kenaikan yang cukup signifikan atau sebesar 560%.

Akar masalah

Kegiatan Verifikasi QA Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan III tidak dapat dilaksanakan karena menunggu pendelegasian dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Tanggal 20 Agustus 2024 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tentang inisiasi penyusunan perjanjian kerjasama antara BPPMHKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan se Indonesia pada kesempatan tersebut di bahas poin - poin kerjasama tentang pelaksanaan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan (existing) oleh DKP provinsi Sulsel dan Balai Baesar KIPM Makassar serta meminta masukkan kegiatan sinergitas pusat dan daerah.
- Pada tanggal 12 September 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti kegiatan Sosialisasi secara during Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Yang Ikan Baik (CPOIB), dan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer, untuk meningkatkan kompetensi inspektur Mutu dan Asisten Inspektur. Output kegiatan berupa sertifikat hasil kegiatan.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Rekomendasi rencana aksi

Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan



Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Startegis 3

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup BPPMHKP

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup BKIPM, untuk mencapai sasaran strategis ini diperlukan dukungan 8 indikator kinerja yang harus dicapai sesuai target

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

yang telah ditetapkan . adapun penjelasan pencapaian 8 indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja	Target
Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	
1. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	1. 84 Indeks
2. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai Besar KIPM Makassar	2. 82 Nilai
3. Persentase penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	3. 100 %
4. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	4. 80 %
5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar)	5. 93,76 Nilai
6. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	6. 82 Nilai
7. Tingkat kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	7. 80 Nilai
8. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup lingkup Balai Besar KIPM Makassar	8. 80 Nilai

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK8. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
		Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/HKP	8	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	68,01	81,44	82,23	90,27	84	0	0	0,00	0,00

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang ASN dengan nilai maksimal bobot 25.

Nilai pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan jenjang jabatan :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh					
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional(keahlian)	25	23	20	15	10	5

- Kompetensi adalah pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan seminar dengan nilai bobot 40.

Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus “Diklat Fungsional”. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun;
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe “Diklat Fungsional atau Diklat Teknis” yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP;
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosial Kultural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- a. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - b. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - c. Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum, maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5;
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5
3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30
- Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :
- a. Nilai 30 (Sangat baik)
 - b. Nilai 25 (Baik)
 - c. Nilai 20 (Butuh perbaikan)
 - d. Nilai 15 (Kurang)
 - e. Nilai 10 (Sangat kurang)

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Tabel gambar

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5

Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplin sebagai berikut :

- a. Tidak Pernah 5
- b. Ringan 3
- c. Sedang 2
- d. Berat 1

Target Tahunan IP ASN 2024 adalah 84 :

Semester I : 81

Semester II : 84

Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3 : = 0 pegawai x 25 = 0
2. S2 : - Jabatan Pimpinan Pratama = 0 pegawai x 23 = 0
: - Jabatan Fungsional Keahlian = 8 pegawai x 23 = 184
184
3. S1 : - Jabatan Fungsional Keahlian = 12 pegawai x 20 = 240
: - Jabatan Pengawas = 1 pegawai x 21 = 21
: - Jabatan Pelaksana = 5 pegawai x 22 = 110

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	=	1 pegawai x 22	=	<u>22</u>
					393
4. D3	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	=	3 pegawai x 21	=	63
	- Jabatan Pelaksana	=	1 pegawai x 21	=	<u>21</u>
					84
5. SMA	: - Jabatan Pelaksana	=	4 pegawai x 20	=	80
	: - Jabatan Fungsional Keterampilan	=	1 pegawai x 20	=	<u>20</u>
					100
					761
					Jumlah Total
					761

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{761}{36} = 21,14$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kualifikasi pendidikan **21,14**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai kualifikasi pendidikan sebesar **21,14** ini berarti nilai kualifikasi pendidikan mengalami kenaikan sebesar 0,08 dari nilai pada triwulan II tahun 2024 yaitu 21,06 hal ini disebabkan karena adanya perubahan pegawai yang mutasi masuk sebanyak 4 orang pegawai.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 20,43 maka terjadi peningkatan sebesar 0,71.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

-	31 pegawai ASN mendapat nilai 40	=	31 x 40	=	1.240
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 39,25	=	1 x 39,25	=	39,25
-	2 pegawai ASN mendapat nilai 34,75	=	2 x 34,75	=	69,5
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 30	=	1 x 30	=	30
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 15	=	1 x 15	=	15
	Jumlah				= 1.393,75

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.393,75}{36} = 38,72$$

Jadi pada triwulan III diperoleh nilai rata-rata kompetensi ASN sebesar **38,72**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai Kompetensi ASN sebesar **38,72** ini berarti ada Penurunan sebesar 0,26 karena pada nilai kompetensi pada triwulan II diperoleh nilai 38,98. Penurunan tersebut disebabkan adanya pegawai mutasi masuk sebanyak 4 pegawai dimana terdapat 2 pegawai masih memperoleh nilai sedang dan sangat rendah.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 39,61 maka terjadi penurunan 0,89. Penurunan nilai tersebut dikarenakan 2 pegawai yang mutasi masuk tersebut 1 pegawai yang masih memperoleh nilai sedang dan 1 pegawai dengan nilai sangat rendah.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 35 orang ASN memperoleh nilai Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) dengan predikat baik sehingga mendapat bobot nilai $25 = 35 \times 25 = \underline{875}$
- 1 orang ASN tidak mendapat penilaian Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) sehingga mendapat bobot nilai $0 = 1 \times 0 = \underline{0}$
- Sehingga Total Kinerja adalah $875 + 0 = 875$

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{875}{36} = 24,31$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kinerja **24,31**

Pada triwulan III tahun 2024 nilai kinerja sebesar 24,31 ini berarti ada penurunan nilai kinerja sebesar 0,69 dibanding nilai kinerja triwulan II tahun 2024 sebelumnya yaitu 25. Terjadinya penurunan nilai disebabkan adanya mutasi pegawai masuk 1 orang pegawai yang tidak di nilai untuk nilai kinerja SKP oleh UPT asal.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 24,41 maka terjadinya penurunan sebesar 0,10 disebabkan oleh adanya 1 orang mutasi pegawai masuk yang tidak di nilai untuk nilai kinerja SKP yang disebabkan dari sejak UPT asal belum melakukan sinkronisasi dari aplikasi myasn pegawai ke SIASN dimana hal tersebut berada diluar kendali untuk pembinaan di BKIPM Makassar karena hal tersebut merupakan penilaian saat masih berada di UPT asal .

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 36 orang ASN mendapat nilai 5 = $36 \times 5 = 180$

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

$$\frac{180}{36} = 5$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata disiplin **5**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai disiplin sebesar 5 ini berarti tidak ada perubahan pada nilai disiplin untuk nilai triwulan II tahun 2024 sebelumnya.

Dan untuk perbandingan triwulan III tahun 2023 juga sama tidak ada perubahan dengan triwulan III tahun 2024.

Pencapaian untuk Triwulan III Tahun 2024 nilai capaian sebesar 89,16 indeks profesionalitas (IP) yaitu :

1. Kualifikasi pendidikan = 21,14 IP
2. Kompetensi = 38,72 IP
3. Kinerja = 24,31 IP
4. Disiplin = 5 IP

$$\begin{aligned}\text{Nilai Realisasi IP ASN} &= \text{Kualifikasi Pendidikan} + \text{Kompetensi} + \text{Kinerja} + \text{Disiplin} \\ &= 21,14 + 38,72 + 24,31 + 5,00 \\ &= 89,16\end{aligned}$$

Untuk Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 83,22 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 89,16 masih lebih tinggi dengan selisih 5,94
2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP dengan nilai IP ASN 84,58 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 89,16 masih lebih tinggi dengan selisih 4,58

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> pertanggal 8 dan 9 Oktober 2024

Seluruh pegawai ASN sebanyak 36 orang terlibat dalam pencapaian target indikator ini, yang terdiri dari :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Plt. Kepala	1
2.	Kepala Subbagian Umum	1
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan/Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	19
5.	Arsiparis	1
6.	Fungsional Umum	10

SDM pengelola yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum, Fungsional APK APBN dan pengelola kepegawaian terdiri dari Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan;

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran semula Rp. 77.285.000,- menjadi Rp.73.833.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	12.000.000	11.000.000
2.	Refreshment panelis organoleptik	3.560.000	3.560.000
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	25.211.000	22.759.000
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.514.000
	Jumlah	77.285.000	73.833.000

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.833.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. **66.363.865,-** atau **89,88%**, terjadi kenaikan sebesar 73,96% dari triwulan II tahun 2024 yang realisasinya 15,92 %; dengan uraian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	11.000.000	7.326.430	66,60
2.	Refreshmen panelis organoleptik	3.560.000	1.950.840	54,80
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	22.759.000	22.749.660	99,96
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	34.336.935	94,04
	Jumlah	73.833.000	66.363.865	89,88

Jika dibandingkan dengan periode yang sama yakni triwulan III tahun 2023 yang realisasi anggarannya 57,02%, maka terjadi kenaikan sebesar 32,86 %.

Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website

www.ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn

Akar Masalah

Meskipun Balai Besar KIPM Makassar mendapat nilai IP ASN 89,16 dengan kategori tinggi namun capaian tersebut belum mencapai nilai IP ASN secara maksimal karena untuk pegawai mutasi yang masuk masih ada yang memperoleh nilai dengan kategori sedang dan kategori sangat rendah dan diperlukan peningkatan nilai IP ASN bagi pegawai yang bersangkutan melalui diklat pengembangan kompetensi dan salah satu penyebab masih rendahnya nilai pegawai tersebut karena adanya nilai kinerja SKP

pegawai tersebut dimana saat dari UPT asal belum melakukan sinkronisasi dari aplikasi myasn pegawai ke SIASN dan hal tersebut berada diluar kendali untuk pembinaan di BBKIPM Makassar karena hal tersebut merupakan penilaian saat masih berada di UPT asal;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- 1) Telah disampaikan kepada pegawai untuk mengikuti seminar pengembangan kompetensi serta melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi *myasn.bkn.go.id*;
- 2) Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada *myasn.bkn.go.id*;
- 3) Beberapa kegiatan yang telah terlaksana dalam mendukung kegiatan peningkatan kompetensi kepegawaian yaitu :
 - Kegiatan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan di BBKIPM Makassar dengan nara sumber dari Sekretariat BPPMKHP Bapak Wawing Walidi yang diikuti oleh seluruh ASN, PPNPN dan PJLP BBKIPM Makassar pada tanggal 6 September 2024. Output yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (ASN, PPNPN dan PJLP) tentang regulasi dan ketentuan terkait rekrutment PPPK tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
 - Kegiatan Persiapan Implementasi alat ukur kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi secara daring dengan menggunakan alat tes *Situational Judgement Test (SJT)* dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan pada Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2024. Output yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta terkait

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Implementasi alat ukur kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan Kemenerian Kelautan dan Perikanan.

- Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang diikuti oleh Muhammad Arman, S.A.P yang dilaksanakan oleh BKN secara daring pada tanggal 26, 29, 30 dan 31 Juli 2024. Output yang dihasilkan yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat untuk proses perpindahan jabatan.
- Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dari Golongan II ke golongan III yang diikuti oleh 2 orang pegawai an. Oktovianus dan Halim yang dilaksanakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi di Surabaya pada tanggal 8 s/d 9 September 2024. Output yang dihasilkan yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk di usulkan kenaikan pangkat/golongan.
- Surat Sekretaris BPPMHKP nomor B.2953/BPPMHKP.1/KP.520/VIII/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 perihal penyampaian hasil uji kompetensi yang menyatakan pegawai an. Taufiq,S.PKP dinyatakan lulus dalam uji kompetensi Perpindahan dari Asisten Inspektur Mutu Penyelia menjadi Inspektur Mutu Ahli Pertama.

Rekomendasi rencana aksi

- 1) Melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian UPT Asal Terkait nilai IP ASN pegawai yang masih sangat rendah .
- 2) Melaksanakan sharing session kepegawaian pada rapat bulanan.
- 3) Akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan panelis organoleptic.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

🔍 Tolok ukur: ropeg.kip.go.id/ip-asn/2024/ukur/1296

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	66	21.09	84.38 %	32.33	80.82 %	25	83.33 %	4.72	84.4 %	83.14	TINGGI
2	PUSAT KARANTINA IKAN	8	0	0 %	8	0 %	0	0 %	0	0 %	0	SANGAT RENDAH
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	31	20.64	83.76 %	36.92	92.3 %	25.85	86.17 %	4.8	96 %	87.92	TINGGI
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KEPATUHAN	33	21.55	86.2 %	32.45	81.13 %	25	83.33 %	5	100 %	84	TINGGI
5	BALAI BESAR KIPM JAKARTA I	10	29.8	83.2 %	32.42	81.05 %	25	83.33 %	5	100 %	83.22	TINGGI
6	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR	36	21.04	84.56 %	36.71	86.8 %	24.31	81.03 %	5	100 %	86.86	TINGGI
7	BALAI KIPM DENPASAR	16	21.89	86.76 %	32.96	81.65 %	25	83.33 %	5	100 %	84.34	TINGGI
8	BALAI KIPM SURABAYA I	46	21.3	85.2 %	37.93	84.83 %	25.11	83.7 %	5	100 %	89.54	TINGGI
9	BALAI KIPM MEDAN I	18	21.17	84.83 %	36.38	80.95 %	25	83.33 %	5	100 %	87.54	TINGGI
10	BALAI KIPM BALIKPAPAN	17	20.78	83.44 %	37.94	84.85 %	29.41	88.03 %	5	100 %	92.12	SANGAT TINGGI
11	BALAI KIPM JAYAPURA	10	21.6	86.4 %	34.59	86.48 %	25	83.33 %	5	100 %	86.19	TINGGI
12	BALAI KIPM JAKARTA II	19	21.47	85.63 %	30.18	80.45 %	25	83.33 %	5	100 %	87.66	TINGGI
13	BALAI KIPM SURABAYA II	41	21	84.4 %	36.39	88.47 %	25	83.33 %	5	100 %	90.48	TINGGI
14	BALAI KIPM MATARAM	16	21.81	87.24 %	39.41	88.52 %	27.5	91.67 %	5	100 %	93.73	SANGAT TINGGI

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

The screenshot shows a web dashboard for 'IP ASN 2024'. It features a search bar and a table with columns for 'No', 'Unit Kerja', 'Jumlah Pegawai Yang Dibidang', 'Kualifikasi (Bobot 20)', 'Kompetensi (Bobot 40)', 'Kinerja (Bobot 30)', 'Disiplin (Bobot 10)', 'TOTAL', and 'Keterangan'. The table lists six units, with the last one, 'BALAI BESAR PENJAJAN PENERAPAN PROSEDUR KELAUTAN DAN PERIKANAN', highlighted in blue.

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibidang	Kualifikasi (Bobot 20)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 10)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARAT DILEN PENJAJAN DAN SANG PEGAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	21,01	80,04 %	30,09	75,22 %	25,2	84 %	5	100 %	81,8	TNGG
2	DIREKTORAT LOGISTIK	48	22,08	88,32 %	32,08	80,21 %	24,88	83,3 %	5	100 %	83,86	TNGG
3	DIREKTORAT PERDOLAHAN	48	22,1	88,4 %	35,27	88,17 %	25,1	83,67 %	5	100 %	87,47	TNGG
4	DIREKTORAT PERKABARAN	57	21,6	88,4 %	35,16	87,97 %	25,08	83,63 %	5	100 %	86,87	TNGG
5	DIREKTORAT PEMBERDAYAAN USAHA	38	22,34	88,26 %	33,48	83,68 %	25,13	83,77 %	5	100 %	85,93	TNGG
6	BALAI BESAR PENJAJAN PENERAPAN PROSEDUR KELAUTAN DAN PERIKANAN	11	11,16	100 %	15,91	100 %	18,10	100 %	5	100 %	54,88	TNGG

IK 9. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TWIII 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHPK	9 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	91,93	98	95,3	87,13	82	0	0	0	0,0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 %

Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa :
Renstra 2020-2024, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi.

Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen Renstra 2020-2024, Renja dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I dan II

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 %

Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa :
Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I

3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 %

Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan.

Pada Triwulan III telah terealisasi untuk laporan kinerja Triwulan III tahun 2024 sehingga terealisasi tercapai 3 %

4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja . Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerjaku yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan III telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal. Evaluasi Eksternal berupa reuiu penilaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal KKP di Bandung pada tanggal 9 Juli 2024, sehingga realisasi tercapai 10% .

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Bobot realisasi capaian :

Parameter 1 (0%) + parameter 2 (0 %) + parameter 3 (3%) + parameter 4 (10%) = 13 %.

Realisasi capaian = Bobot realisasi capaian x Target

$$= 13 \% \times 82$$

$$= 10,66$$


Dengan demikian realisasi capaian indikator ini pada triwulan III adalah 10,66 dari 82

Hasil penilaian SAKIP sampai dengan Triwulan III 2024 adalah :

Nilai Triwulan I + Nilai triwulan II + Nilai Triwulan III

$$49,61 + 12, 71 + 10,66 = 72,98$$

Berdasarkan hasil monev pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh nilai 83,8 yang meliputi komponen perencanaan dengan nilai 25,50, pengukuran kinerja dengan nilai 25,50, pelaporan kinerja dengan nilai 12,30, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 20,50.



The screenshot shows the Kinerjaku application interface. At the top, there is a navigation bar with the logo of the Ministry of Forestry and Environmental Conservation and the text 'Kinerjaku'. Below this, the user is logged in as 'Balai, 8 Oktober 2024'. The main content area displays a table with performance data for the unit 'Balai Besar KIPM Makassar'. The table has columns for 'NO', 'Kode', 'UNIT KERJA', 'PERENCANAAN KINERJA (RN)', 'PENGUKURAN KINERJA (RN)', 'PELAPORAN KINERJA (RN)', 'EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (RN)', 'NILAI AKUNTABILITAS', and 'PREDIKAT'. The data row shows a score of 83.8 and a grade of 'A'.

NO	Kode	UNIT KERJA	PERENCANAAN KINERJA (RN)	PENGUKURAN KINERJA (RN)	PELAPORAN KINERJA (RN)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (RN)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	11100000	BALAI BESAR KIPM MAKASSAR (KE. SatekQ)	25,50 Q	25,50 Q	12,30 Q	20,50 Q	83,8	A

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Jika dibandingkan dengan hasil reviu Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KKP diperoleh nilai 84,10 dengan predikat A (sumber data *simwas.kkp.go.id*), maka hasil penilaian secara eksternal lebih dari nilai target. Adapun rincian penilaian sebagai berikut :

8:43 PM

E-AKIP | LEVEL 1
simwas.kkp.go.id

Unit Kerja 1 : SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Kerja 2 : BALAI BESAR KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MAKASSAR
Unit Kerja 3 : BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DENPASAR
Unit Kerja 4 : STASUS KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BANDUNG

C. Summary Nilai Akuntabilitas Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
			Esasen I	Unit 1	Unit 2	Unit 3	Unit 4
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	27.60	26.10	26.10	24.30	26.10
2.	PENGUKURAN KINERJA	30	26.10	26.10	26.10	26.10	26.10
3.	PELAPORAN KINERJA	15	13.05	12.15	12.15	12.15	12.60
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	21.75	19.75	19.75	19.00	19.75
NILAI UNIT KERJA		100	88.50	84.10	84.10	81.55	84.55
			A	A	A	A	A

Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang mengalami beberapa revisi terdiri dari :

Kegiatan	Anggaran		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
3987.EBA.958. Layanan Hubungan masyarakat	Rp 12.470.000	Rp 10.970.00,-	Rp 12.575.000,-
BA.963 Layanan Data dan Informasi	Rp 14.028.000	Rp 14.028.000	Rp 26.093.000,-
Jumlah	Rp 26.498.000,-	Rp 24.998.000,-	Rp 38.668.000,-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun realisasi sampai pada triwulan III tahun 2024 sebesar 37.405.199 atau 96,73 % sedangkan pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 5.593.000 atau 22,37 %, mengalami kenaikan sebesar 74,36%

Jika dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 9.249.584 atau 79,74%, maka triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 37.405.199 atau 96,73 % mengalami kenaikan sebesar 16,99 %

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Dapat dibandingkan Nilai SAKIP Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar dengan nilai 81.55 (Predikat A) sedangkan Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai 84.10 (Predikat A).

Akar Masalah

Berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 9-14 Juli 2024 dinyatakan bahwa pada kolom tindakan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan peningkatan kompetensi/*sharing session* belum dapat menggambarkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2455/BPPMHKP.1/TU.330/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diadakan di Bandung

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

yang dihadiri oleh Tim Itjen, perwakilan dari Pusat Pengendalian Mutu, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Denpasar, Balai Stasiun KIPM Bandung,

- telah melakukan revisi Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Itjen meliputi benchmark Indikator IP ASN, Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar
 - Melengkapi informasi pada LKj, terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan informasi keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja beserta upaya nyata perbaikannya
2. Telah Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU pada indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan /atau pengolahan Ikan menerapkan sistem traceability

Rekomendasi rencana aksi

- Sosialisasi Hasil reuiu Inspektorat KKP terkait perlunya output kegiatan yang harus dicantumkan pada laporan kinerja.
- Melakukan Perbaikan Laporan Kinerja pada Triwulan IV

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Kegiatan Reviu Mandiri SAKIP oleh Inspektora Jenderal KKP

IK 10. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHKP	10 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100,0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;

Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$% P = (A/B) \times 100\%$$

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Keterangan :

%P = Persentase penyelesaian temuan;

A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan;

B = Nilai temuan BPK tahun 2023;

Pada triwulan III tahun 2024 tidak diterima temuan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan secara formal, sehingga tingkat capaiannya 100%;

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;

Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan III tahun 2023 karena uraian indikator kinerja berbeda;

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Pengelola anggaran yang melaksanakan indikator kinerja ini sama dengan periode triwulan II tahun 2024 yakni 11 orang.

Untuk mendukung kegiatan, dialokasikan anggaran semula Rp. 11.644.000,- direvisi menjadi Rp.4.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	8.044.000	1.042.000
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer suplies	3.600.000	3.228.000
	Jumlah	11.644.000	4.270.000

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.270.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.262.500,- atau 99,82% yang digunakan untuk penjilidan dan penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer suplies Rp. 3.220.500,-, terjadi kenaikan sebesar 82,41% dari triwulan II tahun 2024 yang realisasinya 17,41%, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	1.042.000	1.042.000	0,00
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer suplies	3.228.000	3.220.500	99,77
	Jumlah	4.270.000	4.262.500	99,82

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 16.400.000,- yang direvisi menjadi Rp. 11.600.000,- dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp. 9.249.584,- atau 79,74%. Dengan demikian terjadi kenaikan realisasi sebesar 20,08% pada periode yang sama tahun 2024;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar masalah

- Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Perbedaan pemahaman dalam implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan verifikasi secara berjenjang pada dokumen tagihan pembayaran belanja mulai dari PPABP, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM;
- Telah direalisasikan anggaran kegiatan pemantauan dan evaluasi sebesar 99,82% sampai dengan triwulan III tahun 2024;
- Mengikutkan pegawai pengelola anggaran pada pelatihan peningkatan kompetensi. Pada triwulan III tahun 2024, upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pengelola anggaran adalah dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas yang diemban, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai	Nama Pelatihan	Penyelenggara
1	2	3	4
1	Kamdani	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Bagi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) : <i>Microlearning</i> Tata Cara Pembayaran Menurut PMK Nomor 62/PMK.05/2023 Tahap II Tahun 2024 Tanggal 1-15 Juli 2024	Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2	Kamdani	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Bagi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) : <i>Microlearning</i> Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Tahun 2024 Tanggal 16-31 Juli 2024	Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
3	Kamdani Karwit	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 21 Agustus 2024	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP
4	Kamdani Bakhtiar	Webinar Edukasi Perpajakan : Cara Mudah dan Tips Pembuatan e-Bupot Unifikasi Hingga Pelaporan SPT Masa Tanggal 25 Juli 2024	Pajakind
5	Kamdani Bakhtiar	Webinar Edukasi Perpajakan : Strategi Efektif dalam Menangani SP2DK atau Himbauan Tanpa Pemeriksaan Tanggal 21 Agustus 2024	Pajakind

Rekomendasi rencana aksi

Refreshment regulasi pengelolaan anggaran;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK 11. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHP	11 Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	82	65	100	100	80	80	100	125	125	-	-

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makssar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum Nt$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat audit kinerja dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%, sama seperti pada periode triwulan III tahun 2023 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP sehingga nilai capaian kinerja adalah sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2023, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang telah direvisi dari Rp.665.222.000,- menjadi Rp.681.026.000,- yang sampai dengan triwulan III tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.316.184.398,- atau 46,43% yang digunakan untuk belanja

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Adapun progress peningkatan penggunaan anggaran dari triwulan II ke triwulan III sebesar 14,76%. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.600.000,- terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5770,91%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan kegiatan yang mendukung indicator kinerja ini, yang semula hanya berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, menjadi belanja operasional perkantoran.

Adapun realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2023 dari pagu Rp. 11.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 9.248.584,- atau 79,73%, secara persentase lebih besar 33,3% dari realisasi triwulan III tahun 2024.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan sdm dalam mendukung iku ini.

Akar Masalah

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

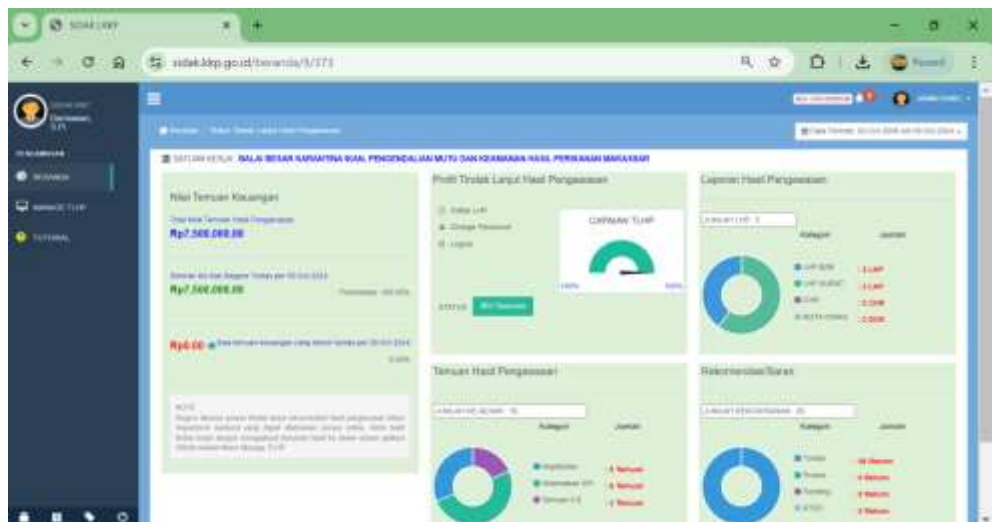
LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;
2. Telah dilaksanakan briefing kepada tim pengelola kegiatan dan anggaran pada tanggal 9 September 2024, dengan substansi briefing salah satunya adalah pengelolaan kegiatan dan anggaran dan pemantauan hasil audit oleh itjen KKP.

Rekomendasi rencana aksi

Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala.



LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IK 12. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/HKP	12 Nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar	-	88	89	98,44	96,38	93,76	93,76	97,55	117,50	117,50	-	-

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Ruang lingkup :

1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA.
2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (*spending better*) dan mendukung pemulihan ekonomi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek;
4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ);
5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper;
6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (*value for money*);
7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi.

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :

1. Kualitas perencanaan anggaran
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (15%)
2. Kualitas pelaksanaan anggaran
 - a. Penyerapan Anggaran (20%)
 - b. Belanja Kontraktual (10%)
 - c. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - d. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA)
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 - a. Capaian Output (25%)

Capaian nilai IKPA pada triwulan III tahun 2024 sebesar 97,55 atau 104,02% dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- a. Revisi DIPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.

Pada triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah :

$$(100/100) \times 10\% = 10\%$$

- b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN sampai September 2024 sebesar 90,78 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DIPA adalah $(90,78/100) \times 15\% = 13,61\%$.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi Monev PA 94,67 maka diperoleh bobot sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

$$94,67 \times 20\% = 18,93\%$$

Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker, dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja (1) Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%), (2) Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%), dan (3) Komponen akselerasi kontrak (bobot 20%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 tidak terdapat kontrak dini, belanja modal dan akselerasi kontrak, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

- Akselerasi kontrak dini	: 1 x 40% = 40
- Akselerasi belanja modal	: 1 x 40% = 40
- Akselerasi kontrak	: 1 x 20% = 20
Jumlah	= 100

Dengan demikian capaian indikator kinerja belanja kontraktual adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

- b. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra. Pada triwulan III tahun 2024 seluruh SPM-LS kontraktual telah disampaikan tepat waktu sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$100 \times 10\% = 10.$$

- c. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP kartu kredit pemerintah, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) Pengelolaan UP dan TUP tunai (bobot 90%), dan (2) Pengelolaan UP

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

kartu kredit pemerintah (bobot 10%). Untuk pengelolaan UP dan TUP tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari (1) Ketepatan waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP (bobot 25%), dan (3) Setoran TUP (bobot 25%).

Pada triwulan III tahun 2024 pengelolaan UP dan TUP dihitung sebagai berikut :

(1) Perhitungan nilai pengelolaan UP dan TUP tunai :

- Ketepatan waktu	: 100 x 50%	= 50
- Persentase GUP	: 100 x 25%	= 25
- Setoran TUP	: 100 x 25%	= 25
	Jumlah	= 100

Jadi nilai UP dan TUP tunai adalah : $(100/100) \times 90\% = 90$.

(2) Perhitungan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah :

Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga nilainya adalah 100.

Jadi nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

Dengan demikian nilai kinerja pengelolaan UP dan TUP adalah : $(90 + 10)/100 \times 10\% = 10\%$.

- d. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di triwulan IV.

Pada triwulan III tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu	: 100 x 30%	= 30
- Capaian RO	: 100 x 70%	= 70
	Jumlah	= 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah $(100/100) \times 25\% = 25\%$.

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	90,78	94,67	100	100	100	0	100	97,55
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25	
Nilai Akhir	10	13,62	18,93	10	10	10	0	25	
Nilai Aspek	95,39		98,67					100	

Dibandingkan dengan realisasi IKPA triwulan II 2024 yaitu sebesar 98,93, maka terjadi penurunan sebesar 1,38 atau 1,39% pada triwulan III 2024 (97,55). Hal ini disebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam halaman III DIPA sehingga capaian penyerapan anggaran hanya 94,67.

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode triwulan III tahun 2024 adalah 97,55 dari target tahunan sebesar 93,76 atau tingkat capaiannya 104,02%. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 yang nilainya 97,44, mengalami peningkatan nilai IKPA sebesar 0,11%, hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada nilai kualitas perencanaan anggaran dari 92,95 menjadi 95,40, dan nilai unsur kualitas pelaksanaan anggaran yang semula 98,43 menjadi 98,67;

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 setelah revisi sebesar Rp. 9.468.000,- dari anggaran sebelumnya Rp.10.632.000,-. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan Rp. 9.440.000,- atau 99,70% yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan supplies komputer, perjalanan pembinaan keuangan, dan perjalanan konsultasi perpajakan;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yang besarnya 85,56%, maka terjadi kenaikan sebesar 14,14%;

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dengan periode yang sama yang sebesar 77,01%, maka terjadi kenaikan sebesar 22,69%;

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN.

Akar masalah

Terjadinya penurunan nilai IKPA triwulan III 2024 sebesar 1,39% dari triwulan II 2024.

Tindakan yang dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan.



LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

- Mengikuti Treasury Award KPPN Makassar II semester I 2024 pada tanggal 25 september 2024.



Rekomendasi rencana aksi

- Mentaati pencairan anggaran disesuaikan dengan rencana penarikan dana;
- Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai kebutuhan

IK 13. Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPMHPK	13 Nilai kinerja anggaran lingkup Balai Besar KIPM Makassar			86	87,87	86,2	82	82	74,24	86,32	86,32	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.

Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:

- Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan;
- Penyusunan reviu angka dasar;
- Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan
- Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi

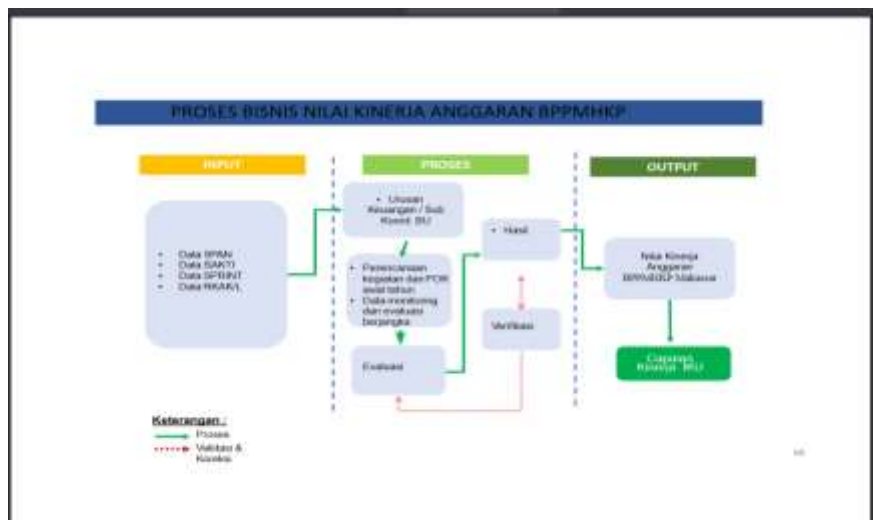
Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.

Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat perubahan pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 pengukuran Nilai kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai kinerja anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.

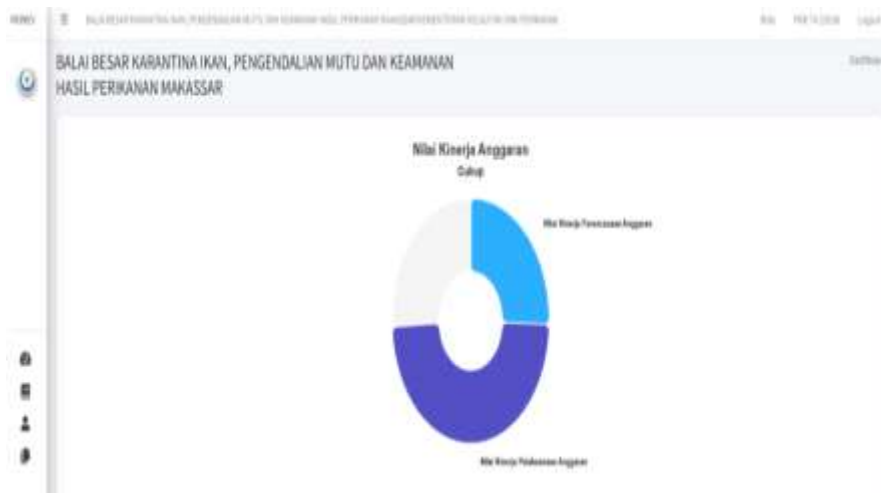
Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Monev Kemenkeu

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 25,46 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48.78 %

Total Nilai Kinerja Anggaran TW III 2024 adalah sebesar 74,24 atau “Cukup”

Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard adalah “Cukup” artinya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KIPM Makassar cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan dari segi Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berikut adalah dashboard Indikator Pengukur Nilai Kinerja Anggaran :

1. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran : Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Dibawah ini adalah Dashboard aplikasi yang menampilkan Nilai kinerja Perencanaan Anggaran.

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Tampilan Dashboard Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



Dashboard Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Dengan demikian nilai kinerja perencanaan anggaran yang diperoleh adalah 25,46%.

Hal ini ditunjukkan pada dashboard aplikasi sebagai berikut:

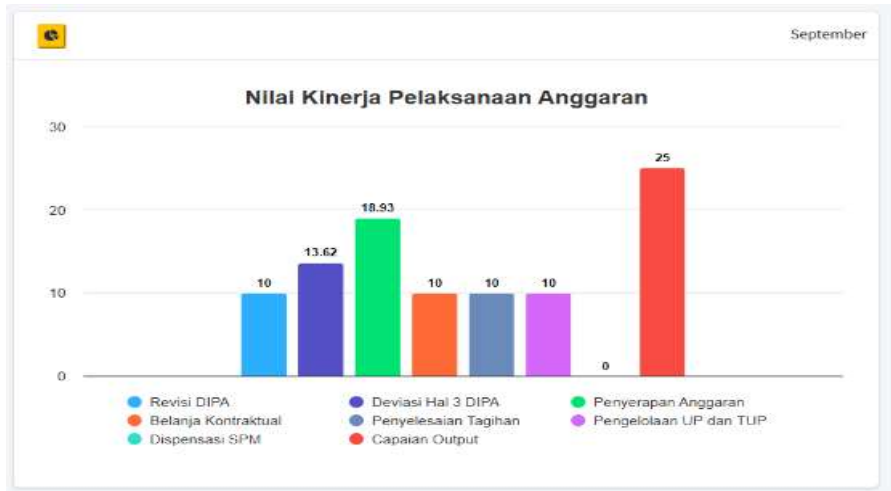


2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : Pengukuran Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran di dukung oleh 7 indikator yaitu: Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran,

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian output.

Tampilan Dashboard Komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Berikut adalah bobot masing-masing indikator:

- Revisi DIPA (10) = Capaian % 100
- Deviasi Hal 3 DIPA (15) = Capaian % 90.78
- Penyerapan Anggaran (20) = Capaian % 94.67
- Belanja Kontraktual (10) = Capaian % 100
- Penyelesaian Tagihan (10) = Capaian % 100
- Pengelolaan UP dan TUP (10) = Capaian % 100
- Capaian Output (25) = Capaian % 100

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Dengan demikian nilai kinerja perencanaan anggaran yang diperoleh adalah 48.78%. Hal ini ditunjukkan pada dashboard aplikasi sebagai berikut:



Aplikasi Monev Kemenkeu tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya perbedaan indikator pengukuran untuk mendapatkan nilai Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi Nilai Capaian Kinerja Triwulan III 2024 dan 2023 adalah 74,24 % dan 83,26 %. terjadi penurunan Triwulan III tahun 2024 sebesar 9.02 %. Hal ini dipengaruhi penyerapan anggaran TW III tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2024.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp80.159.000 setelah revisi dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp71.621.000. Adapun sampai dengan triwulan III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp74.642.304 atau 93,12% yang digunakan untuk:

- Belanja ATK tercapai 100 %
- Belanja perjalanan dinas biasa tercapai 93.06 %

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 5,56% dari triwulan II 2024 ke triwulan III 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp99.022.000 dengan realisasi anggaran TW III 2023 adalah Rp73.780.508 atau 74,51%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 18,61 % pada triwulan III 2024 jika dibandingkan triwulan III 2023. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2024

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IKU ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar. Komitmen ini juga telah mendapat apresiasi dari Kementerian Keuangan. Pada tgl 25 September 2024 Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan terbaik III dengan predikat Satuan Kerja dengan transaksi Digipay I Tertinggi yang diserahkan pada acara Treasury Award semester I 2024 yang diselenggarakan oleh KPPN Makassar II. Adapun Balai Besar KIPM Makassar sendiri merupakan salah satu satker mitra KPPN Makassar II diantara 201 satker mitra.

Berikut satker mitra KPPN Makassar yang mendapatkan penghargaan:

Juara I Balai Diklat Keuangan Makassar

Juara II Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

Juara III Balai Besar KIPM Makassar

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Tujuan kegiatan Treasury Award adalah untuk memberikan motivasi kepada satker selaku mitra kerja dalam meningkatkan tata kelola perencanaan anggaran, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban keuangan. Penghargaan ini menjadi bukti Balai Besar KIPM Makassar untuk selalu menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan serta memberikan spirit kepada pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan kinerja dan performanya.

Akar masalah

Penyerapan anggaran di TW III belum mencapai target 75%. Realisasi di TW III 2024 baru mencapai 64%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Operator telah melakukan konsultasi terkait proses bisnis Monev Kementerian Keuangan pada layanan SAPA ANGGARAN.



Jawaban: • [KMK-466-2023-PPKA-dan-EKA-Perencanaan-Anggaran.pdf](#) (2.17 MB)

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024



Rekomendasi rencana aksi

Melaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW IV 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Penerimaan Sertifikat penghargaan dari KPPN

IK 14. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024	
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra
Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/HKP	14 Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar				79,56	78,26	80	0	0	0	0,0	-	-

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.

Perlunya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksananya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)
3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)
4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %)

Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)

Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di aplikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut :

- a. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 711.256.000,-
- b. Paket Swakelola sebanyak 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.467.538.000,-
- c. Paket Penyedia dalam swakelola sebanyak 68 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.294.232.000,-

Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP telah direalisasikan pada Triwulan I sehingga capaian pada Triwulan III menjadi = 0%;

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar tidak mempunyai anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli tahun 2024 terdapat revisi

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Sarana Pengujian Mutu senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III pengadaan belanja modal tersebut belum dilaksanakan karena tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan pada alat laboratorium tersebut.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%;

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah dilakukan pencatatan dan penginputan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pelaksanaan penginputan di lakukan secara berjenjang dari Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

No. Revisi	No. Bukti	Tgl. Dokumen	Tgl. Approva	Total Harga	Aksi
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.100.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian
00000000000000000000	00000000000000000000	00-00-2024	00-00-2024	1.000.000.000.000	Uraian Pembelian

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (0 %)

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Progres pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Balai Besar KIPM Makassar pada periode triwulan III menggunakan system Digipay - Marketplace yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-20/PB.2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, dan secara teknis diatur dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada table deibawah ini :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

REKAPITULASI BELANJA TRIWULAN III MENGGUNAKAN DIGIPAY - MARKETPLACES								
JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL
44	2.002.500	3.872.500	-	-	-	21	873.000	1.000.000

Total pengadaan menggunakan digipay sebesar Rp. 4.872.500,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Untuk progress pengadaan belanja barang baik secara eletronik dan konvensional dapat dilihat pada table dibawah ini :

Realisasi	Belanja Barang (manual)	Belanja Digipay
7.797.806.606	7.792.934.106	4.872.500

Dari table diatas terlihat belanja barang secara konvensional mencapai 99,93% karena beberapa belanja barang tidak dapat dilaksanakan secara eletronik, seperti :

1. Belanja perjalan dinas pegawai;
2. Belanja jasa penyedia jasa lainnya perorangan;
3. Belanja Honor PPNPN;
4. Belanja Langganan daya dan jasa;
5. Belanja honor pengelola anggaran;
6. Eksploitasi kendaran dinas.

Seluruh pengadaan belanja barang diatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 30%.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan III adalah :

Unsur 1 (0%) + Unsur 2 (0%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (29,97%) = 29,97 % dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(29,97\%/80\%) \times 100\% = 23,97 \%$.

Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2023 dengan nilai capaian 64,51% maka terjadi penurunan signifikan sebesar 59,82%.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 9 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.149.156.000,- berbeda dengan anggaran pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.165.810.000,- dimana terjadi revisi kurang sebesar Rp.16.654.000,-. dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja	43.546.000	41.048.950	2.497.050	94,27
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	13.110.000	8.547.820	4.562.180	65,20
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pas Pelabuhan Laut/ Udara	8.500.000	3.800.000	4.700.000	44,71
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu	84.000.000	63.923.638	20.076.362	76,10
TOTAL		149.156.000	117.320.408	31.835.592	78,66

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Akar Masalah

Lambatnya progres penyerapan anggaran pada akun belanja modal peralatan laboratorium karena menunggu persetujuan sehubungan dengan tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah melakukan revisi anggaran untuk kegiatan penambah daya tahan tubuh dan operasional pas pelabuhan/udara.
- Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar telah bersurat ke Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2345/BBKIPM.MKS/PL.410/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk barang yang nilai TKDNnya kurang dari 25% dan Produk Impor.
- Pada triwulan III telah dilaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Pengelola Barang/Jasa tanggal 17 September 2024 atas nama Abdul Mubarak Azis dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kompetensi LKPP Nomor: 08-00628-0924.

Rekomendasi rencana aksi

- Menyiapkan langkah strategis pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yang Tingkat Komponen Dalam Negerinya tidak mencapai 25 %;
- Melakukan revisi RKAKL disesuaikan dengan kebutuhan.
- Melakukan update SIRUP sesuai revisi RKAKL yang telah disahkan.
- Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa sesuai regulasi yang berlaku.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Koordinasi dan Komunikasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan Baang/Jasa dengan Penyedia Barang

IK15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (IK)	Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra Balai Besar KIPM Makassar 2020 - 2024		
		2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target TW III 2024	Realisasi TW III 2024	% Realisasi terhadap Target TW III 2024	% Realisasi terhadap Target Tahun 2024	Target 2024	% Capaian terhadap Target Renstra	
		Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BPPM/HKP	14	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai Besar KIPM Makassar				79,56	78,26	80	0	0	0	0,0

Pengelolaan BMN dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan BMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan BMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013.

Evaluasi pengelolaan BMN di KKP memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:

- **Meningkatkan Akuntabilitas** untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah setiap tahap pengelolaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Optimalisasi Penggunaan Aset** untuk mengidentifikasi potensi penggunaan BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat membantu kementerian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset.
- **Kepatuhan terhadap Regulasi:** untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara.
- **Meningkatkan Kualitas Pelayanan:** Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor kelautan dan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

perikanan dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:

1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada triwulan III, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%). Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2023 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:
 - Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.318.899.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.295.884.000,-.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.241.609.000,-.

Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan pada triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kendaraan telah terealisasi senilai Rp.144.663.630,- dari nilai pagu anggaran Rp.318.899.000,- atau 45,36 %
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan telah terealisasi senilai Rp.295.730.017,- dari pagu anggaran Rp.295.884.000,- atau 99,95 %
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi senilai Rp.127.493.712,- dari pagu anggaran Rp.241.609.000,- atau 52,77 %

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 % dari nilai bobotnya, atau capaiannya sebesar :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times \text{Bobot}$$

$$= \frac{\text{Rp.567.887.359}}{\text{Rp.856.392.000}} \times 12,5 \%$$

$$= 8,29\%$$

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar tidak mempunyai anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli 2024 terdapat revisi anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III kegiatan belanja modal belum terlaksana, sehingga usulan penetapan status BMN pengadaan belanja modal tahun 2024 belum terealisasi.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar belum mengusulkan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat karena menunggu hasil penetapan pelimpahan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia.

Dengan demikian, IKU ini terealisasi sebesar 0%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 tidak ada anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli 2024 terdapat revisi anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III kegiatan belanja modal belum terlaksana, sehingga penggunaan BMN hasil

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian belum dilaksanakan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Pada Triwulan III operator modul persediaan telah menginput seluruh transaksi belanja barang persediaan dan telah di kompilasi dengan modul aset tetap sehingga terbentuk satu neraca aset lancar dan aset tetap tingkat satuan kerja. Untuk penyusunan/penyampaian laporan BMN semesteran telah di laksanakan pada akhir periode 30 Juni 2024 sedangkan untuk penyusunan/penyampaian laporan tahunan akan di sampaikan pada akhir periode laporan/triwulan IV.

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan III adalah :

Unsur 1 (8,29%) + Unsur 2 (0%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (0%) + Unsur 5 (0%) = 8,29 %
dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(8,29\%/80\%) \times 100\% = 10,36\%$.

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 10.857.494.000,- (*sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) yang terdiri dari :

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	8.182.000	3.432.000	4.750.000	41,95
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.575.000	11.366.000	1.209.000	90,39
3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	22.759.000	22.749.660	9.340	99,96
4	Layanan Umum	15.645.000	14.711.760	933.240	94,03
5	Layanan dan Informasi	26.093.000	26.089.199	3.801	99,99
6	Layanan Perkantoran	10.641.829.000	8.329.964.030	2.311.864.970	78,28
7	Layanan Manajemen SDM	36.514.000	34.336.935	2.177.065	94,04
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.159.000	74.642.304	5.516.696	93,12
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.270.000	4.262.500	7.500	99,82
10	Layanan Manajemen Keuangan	9.468.000	9.440.000	28.000	99,70
TOTAL		10.857.494.000	8.530.994.388	2.326.499.612	78,57

Adapun beberapa rincian kegiatan yang tingkat penyerapannya sangat minim diantaranya :

- Langganan Surat Kabar/Majalah, nilai Pagu Rp. 18.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.070.000,-
- Pengiriman surat/dokumen barang, nilai pagu Rp.57.048.000,- realisasi sebesar Rp.2.237.196,-
- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2, nilai pagu Rp.4.180.000,- realisasi sebesar Rp.788.000,-
- Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan), nilai pagu Rp.8.000.000,- realisasi sebesar Rp.3.800.000,-

Dengan demikian realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 2.326.499.612,- atau (78,57%).

Jika dibandingkan tahun 2023 dengan pagu total pendukung kegiatan sebesar Rp.42.339.000,-. Dan realisasi anggaran triwulan III tahun 2023 sebesar Rp.21.750.500,- atau (51,37%) terjadi kenaikan realisasi yang sangat signifikan sebesar 27,17% di triwulan yang sama.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 9 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Madya/Pejabat Pembuat Komitmen
4. Pejabat Pengadaan,
5. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,
6. Operator SAKTI Modul Persediaan,
7. Operator SAKTI Modul GLP,
8. Pengelola BMN,
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

Akar Permasalahan

1. Sebanyak 3 unit kendaraan roda 2 belum perpanjangan STNK.
2. Belum terlaksananya kegiatan Belanja Modal senilai Rp. 691.334.000,-.
3. Masih ada anggaran Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan) senilai Rp.4.700.000,- yang terdiri dari Pas Kendaraan Rp.1.400.000,- dan Pas Orang Rp.3.300.000,-
4. Kurang diberdayakannya Pengelola BMN dan Pengadmintrasi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2, hanya saja beberapa kendaraan tidak sampai pada perbaikan odometer sehingga belum mengajukan

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

eksploitasi bahan bakar secara berkala. Perbaikan odometer sebanyak 2 unit kendaraan belum terealisasi karena penanggungjawab kendaraan belum menyerahkan kendaraannya ke bagian pemeliharaan.

2. Telah mengupdate penanggungjawab kendaraan dinas sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.24/BBKIPM.MKS/KKP.440/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. (terlampir).
3. Mengikuti FGD Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal KKP secara luring dan daring pada tanggal 29 Juli 2024.

Mengikuti kegiatan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 yang di laksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP tanggal 17 – 20 September 2024 di Bandung secara daring.

Rekomendasi Rencana Aksi

1. Segera melaksanakan perpanjangan STNK 3 unit kendaraan roda 2.
2. PPK dan Pejabat Pengadaan segera melaksanakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin.
3. Merevisi akun anggaran Pas Bandara ke kegiatan lain.
4. Memberdayakan Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024



Pemeliharaan Kendaraan Roda 4

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Balai Besar KIPM Makassar Triwulan III Tahun 2024 dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain :

Secara umum rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Besar KIPM 110,12 (kategori Istimewa). Dari 15 (lima belas) IKU ada 9 (sembilan) IKU yang melebihi target yang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Rasio Eksport ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan (%)	99	100
2.	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)	4	4
3.	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI (produk)	113	123
4.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar KIPM Makassar (indeks)	84	93,05
5.	Unit kerja yang menerapkan sistem pengendalian (Official control) lingkup Otoritas Kompeten (Unit)	1	1
6.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)	81	89,16
7.	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	100	100
8.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)	80	100
9	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Nilai)	93,76	97,55

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil Evaluasi kinerja Balai Besar KIPM Makassar pada Triwulan III Tahun 2024, sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti, sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi SPDI yang merupakan pengganti sertifikasi CPIB supplier (IKU 1)
2. Menyampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota tentang Hasil Penilaian Sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene Pengawasan Mutu Domestik Pada Pasar Tradisional yang nilainya Cukup dan Kurang (IKU 2)
3. Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi awal dengan pihak UPI untuk mengantisipasi keterlambatan pengurusan SKP.(IKU 4)
4. Untuk memaksimalkan pelayanan HC Ekspor mampu beradaptasi dengan sistem aplikasi baru yaitu SIAP MUTU, maka BPPMHKP Makassar perlu memastikan kesiapan petugas dan prasarana dengan sistem informasi yang baru.IKU5
5. Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan (IKU7)
6. Melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian UPT Asal Terkait nilai IP ASN pegawai yang masih rendah dan melakukan sharing sessuib kepegawaian pada rapat bulanan.
7. Melakukan *Refreshment* regulasi pengelolaan anggaran untuk penyelesaian temua BPK Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (IKU10)
8. Melaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW IV 2024. (IKU 13)
9. Memberdayakan Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

3. TINDAKLANJUT

Adapun rekomendasi pada triwulan II tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti pada triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Rekomendasi : Memastikan akurasi pada verifikasi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam penerbitan sertifikat ekspor mutu (HC)

Tindaklanjuti : Telah dilaksanakan sharing session hasil magang kompetensi di BUSPM oleh 3 (tiga) analis laboratorium pada tanggal 18 September 2024 terkait parameter pengujian organoleptic, logam berat dan mikrobiologi. Kegiatan sharing session ini merupakan salah satu upaya evaluasi pemahaman yang diperoleh peserta magang sekaligus peningkatan kompetensi bagi pegawai lainnya yang menjadi peserta sharing session. Analis yang telah mengikuti magang dapat menyampaikan materi dan merespon dengan baik semua pertanyaan yang diajukan peserta *sharing session*.
2. Rekomendasi : kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada triwulan III 2024 sesuai dengan program pelaksanaan kegiatan.

Tindaklanjuti : Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan III tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang.
3. Rekomendasi : Penyerahan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran (Traceability) Hasil Perikanan kepada sebanyak 15 UPI

Tindaklanjuti : Penyerahan Surat Keterangan Penerapan Traceability kepada 15 pelaku usaha pada tanggal 15 Juli 2024.

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

4. Rekomendasi : Memastikan dalam pelayanan HC Ekspor setiap selesai melakukan pengurusan HC untuk meng-screenshot hasil pengisian SKM nya.

Tindaklanjut : Telah dilakukan monitoring dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan HC Ekspor sehingga jumlah responden meningkat lebih dari tiga kali lipat. Pada Triwulan II, jumlah responden hanya sebanyak 207 dan di Triwulan III ini telah meningkat menjadi 674 responden. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran tim pelaksana surveilan dan inspeksi HACCP dalam memberikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

5. Rekomendasi : Melakukan koordinasi atau konsultasi ke penanggungjawab kegiatan QA Pusat Standardisasi Sistem dan Kepatuhan terkait pelaksanaan kegiatan Verifikasi Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Tindaklanjut : Tanggal 20 Agustus 2024 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tentang inisiasi penyusunan perjanjian kerjasama antara BPPMHKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan se Indonesia pada kesempatan tersebut di bahas poin - poin kerjasama tentang pelaksanaan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan (existing) oleh DKP provinsi Sulsel dan Balai Baesar KIPM Makassar serta meminta masukkan kegiatan sinergitas pusat dan daerah.

6. Rekomendasi : Menyampaikan kepada pegawai yang nilai IP ASN kategori sedang untuk mengikuti seminar pengembangan kompetensi dan melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id; dan Melakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada myasn.bkn.go.id;
Tindaklanjut : Telah disampaikan kepada pegawai untuk mengikuti seminar pengembangan kompetensi serta melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id; dan Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada myasn.bkn.go.id;

LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

7. Rekomendasi : Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU maka akan dilakukan penginputan perubahan target pada aplikasi Kinerjaku
Tindaklanjut : Telah Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU pada indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan /atau pengolahan Ikan menerapkan sistem traceability

8. Rekomendasi : Meningkatkan realisasi dan kualitas belanja layanan pemantauan dan evaluasi untuk mendukung pencapaian target kinerja; (2) Memastikan kecermatan verifikasi keuangan dengan penggunaan lembar ceklist verifikasi bukti tagihan belanja yang dilakukan oleh verifikator keuangan dan PPK.
Tindaklanjut : (1) Telah direalisasikan anggaran kegiatan pemantauan dan evaluasi sebesar 99,82% sampai dengan triwulan III tahun 2024;(2) Melakukan verifikasi secara berjenjang pada dokumen tagihan pembayaran belanja mulai dari PPABP, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM;

9. Rekomendasi : Melakukan konsultasi terkait proses bisnis Monev Keuangan dan cara perhitungannya.
Tindaklanjut : Operator telah melakukan konsultasi terkait proses bisnis Monev Kementerian Keuangan pada layanan SAPA ANGGARAN.

10. Rekomendasi : Segera melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2 berupa perbaikan odometer dan pengajuan eksploitasi bahan bakar secara berkala dengan melampirkan rekapitulasi pemakaian bahan bakar. 2. Mengupdate kembali SK Penanggungjawab Kendaraan Dinas.
Tindaklanjut : (1) Telah melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2, hanya saja beberapa kendaraan tidak sampai pada perbaikan odometer sehingga belum mengajukan eksploitasi bahan bakar secara berkala. Perbaikan odometer sebanyak 2 unit kendaraan belum terealisasi karena penanggungjawab kendaraan belum menyerahkan kendaraannya ke bagian pemeliharaan, (2) Telah mengupdate

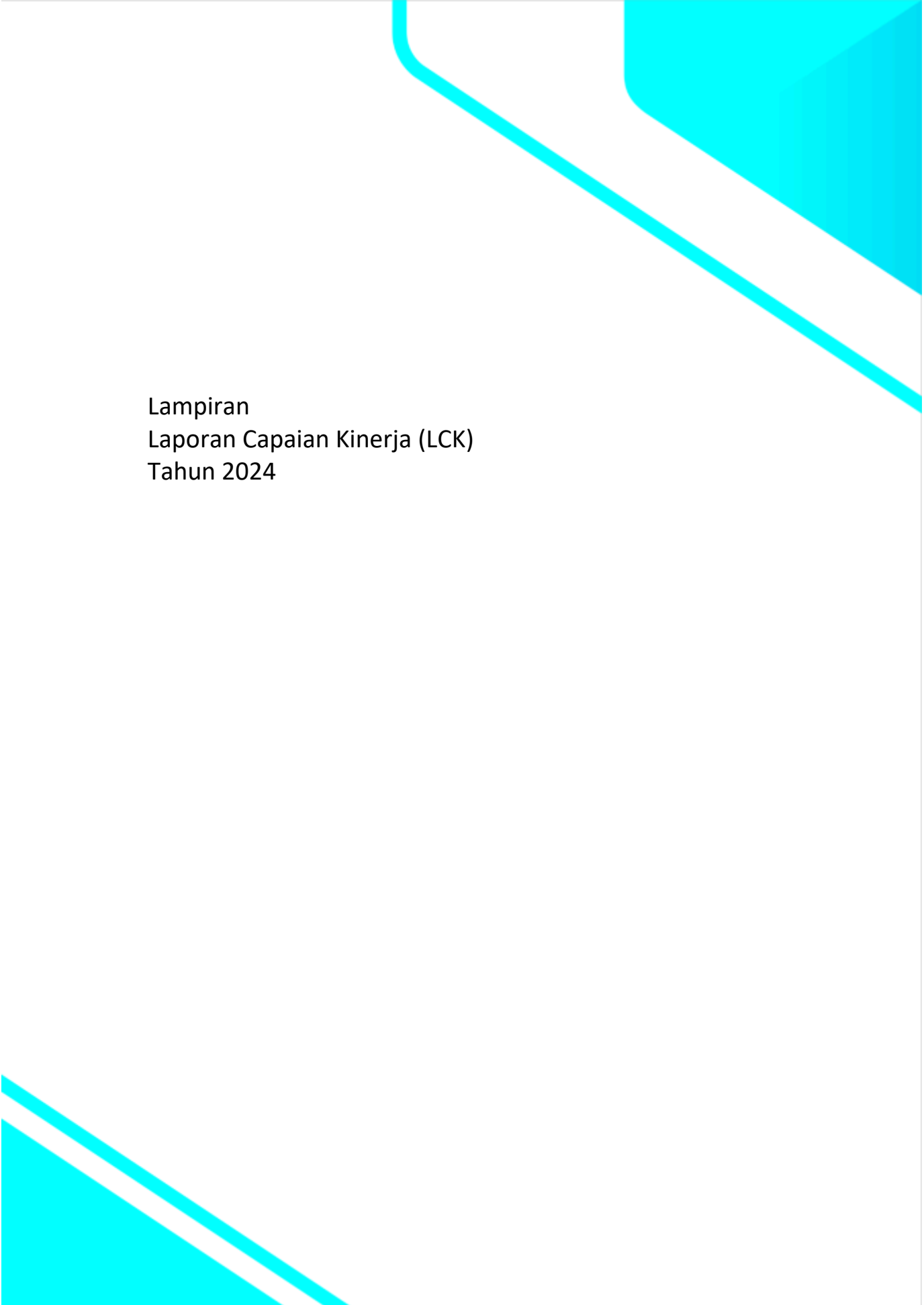


LAPORAN KINERJA

BALAI BESAR KIPM MAKASSAR

TAHUN 2024

penanggungjawab kendaraan dinas sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.24/BBKIPM.MKS/KKP.440/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. (terlampir).



Lampiran
Laporan Capaian Kinerja (LCK)
Tahun 2024

**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 1	:	Rasio Ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	99	99	99	99	99	99	99		99
Realisasi	100	100	100	100					
% Capaian	101%	101%	101%	101%					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<ul style="list-style-type: none"> Implementasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan yang dipersyaratkan oleh negara importir, harus dipenuhi oleh seluruh negara yang mengekspor produk perikananannya, secara nyata tercermin pada sertifikat kesehatan yang menyertai setiap produk yang diekspor, sehingga sertifikat kesehatan ikan merupakan dokumen negara sebagai jaminan yang otentik; Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dengan salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Atas dasar hasil pengendalian tersebut, Balai Besar KIPM Makassar memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan terhadap ikan dan produk perikanan yang akan di lalulintaskan ekspor. Triwulan III 2024 didapatkan total volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 54,84 ton senilai Rp. 3,72 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.617 sertifikat, sedang pada Triwulan II 2024 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 24,44 ton senilai Rp. 1,4 T dengan jumlah sertifikat ekspor (HC) yang diterbitkan sebanyak 2.156 sertifikat. Dari nilai tersebut terlihat bahwa terdapat selisih jumlah sertifikasi ekspor atau mengalami kenaikan sebanyak 21,4 % Adapun pada Triwulan III 2023 tercatat volume ekspor komoditi perikanan dari Sulawesi Selatan sebanyak 59,92 ton senilai Rp. 2,02 T dengan jumlah sertifikat ekspor (KI-D1) yang diterbitkan sebanyak 2.596 sertifikat. Apabila dibandingkan persentase jumlah sertifikasi ekspor antara Triwulan III Tahun 2023 dan Triwulan III 2024 didapatkan selisih atau kenaikan sebesar 0,81 % Indikator Kinerja efektifitas ekspor dihitung berdasarkan rasio kegiatan pengiriman ikan dan hasil perikanan ke luar Wilayah RI telah memenuhi persyaratan Kesehatan dan mutu keamanan hasil perikanan dan tidak ada penolakan oleh negara tujuan ekspor. Hal ini dibuktikan diterimanya sertifikat mutu (HC) di negara tujuan ekspor dan tidak ada notifikasi penolakan dari negara tujuan, dan pada Triwulan III 2024 tidak ada terjadi kasus penolakan produk perikanan; Perhitungan rasio berdasarkan Manual Indikator Kinerja Tahun 2024 yaitu : $X = \frac{A + B}{2}$ <p>dimana :</p> <p>A : <u>Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat kesehatan - penolakan oleh negara tujuan</u> x 100% Jumlah HC karantina ekspor yang terbit</p> <p>Komponen A tidak dapat dilakukan perhitungan dikarenakan bahwa sejak awal Tahun 2024, terjadi perubahan organisasi, Dimana sertifikat Kesehatan ikan bukan lagi menjadi bagian tugas dari BPPMHKP Makassar, dan</p>

B : Jumlah HC ekspor (KI-D1) yang memenuhi syarat mutu - penolakan oleh negara tujuan x 100%
 Jumlah HC mutu ekspor yang terbit

$$: \frac{2.617 - 0}{2.617} \times 100\% = 100\%$$

Dengan demikian realisasi IKU ini adalah 100%

- Jika dilihat dari aspek keberterimaan di negara tujuan, dari Triwulan I hingga Triwulan III didapatkan realisasi sama yaitu 100 % dikarenakan tidak adanya kasus penolakan oleh negara tujuan;
- Kegiatan ekspor ini melibatkan seluruh pejabat fungsional inspektur mutu dengan total sebanyak 16 orang dan didukung oleh tenaga PPNPM sebanyak 24 orang yang penempatannya meliputi kegiatan pengujian laboratorium, pengendalian dan pengawasan mutu, dan pelayanan sertifikasi mutu hasil perikanan.

Kegiatan pendukung :

No	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran Awal	Pagu Anggaran Setelah Revisi	Realisasi Anggaran s/d TW III 2024	Persentase Realisasi	Realisasi Anggaran TW II 2024	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
1	3989.ADF.001.051.a. Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan	Rp. 25.925.000,-	Rp. 25.925.000,-	Rp. 16.987.000,-	65,52 %	Rp. 16.127.000,-	43,11 %	Rp. 8.938.000,-
2	3989.ADF.001.051.b. Bimbingan Teknis CPIB Supplier	Rp. 6.575.000,-	Rp. 6.575.000,-	0	0	0	0	Rp. 6.575.000,-
3	3989.ADF.001.051.c. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000,-	Rp. 5.501.000,-	73,35 %	Rp. 4.641.000,-	48,41 %	Rp. 1.999.000,-
4	3989.BIA.001 Produk perikanan yang diawasi dan diselesaikan kasus mutu ekspor impor nya	Rp. 20.000.000,-	Rp. 17.000.000,-	Rp. 12.575.000,-	73,97 %	Rp. 1.675.000,-	4,92%	Rp. 4.425.000,-
	TOTAL	Rp. 60.000.000,-	Rp. 57.000.000,-	Rp. 35.063.000,-	61,5 %	Rp. 22.443.000,-	37 %	Rp. 21.937.000,-

Target Sertifikasi CPIB pada supplier produk perikanan pada TW II 2024 sudah terpenuhi sehingga pada Triwulan III 2024 anggaran dialokasikan untuk kegiatan SJMHKP lainnya dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 16.987.000,- atau sebesar 65,52% dan sisa anggaran sebesar Rp. 8.938.000,-. Untuk Bimtek CPIB pada supplier belum dilaksanakan karena menunggu arahan pelaksanaan jadwal dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer.

Anggaran kegiatan monitoring dan evaluasi pemanfaatan nomor registrasi UPI ke negara mitra pada Triwulan III 2024 telah dialihkan untuk kegiatan pengendalian mutu lainnya, yaitu ke kegiatan monitoring dan evaluasi UPI, dan telah terealisasi sebanyak Rp. 5.501.000,- dengan persentase realisasi sebesar 73,35 % dengan sisa anggaran Rp. 1.999.000,-

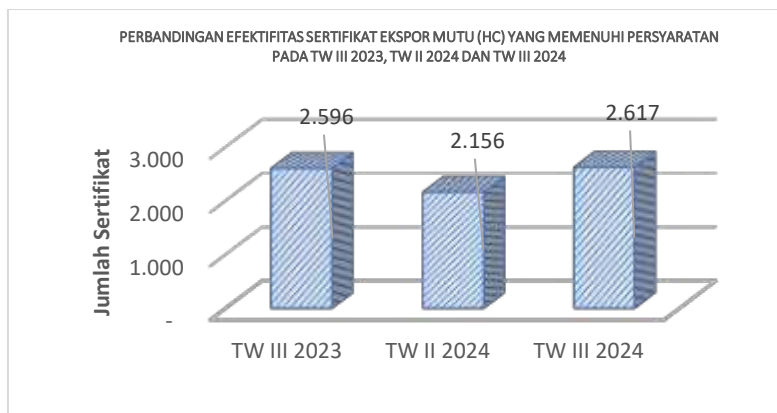
Anggaran kegiatan investigasi kasus mutu ekspor impor pada Triwulan III 2024 dialihkan ke kegiatan surveilan HACCP dan konsumsi rapat, didapatkan realisasi sebesar Rp. 12.575.000,- atau 73,97 % dengan sisa anggaran sebesar Rp. 4.425.000,-

Dengan demikian total realisasi anggaran hingga Triwulan IV 2024 sebesar Rp. 35.063.000,- atau 61,5 %

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
<ul style="list-style-type: none"> - Penyerapan anggaran belum optimal yaitu sampai Triwulan III 2024 realisasi anggaran sebesar 61,5 %, masih berada di bawah target sebesar 75%

Tindakan yang telah dilaksanakan
<ul style="list-style-type: none"> - Untuk mendapatkan realisasi anggaran sesuai target maka sisa anggaran dialokasikan ke kegiatan SJMHKP lainnya. - Pada tanggal 12 Agustus 2024, BPPMHKP Makassar menghadiri dan menjadi narasumber pada kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bagi Nelayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia. YKL Indonesia adalah salah satu organisasi non pemerintah yang gerakannya berorientasi pada tiga aspek yaitu (1) Konservasi Ekosistem Pesisir dan Laut; (2) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Kepulauan Kecil; dan (3) Penerapan Teknologi Alternatif Ramah Lingkungan. Kegiatan ini diikuti oleh 20 orang peserta yang merupakan nelayan penangkap gurita dan pengepul yang berada di Pulau Langkai dan Pulau Lanjukang kota Makassar. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari di Hotel Aston Makassar. Pada kesempatan tersebut, BPPMHKP Makassar yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan menyampaikan konsep kemunduran mutu, sanitasi hygiene, persyaratan dan prosedur sertifikasi CPIB di kapal dan di unit supplier; - Telah dilaksanakan sharing session hasil magang kompetensi di BUSPM oleh 3 (tiga) analis laboratorium pada tanggal 18 September 2024 terkait parameter pengujian organoleptic, logam berat dan mikrobiologi. Kegiatan sharing session ini merupakan salah satu upaya evaluasi pemahaman yang diperoleh peserta magang sekaligus peningkatan kompetensi bagi pegawai lainnya yang menjadi peserta sharing session. Analis yang telah mengikuti magang dapat menyampaikan materi dan merespon dengan baik semua pertanyaan yang diajukan peserta sharing session.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Guna percepatan anggaran, pada Triwulan IV 2024 akan dilaksanakan : <ul style="list-style-type: none"> - Mengkomunikasikan kegiatan BIMTEK CPIB supplier pada Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer; - Melaksanakan kegiatan sertifikasi SPDI yang merupakan pengganti sertifikasi CPIB supplier 	Ka. Timja Pengendalian Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan	Triwulan IV 2024



DOKUMENTASI KEGIATAN

1. Kegiatan Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) Bagi Nelayan yang diselenggarakan oleh Yayasan Konservasi Laut (YKL) Indonesia pada tanggal 12 Agustus 2024



2. Kegiatan Sharing Session Hasil Magang Kompetensi di BUSPM pada tanggal 18 September 2024



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
Nama IKU 2	:	Penjaminan Mutu hasil perikanan di wilayah RI (lokasi)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	1	3	4	2	2	4	4		4
Realisasi	2	2	4	3					
% Capaian	200	66.7	100	150					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Tw 1, Tw 2, Tw 3 dan Tw 4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat berkewajiban untuk meningkatkan dan memperluas pelaksanaan gerakan memasyarakatkan makan ikan pada masyarakat dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan. Untuk Langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dimaksud antara lain melalui optimalisasi ketersediaan ikan sehat dan aman konsumsi sebagai pangan sehat, penguatan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pengendalian mutu di pasar/sentra produksi ikan sehat; penyediaan sentra kuliner berbasis ikan sehat dan pengendalian ikan sehat dan aman untuk dikonsumsi. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota.</p> <p>Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa setiap hasil tangkapan yang masuk ke sentra penyedia pangan sehat seperti pasar tradisional dan pasar modern telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan melalui pengujian mutu di laboratorium dan penyiapan sertifikasi mutu untuk menjaga kredibilitas produk perikanan. Selain itu, dalam mendukung program prioritas kedua KKP, BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sentra penyedia pangan sehat.</p> <p>Pada tahun 2024, Balai Besar KIPM Makassar menjadi salah satu unit kerja yang diberikan target sebanyak 4 lokasi yaitu kota Makassar, kabupaten Gowa, kabupaten Takalar dan kabupaten Pinrang. Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik dilaksanakan sebanyak 2 kali dalam setahun yaitu setiap semester. Adapun lokasi pengawasan meliputi sentra penyedia pangan sehat yaitu pasar tradisional, pasar modern dan pelabuhan pendaratan ikan.</p> <p>Pada triwulan III tahun 2024 target pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada 2 lokasi kabupaten yaitu Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Gowa, namun ditambahkan Kabupaten Pinrang dengan pertimbangan dirangkaikan dengan kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tahun 2024 di Kabupaten Pinrang. Adapun 3 lokasi pengawasan dengan jumlah 6 lokus :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Minasa Maupa dan Pasar Balang-Balang. 2. Kabupaten Takalar sebanyak 2 lokus yaitu PPI Beba dan Pasar Sentral Takalar. 3. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 lokus yaitu Pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya <p>Adapun agenda kegiatan yang dilakukan pada saat pengawasan mutu hasil perikanan domestik (lokasi) Triwulan III tahun 2024 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan ke kepala UPTD Pasar Tradisional, PPI/TPI. 2. Melakukan kunjungan ke lokasi pasar tradisional dan PPI/TPI serta mengisi checklist Pengamatan Kondisi sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene. 3. Pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian di laboratorium.

Berdasarkan hasil penilaian sarana prasarana dan sanitasi hygiene pasar/TPI/PPI yang menjadi lokus pengawasan mutu hasil kelautan perikanan triwulan III tahun 2024:

1. Kabupaten Gowa sebanyak 2 lokus:
 - a. Pasar Minasa Maupa dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Balang-Balang dengan Kriteria Cukup
2. Kabupaten Pinrang sebanyak 2 lokus:
 - a. Pasar Sentral Pinrang dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Kampung Jaya dengan kriteria Cukup
3. Kabupaten Takalar
 - a. TPI Beba Takalar dengan kriteria Baik
 - b. Pasar Sentral Takalar dengan kriteria Kurang

Rangkaian kegiatan terdapat pengambilan sampel yang dilakukan di 6 lokus, masing-masing lokus terdapat 5 sampel, terdapat jenis ikan demersal, pelagic, cephalopod, crustacea dan ikan hasil budidaya dan telah dilakukan pengujian dilaboratorium Balai Besar KIPM Makassar dengan target pengujian Organoleptik, ALT, *Echerichia coli*, *Coliform*, *Salmonella spp*, Formalin dan histamin. Dari hasil pengujian laboratorium yang dilakukan terhadap sampel uji menunjukkan hasil negatif atau sesuai dengan persyaratan mutu.

Indikator kinerja ini didukung oleh beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

1. Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya
2. Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan
3. Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tabel 1. Kegiatan Utama dan Pendukung Indikator Kinerja

No.	Kegiatan Utama dan Pendukung	Anggaran TH. 2024	Realisasi Tw III TH. 2024	(%)	Sisa Anggaran
1	Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Domestik (Utama)	60.000.000	45.382.086	75.64	14.617.914
2	Monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya (Pendukung)	80.000.000	38.397.969	48.00	41.602.031
3	Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan (Pendukung)	13.070.000	13.070.000	100	0
4	Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Pendukung)	288.656.000	274.874.925	95.23	13.781.075
Jumlah		441,726,000	371,724,980	84.15	70,001,020

Pagu anggaran untuk kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 83.240.000, terjadi revisi anggaran pada triwulan III menjadi sebesar Rp. 60.000.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi kegiatan pengawasan mutu domestik pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp. 36.992.086 atau 44,44%, maka pada triwulan III tahun 2024 terjadi peningkatan realisasi sebesar 31.2%.

Untuk kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya jika dibandingkan dengan triwulan II tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 9.516.000 atau 11,07%, maka terjadi peningkatan pada triwulan III sebesar 36,93%. Lokasi kegiatan monitoring Kesegaran Ikan, Residu dan Bahan Berbahaya di triwulan III adalah PPI Beba Takalar. Jenis sampel uji yang diambil adalah ikan barakuda, baronang, kanekke, katamba dan kerapu. Adapun pengujian parameter uji ciguatoksin dilakukan pengujian di Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BUSPM) dan untuk pengujian logam berat (Pb, Cd, Hg) dilakukan pengujian di laboratorium Balai Besar KIPM Makassar.

Untuk kegiatan Verifikasi Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Pemasukan Hasil Perikanan terealisasi sebesar 100% untuk uang harian pengawasan impor dan transportasi pengawasan.

Realisasi kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 274.874.925 atau 95.23% pada lokasi Kabupaten Bone dan Kabupaten Pinrang. Bulan Mutu Kelautan dan Perikanan merupakan

kolaborasi kegiatan antara BPPMHKP Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Komisi IV DPR RI sebagai mitra kerja. Kegiatan Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu sasaran Reformasi Birokrasi Tematik yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan indikator jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang mengikuti peningkatan pemahaman melalui Bulan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Pada kegiatan Bulan Mutu, juga dilakukan edukasi dan penyadartahuan tentang ikan sehat bermutu kepada masyarakat penerima bantuan.

Jumlah SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama Triwulan III tahun 2024 adalah 22 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Dinas Perikanan Kabupaten, Masyarakat Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Kondisi sarana dan prasarana serta pemahaman pelaku usaha untuk menjaga mutu ikan agar tetap aman dikonsumsi khususnya di pasar tradisional dan PPI/TPI masih kurang hal ini ditemukan secara berulang-ulang dan belum mendapatkan perhatian yang memadai.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Tindakan yang telah dilaksanakan di triwulan III tahun 2024 yaitu membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik di 3 lokasi yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Pinrang.
2. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar terhadap pasar Terong, Pasar Sentral dan Pasar Pa' Baeng-Baeng yang nilainya CUKUP, pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1909/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
3. Pemberitahuan hasil penilaian sarana dan prasarana pengawasan mutu domestik kepada dinas perikanan Kabupaten Pinrang terhadap pasar Sentral Pinrang dan Pasar Kampung Jaya yang nilainya CUKUP pada bulan Agustus 2024 dengan nomor surat B. 1910/BBKIPM.MKS/TU.140/VIII/2024.
4. Mengikuti Kegiatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik Pada tanggal 3 - 5 Juli 2024 bertempat di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1. Melakukan kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik pada triwulan IV 2024 sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan.	Katimja Pengawasan Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4
2. Menyampaikan kepada Dinas Kabupaten/Kota tentang Hasil Penilaian Sarana Prasarana dan Sanitasi Higiene Pengawasan Mutu Domestik Pada Pasar Tradisional yang nilainya Cukup dan Kurang.		

Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan III Tahun 2024 di Kabupaten Gowa





Dokumentasi Kegiatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Domestik Triwulan III Tahun 2024 di Kabupaten Pinrang



Edukasi dan penyadartahuan tentang ikan sehat bermutu kepada masyarakat di Kabupaten Pinrang.



Mengikuti kegiatan peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan Mutu Domestik



Kegiatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestic di Kabupaten Takalar



Rangkaian kegiatan pengujian di laboratorium
Balai Besar KIPM Makassar



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif
Nama IKU 3	:	Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

T/R	TAHUN 2023							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	15	4	19	4	2		23	-	23
Realisasi	15	4	19	2					
% Capaian	100	100		50					

Catatan :

Q1, Q2, Q3, Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Triwulan2, Triwulan3 dan Triwulan4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)											
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sistem traceability merupakan bagian penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor komoditi perikanan. Sistem traceability ditujukan untuk mengendalikan produk apabila terjadi insiden keamanan pangan atau produk yang bermasalah akan ditelusuri; ➤ Realisasi kegiatan verifikasi traceability sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebanyak 21 Unit Pengolahan Ikan (UPI) dari target 60 UPI sehingga capaiannya sebesar 35%. Adapun lokus UPI/UPRL yang telah dilakukan verifikasi traceability disajikan pada tabel berikut. 									
		<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Nama UPI</th> <th style="width: 60%;">Alamat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>PT. Trans Anugrah Mulia</td> <td>Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>CV. Sumber Bahari Mandiri</td> <td>Jl. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nama UPI	Alamat	1.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia	2.	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia
No	Nama UPI	Alamat									
1.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Bussines Park Blok U3 B, Kel. Temmapaduae, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi – Indonesia									
2.	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38, Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi – Indonesia									
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pada tahun 2024 target pelaksanaan verifikasi traceability adalah sebanyak 60 UPI, dan terjadi perubahan target pada triwulan II menjadi 23 UPI dan pada periode triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan sebanyak 2 UPI dari yang ditargetkan 4 UPI, sehingga tingkat capaiannya 50%. Tidak tercapainya target tersebut karena menyesuaikan dengan program pelaksanaan traceability yang telah ditetapkan oleh Pusat Pengendalian Mutu dengan No. 1943/BPPMHKP.3/TU.140/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 Perihal Penyampaian Revisi Target Kegiatan Traceability tahun 2024. Pada lampiran II, dinyatakan bahwa 2 (dua) UPI yang belum terealisasi tersebut akan direalisasikan pada bulan Oktober 2024. ➤ Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024, maka pada realisasi triwulan III tahun 2024 terjadi penurunan sebanyak 50% dari 4 (empat) UPI menjadi 2 (dua) UPI. ➤ Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2024 maka pada triwulan III tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 75% dari 8 (delapan) UPI menjadi 2 (dua) UPI 									

- Berdasarkan laporan hasil pelaksanaan verifikasi traceability, ke 2 (dua) UPI tersebut dinyatakan telah mampu telusur terhadap produk yang dihasilkan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyimpanan produk akhir, namun masih memerlukan perbaikan terutama pada pelaksanaan simulasi penarikan produk (mock recall), penetapan personil khusus dan pengarsipan dokumen traceability.
- Sebagai bukti penerapan traceability maka Kepala Pusat Pengendalian Mutu BPPMHKP menerbitkan Surat Keterangan Penerapan Sistem Ketertelusuran (*Traceability*) Hasil Perikanan dan akan diserahkan kepada pihak UPI/UPRL yang bersangkutan;
- Untuk menunjang keberhasilan kegiatan verifikasi traceability, didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 4 orang yang merupakan fungsional Inspektur Mutu pada Balai Besar KIPM Makassar;
- Kegiatan Traceability di dukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 48.000.000,- yang mengalami revisi dari pagu sebelumnya sebesar Rp. 210.060.000,- Adapun sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp. 9.946.000,- atau sebesar 20,72% yang digunakan untuk belanja ATK, Belanja perjalanan biasa dan perjalanan dinas dalam kota.
- Jika dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2024 dengan menggunakan pagu awal sebesar Rp. 210.060.000,- telah direalisasikan 4,18 %, mengalami kenaikan 16,54% pada triwulan III tahun 2024
- Jika dibandingkan realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2023 yang sebesar 36,16%, pada triwulan III tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 15,44%;

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Penyerapan anggaran sampai dengan triwulan III masih sangat rendah (20,72%) yang di sebabkan karena alokasi anggaran yang diterima masih menggunakan perhitungan target awal (60 UPI)

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaporkan Hasil kegiatan verifikasi traceability ke Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen melalui email traceability.2024@gmail.com
- Penyerahan Surat Keterangan Penerapan Traceability kepada 15 pelaku usaha pada tanggal 15 Juli 2024.
- Kegiatan verifikasi traceability telah dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM No. 170/tahun 2019 tentang Penerapan system ketelusuran di Unit Pengolahan Ikan

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
➤ Merevisi anggaran traceability ke kegiatan pengendalian dan pengawasan mutu produksi primer	Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan mutu dan keamanan hasil perikanan	Triwulan IV

Lampiran :

Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Penerapan Sistem Traceability di Unit Pengolahan Ikan

**DOKUMENTASI KEGIATAN VERIFIKASI TRACEABILITY
DI UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) PT. TRANS ANUGRAH MULIA**



SURAT KETERANGAN PENERAPAN TRACEABILITY



DOKUMENTASI PENYERAHAN SURAT KETERANGAN PENERAPAN TRACEABILITY



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 4	:	Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar (Produk)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	55	80	135	113	97	210	345		345
Realisasi	84	107	191	123					
% Capaian	152.73	133.75	141.48	108.84					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI) wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak praproduksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha industri pengolahan ikan yang telah memenuhi dan menerapkan SJKMHP pada setiap UPI. Persyaratan SJKMHP meliputi program persyaratan dasar (PPD), persyaratan sistem HACCP dan persyaratan sistem ketelusuran di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP diberikan berdasarkan jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.</p> <p>Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP merupakan keluaran dari kegiatan penilaian kesesuaian melalui inspeksi penerapan persyaratan SJKMHP dan pemeriksaan tindakan perbaikan terhadap setiap ketidaksesuaian di UPI sesuai dengan ruang lingkup yang di sertifikasi. Inspeksi penerapan PMMT/HACCP dilaksanakan melalui mekanisme inspeksi di tempat (<i>On Site Visit</i>). Hasil inspeksi dievaluasi oleh tim teknis untuk mendapatkan rekomendasi pemenuhan persyaratan SJKMHP yang dilakukan oleh UPI.</p> <p>Pelaksanaan kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan untuk melihat penerapan sistem HACCP yaitu suatu sistem jaminan keamanan pangan yang dirancang untuk meminimalkan risiko bahaya keamanan pangan yang telah diterapkan oleh UPI/UPRL. Output dari kegiatan ini adalah sertifikat HACCP yang dilaksanakan 1 (satu) kali dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun baik untuk UPI baru maupun perpanjangan.</p> <p>Adapun pelaksanaan kegiatan monev dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap UPI yang telah disertifikasi dan diterbitkan Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP pada tahun sebelumnya. Monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan dan penerapan persyaratan khusus atau persyaratan teknis produk dan/atau proses pada Standar Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) / <i>Hazard Analysis and Critical Control Point</i> (HACCP) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021</p>

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan manual IKU BKIPM tahun 2024 bahwa formula IKU diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical Control Point* (PMMT/HACCP). Nilai tersebut merupakan penggabungan dari hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan Sertifikat yang diterbitkan pada tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi. Pengukuran diukur dengan menghitung jumlah ruang lingkup yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP dengan rumus :

$$A = B + C$$

A = Ruang lingkup produk yang disertifikasi PMMT/HACCP

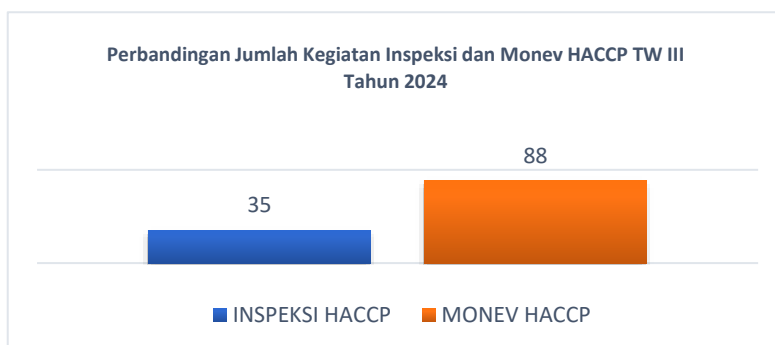
B = Hasil inspeksi pada tahun berjalan

C = Hasil pemeliharaan sertifikat yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monev

$$\begin{aligned} A &= 35 + 88 \\ &= 123 \text{ sertifikat.} \end{aligned}$$

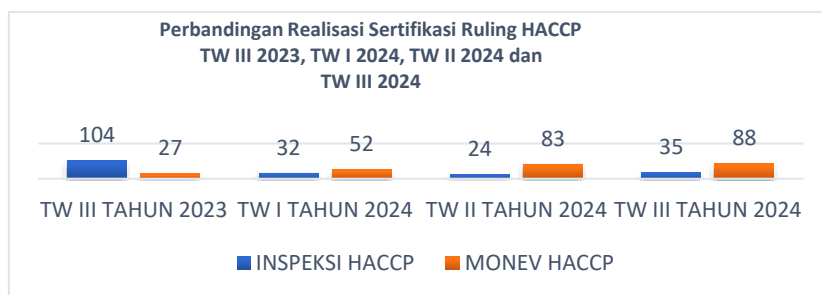
Jumlah sertifikat HACCP yang diterbitkan selama TW III Tahun 2024 adalah sebanyak 123 sertifikat dari target 113 sertifikat ruang lingkup HACCP atau sebesar 108.84%. Jumlah tersebut terdiri dari 35 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan inspeksi PMMT/HACCP dan 88 ruang lingkup sertifikat dari kegiatan monev PMMT/HACCP. Peningkatan capaian kinerja melebihi target sebesar 10 ruang lingkup atau 8.13% disebabkan karena:

1. Adanya permohonan sertifikasi baru
2. Adanya permohonan penambahan ruang lingkup
3. Adanya permohonan perpanjangan sertifikat HACCP



Jika dibandingkan dengan TW II tahun 2024, capaian realisasi jumlah sertifikat ruling HACCP mengalami peningkatan dari 107 sertifikat menjadi 123 sertifikat atau sebesar 13% . Peningkatan ini disebabkan karena adanya permohonan sertifikasi baru dan penambahan ruang lingkup dari Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut.

Jika dibandingkan dengan triwulan III Tahun 2023, capaian realisasi jumlah sertifikat ruling HACCP pada TW III Tahun 2024 mengalami penurunan dari 131 sertifikat menjadi 123 sertifikat atau sebesar 6.1%. Penurunan ini disebabkan karena tahun 2024 bukan tahun perpanjangan sertifikat HACCP.



SDM yang terlibat dalam kegiatan tersebut selama TW III tahun 2024 adalah 16 orang yang terdiri atas Inspektur Mutu dan Calon Inspektur mutu untuk kegiatan monev PMMT/HACCP. Jumlah ini beda dengan TW III Tahun 2023 sebanyak 19 orang. Penurunan ini disebabkan karena ada transformasi organisasi sehingga sebanyak 3 orang mutasi alih tugas ke Badan Karantina Indonesia.

Anggaran kegiatan yang tersedia pada tahun 2024 sebesar Rp. 130.000.000 dan terealisasi sampai dengan TW III sebesar Rp. 98.203.830 atau 75.54 %, yang terdiri atas belanja bahan ATK dan Komputer Suplies Rp. 759.000, belanja perjalanan dinas biasa Rp. 57.473.000, belanja perjalanan dalam kota Rp. 15.340.000, perjalanan dinas biasa pengembangan kompetensi inspektur mutu sebesar Rp. 9.357.350, perjalanan dinas dalam kota pengembangan kompetensi inspektur mutu sebesar Rp. 2.250.000.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 42.801.390 atau 32.92% dari total anggaran Rp.130.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW III 2024 sebesar 42.62%.

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 77.297.500 atau 57.26% dari total anggaran Rp.135.000.000, maka terjadi peningkatan realisasi pada TW III 2024 sebesar 18.28%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Terdapat UPI yang masih terkendala didalam proses perpanjangan sertifikat HACCP karena SKP kadaluarsa.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pelaksanaan kegiatan inspeksi telah mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan dan Keputusan Kepala Badan Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penerbitan Sertifikat PMMT/HACCP.
2. Penanggung jawab kegiatan telah memantau masa berlaku sertifikat HACCP setiap UPI/UPRL melalui aplikasi HACCP Online Sistem dan berkomunikasi secara intensif dengan pihak UPI/UPRL untuk mengantisipasi

keterlambatan permohonan dari pihak UPI/UPRL yang dapat berdampak pada kelancaran ekspor UPI yang bersangkutan.

3. Penanggung jawab kegiatan telah melakukan pemantauan *uploading* dokumen inspeksi di aplikasi HONEST untuk mendukung kelancaran proses penerbitan Sertifikat HACCP sesuai dengan janji layanan.
4. Telah dilaksanakan kegiatan forum konsultasi publik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diikuti oleh pelaku usaha dan stakeholder terkait sebanyak 90 orang secara luring dan daring di hotel Dalton Makassar. Salah satu materi yang disampaikan adalah Sertifikat Kelayakan Pengolahan, regulasi dan sanksi yang disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengembangan dan Pembinaan Layanan Kelayakan Pengolahan, Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP Muhammad Wahidin.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Penanggungjawab kegiatan melakukan komunikasi awal dengan pihak UPI untuk mengantisipasi keterlambatan pengurusan SKP.	Ketua Tim Kerja Pengendalian Kesehatan Ikan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4 Tahun 2024

I. Daftar Ruang Lingkup Sertifikasi HACCP di Triwulan III Tahun 2024

No.	Nama UPI / UPRL	Produk	Grade	Keterangan
1	PT. Aiki Megah Jaya	Fresh Pelagic Fish Frozen Milkfish Frozen Pelagic Fish	B B B	Inspeksi
2	CV. Anugrah Bahari	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Inspeksi
3	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B C	Inspeksi
4	PT. Blue Ocean Resources	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna	B B B	Inspeksi
5	CV. Elitism Makassar	Dried Shark Fin	B	Inspeksi
6	PT. Karisa Timur Indonesia	Dried Fish Maw Dried Fish Skin	B B	Inspeksi
7	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Dried Flying Fish Roe Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Flying Fish Roe Frozen Pelagic Fish	B B B B B	Inspeksi
8	PT. Kenndo Fisheries Indonesia	Frozen Cooked Cephalopods	B	Inspeksi
9	CV. Lintas Samudera Mandiri	Fresh Demersal Fish Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Milkfish	B B B B B	Inspeksi

		Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp Frozen Tuna	B B B	
10	CV. Mitra Alam	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B	Inspeksi
11	CV. Najwa Bahari	Fresh Tuna	B	Inspeksi
12	PT. Perikanan Indonesia (Persero)	Frozen Demersal Fish	B	Inspeksi
13	PT. Piala Laut Indonesia	Frozen Shrimp	B	Inspeksi
14	CV. Sumber Marina Semesta	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	C C	Inspeksi
15	PT. Changleong Maritim Indonesia	Dried Shrimp	B	Monev
16	CV. Simpul Agro Globalindo	Dried Seaweed	B	Monev
17	CV. Maros Timur	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Monev
18	PT. Lontara Jaya Sakti	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B	Monev
19	PT. Asnur Anton Jaya	Dried Seaweed	B	Monev
20	CV. Anugrah Bahari Mnadiri	Frozen Cooked Cephalopods Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Milkfish Frozen Tuna	B B B B B B B	Monev
21	PT. MAA Ataita Indah	Dried Seaweed	B	Monev
22	PT. Rika Rayhan Mandiri	Dried Seaweed	B	Monev
23	PT. Rahmat Bahari Indonesia	Dried Seaweed	B	Monev
24	PT. Dunia Marine Products	Dried Flying Fish Roe Frozen Abalone Frozen Cephalopods Frozen Cooked Abalone Meat Frozen Cooked Cephalopods	B B B B B	Monev
25	CV. Karya Nelayan	Dried Fish Maw Dried Sea Cucumber Dried Shark Fin	B B B	Monev
26	CV. Faris Indo Seaffod	Fresh Tuna	C	Monev
27	PT. Bumi Menara Internusa	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna	B B B	Monev
28	PT. Yin Jing Internasional	Frozen Shrimp	A	Monev
29	PT. Celebes Berkah Niaga	Dried Seaweed	B	Monev
30	PT. Jaya Utama Quality	Dried Sea Cucumber	C	Monev

31	CV. Elitism Makassar	Sea Cucumber Meal Dried Fish Maw Dried Fish Skin Dried Sea Cucumber	B B B B	Monev
32	PT. Jireh Commodity	Dried Flying Fish Roe Frozen Flying Fish Roe	A A	Monev
33	PT. Anugrah Mapan Jaya	Alkali Treated Chips Semi Refined Carrageenan	B B	Monev
34	PT. Multi Monodon Indonesia	Dried Flying Fish Roe Frozen Cephalopods Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp	A A A A	Monev
35	CV. Putra Putri Iskandar	Dried Seaweed	C	Monev
36	PT. Kelola Mina Laut	Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Tuna Fresh Tuna	A A A A	Monev
37	PT. Mitra Kartika Sejati	Frozen Cooked Shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Breaded Shrimp	A A A	Monev
38	PT. Usaha Centraljaya Sakti	Dried Flying Fish Roe Dried Shrimp Fresh Cephalopods Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Shrimp Fresh Tuna Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Milkfish Frozen Pelagic Fish Frozen Shrimp Frozen Slipper Lobster Frozen Tuna	B B B B B B B B B B B B B B	Monev
39	CV. Sumber Bahari Mandiri	Dried Abalone Dried Fish Maw Dried Flying Fish Roe Dried Sea Cucumber Dried Seaweed Dried Shark (Fin, Skin, Bone)	B B B B B B	Monev
40	CV. Najwa Bahari	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish	B B	Monev
41	PT. Mina Maju Sejahtera	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B C C	Monev

42	PT. Sakinah Bahari Indonesia	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh Tuna		Monev
43	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Fresh Cephalopods Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Cephalopods Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish	B B B C C C	Monev

DOKUMENTASI KEGIATAN INSPEKSI PENERAPAN PMMT/HACCP





DOKUMENTASI KEGIATAN MONEV PMMT/HACCP





DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 5	:	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Realisasi	91,60	92,54	92,07	93,05					
% Capaian	109,0	110,2	109,6	110,8					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat : https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14.</p> <p>Dimulai dari triwulan II tahun 2023, e-survey telah terintegrasi untuk seluruh Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu menggunakan Aplikasi SUSAN (SURvey kepuasAN masyarakat) melalui link https://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/14. Materi survey terdiri dari 9 unsur berupa U1. Persyaratan Layanan; U2. Kemudahan Prosedur; U3. Waktu Penyelesaian; U4. Kesesuaian Biaya; U5. Kesesuaian Produk; U6. Kecepatan Respon; U7. Kemudahan Fitur / Kemampuan Petugas; U8. Layanan Konsultasi; U9. Kualitas Isi / Sarana.</p> <p>Aplikasi SUSAN ini membagi survey berdasarkan jenis layanan. Untuk Balai Besar KIPM Makassar survey dilakukan terhadap 4 (empat) jenis layanan sesuai dengan Keputusan Kepala BKIPM nomor 27 Tahun 2023, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan (<i>Health Certificate for Fish and Fishery Products</i>) untuk pengeluaran dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ekspor) 2. Penjaminan kesehatan ikan, mutu, dan keamanan hasil perikanan untuk pemasukan dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Impor) 3. Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/<i>Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)</i> 4. Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air <p>Survey juga dilakukan terhadap setiap pengguna jasa yang menerima layanan dengan jumlah sampel minimal mengacu pada formula Isaac & Michael sebagai berikut:</p>

Formula Isaac & Michael

$$S = \frac{X^2 NP (1-P) + X^2 P (1-P)}{(0.05)^2 \times 47} + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)$$

X^2 = Nilai chi square tabel = 3,841
 dimana df = 1 dan $\alpha = 5\% = 0.05$
 P = Perkiraan proporsi populasi (Jika tidak diketahui maka $P = 0.5$)
 N = Jumlah Populasi
 d = tingkat toleransi kesalahan (0.05)

$S = \frac{3.841 \times 48 \times 0.5 \times 0.5}{(0.05)^2 \times 47} + (3.841 \times 0.5 \times 0.5)$
 $S = 46.092 = 42.766 = 43$

Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)	Populasi (N)	Sampel (n)
10	5	225	143	122	317
15	7	230	144	123	318
20	10	240	149	124	319
25	14	250	157	125	320
30	18	260	165	126	321
35	22	270	173	127	322
40	26	280	181	128	323
45	30	290	189	129	324
50	35	300	197	130	325
55	39	310	205	131	326
60	43	320	213	132	327
65	47	330	221	133	328
70	51	340	229	134	329
75	55	350	237	135	330
80	59	360	245	136	331
85	63	370	253	137	332
90	67	380	261	138	333
95	71	390	269	139	334
100	75	400	277	140	335
110	83	420	293	142	337
120	91	440	309	144	339
130	99	460	325	146	341
140	107	480	341	148	343
150	115	500	357	150	345
160	123	520	373	152	347
170	131	540	389	154	349
180	139	560	405	156	351
190	147	580	421	158	353
200	155	600	437	160	355
210	163	620	453	162	357

Jumlah sertifikat yang terbit pada Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.603 sertifikat, maka berdasarkan tabel diatas jumlah populasi sebanyak 2.800 minimal sampel responden yang diambil adalah sebanyak 338 responden. Hasil survey kepuasan Masyarakat diketahui jumlah responden sebesar 674, hal ini telah memenuhi jumlah minimal responden sesuai dengan formula Isaac dan Michael tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peran Customer Service telah berfungsi dengan baik di Triwulan III ini.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di hitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitung Survei Kepuasan Masyarakat terdapat 9 unsur pelayanan yang di kaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

Bobot Nilai rata-rata tertimbang = $\frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$.

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

IKM = $\frac{\text{Total dari nilai persepsi perunsur} \times \text{Nilai penimbang}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut :

IKM unit pelayanan x 25

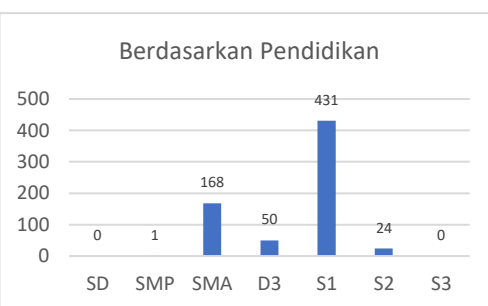
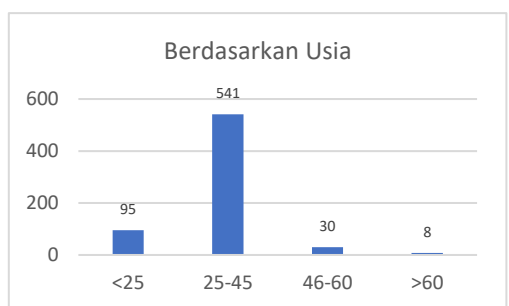
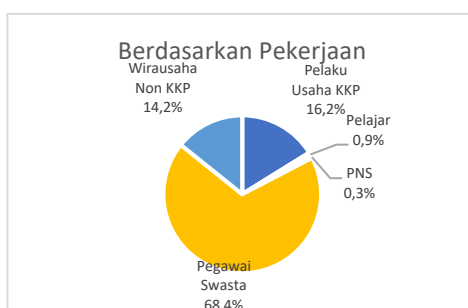
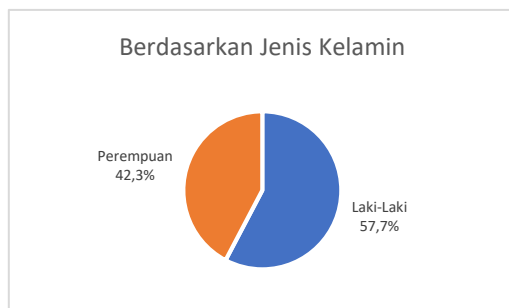
Sebagai amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan MENPANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, maka secara rutin Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat sebanyak 4 kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Balai Besar KIPM Makassar.

Pada triwulan III Tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan survey terhadap 674 responden, dengan nilai Indeks Kepuasan IKM 3,72 atau sebesar 93,05 setelah dikonversi (**Sangat Baik**). Nilai IKM tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau capaian 110,8%. Apabila data Hasil IKM Triwulan III Tahun 2024 dibandingkan dengan TW II Tahun 2024, maka nilai unsur pelayanan dapat dilihat sebagai berikut :

26

NO	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan		Perubahan
		Triwulan II - 2024	Triwulan III - 2024	
1	Kesesuaian persyaratan	3.725	3.734	↑
2	Kemudahan prosedur	3.681	3.709	↑
3	Kesesuaian jangka waktu penyelesaian	3.700	3.706	↑
4	Kesesuaian biaya	3.696	3.739	↑
5	Kesesuaian produk	3.686	3.715	↑
6	Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi	3.691	3.705	↑
7	Kemudahan dalam penggunaan fitur	3.643	3.690	↑
8	Layanan konsultasi dan pengaduan	3.792	3.769	↓
9	Kualitas isi/konten	3.700	3.731	↑
	Nilai IKM	92,54	93,05	

Data Rincian Responden survey IKM Triwulan III Tahun 2024 yaitu :



Jika dilihat nilai perunsur, nilai unsur yang paling rendah adalah unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Berdasarkan Peraturan MenPANRB nomor 14 tahun 2017, rencana tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling buruk hasilnya. Untuk itu perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk unsur kemudahan dalam penggunaan fitur. Dalam pelayanan sertifikasi ekspor, Balai Besar KIPM Makassar menggunakan aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP. Namun dalam pelaksanaannya, aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini kadang mengalami kendala. Walaupun jarang terjadi, namun kendala dalam aplikasi PPK Online dan Aplikasi Sisterkaroline ini dirasakan cukup mengganggu bagi pengguna layanan.

Jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat pada periode yang sama pada tahun 2023, maka nilai IKM pada triwulan III 2024 mengalami peningkatan dari 90,47 menjadi 93,05. Hal ini menunjukkan upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Balai Besar KIPM Makassar memperoleh respon positif dari masyarakat.

Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ini sejalan dengan penghargaan yang diterima oleh Balai Besar KIPM Makassar di Triwulan III Tahun 2024 pada pelayanan publik yang diberikan. Pada tanggal 25 Juli 2024, Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat "INFORMATIF" yang diserahkan langsung oleh Sekjen KKP di Ballroom Gedung Mina Bahari III Lantai 1.

Upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan melaksanakan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diikuti oleh pelaku usaha dan stakeholder sebanyak 90 orang peserta secara luring di hotel Dalton Makassar dan juga secara daring melalui online meeting. Dalam Forum Konsultasi Publik ini disampaikan beberapa kebijakan layanan sehingga dapat menghimpun saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan dan perbaikan layanan menjadi lebih berkualitas.

Alokasi anggaran kegiatan survey kepuasan masyarakat berbasis digital terhadap pelayanan publik Tahun 2024 yaitu Rp. 12.500.000,-. Hingga Triwulan II tahun 2024, anggaran ini belum terealisasi karena masih di blokir oleh Kementerian Keuangan. Pada Triwulan III tahun 2024 ini, anggaran untuk Survei Kepuasan Masyarakat dihilangkan dan dialihkan ke kegiatan yang lebih urgent.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Aplikasi PPK Online dan Sister Karoline yang dikembangkan oleh Sekretariat BPPMHKP dan digunakan dalam pelayanan penerbitan Health Certificate terkadang mengalami kendala dan memperlambat proses pelayanan. Telah direncanakan akan menggunakan sistem baru sesuai dengan tugas dan fungsi baru BPPMHKP yaitu Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Mutu (SIAP Mutu).

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah dilakukan monitoring dalam pengisian Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan HC Ekspor sehingga jumlah responden meningkat lebih dari tiga kali lipat. Pada Triwulan II, jumlah responden hanya sebanyak 207 dan di Triwulan III ini telah meningkat menjadi 674 responden. Peningkatan jumlah responden ini didukung oleh kesadaran tim pelaksana surveilan dan inspeksi HACCP dalam memberikan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memaksimalkan pelayanan HC Ekspor mampu beradaptasi dengan sistem aplikasi baru yaitu SIAP MUTU, maka BPPMHKP Makassar perlu memastikan kesiapan petugas dan prasarana dengan sistem informasi yang baru. 	<p>Ketua Tim Kerja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan</p>	<p>Triwulan IV 2024</p>

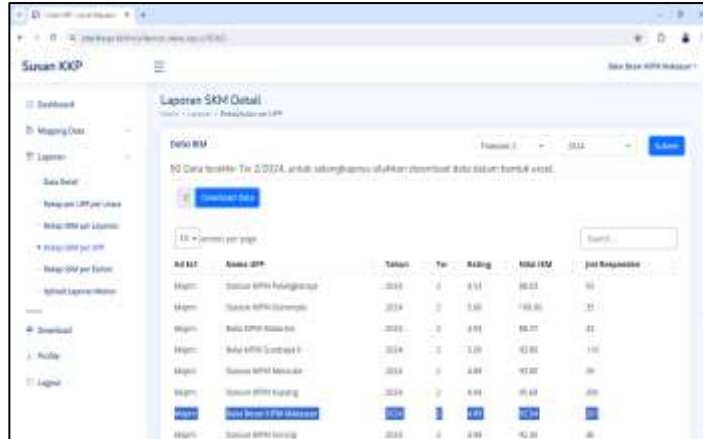
DOKUMENTASI PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TRIWULAN III TAHUN 2024



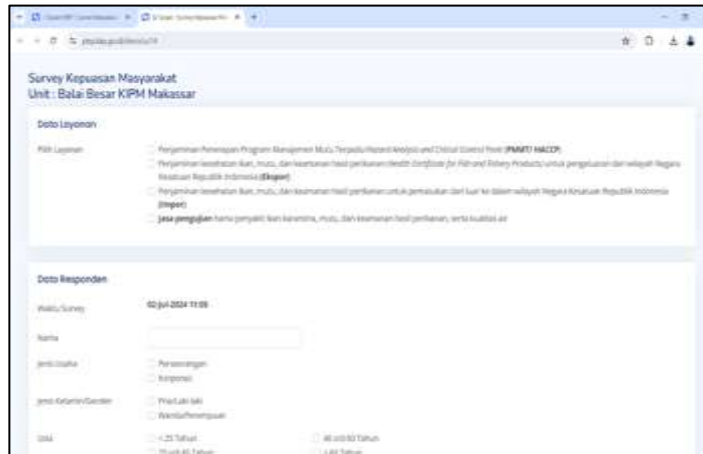
Gambar 1. Infografis Nilai IKM Triwulan III Tahun 2024



Gambar 2. Screenshot Dashboard Aplikasi SUSAN KKP



Gambar 3. Screenshot Aplikasi SUSAN KKP yang memperlihatkan nilai IKM Triwulan III Tahun 2024



Gambar 4. Screenshot tampilan isian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi SUSAN KKP

**DOKUMENTASI MONITORING PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
TRIWULAN III TAHUN 2024**



Monitoring pengisian Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan yang telah selesai menerima layanan penerbitan Health Certificate sehingga dapat meningkatkan jumlah responden pada Survei Kepuasan Masyarakat di Triwulan III Tahun 2024.

DOKUMENTASI PENYERAHAN PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BALLROOM GEDUNG MINA BAHARI III
25 JULI 2024



DOKUMENTASI FORUM KONSULTASI PUBLIK
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
23 AGUSTUS 2024



FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Secara Profesional dan Partisipatif
Nama IKU 6	:	Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian (Official Control) Lingkup Otoritas Kompeten (Unit)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	1	1	1	1	1	1	1	-	1
Realisasi	1	1	1	1	-	-	-	-	
% Capaian	100%	100%	100%	100%					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Keamanan hasil perikanan merupakan persyaratan utama dan terpenting dari seluruh parameter mutu pangan mengingat dewasa ini konsumen semakin menyadari bahwa mutu pangan khususnya keamanan pangan tidak dapat hanya dijamin dengan hasil uji produk akhir dari laboratorium. Produk yang aman didapat dari bahan baku yang ditangani dengan baik, diolah dan didistribusikan dengan baik sehingga akan menghasilkan produk akhir yang memenuhi standar mutu; ▪ Langkah untuk mengantisipasi hal tersebut serta adanya tuntutan dalam pasar bebas, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengembangkan suatu sistem jaminan mutu berdasarkan konsep HACCP yang harus diterapkan oleh pelaku usaha perikanan mulai bahan baku hingga produk akhir. Untuk memastikan bahwa suatu unit pengolahan ikan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan berdasarkan prinsip-prinsip HACCP sesuai persyaratan yang telah ditentukan, maka Otoritas Kompeten melakukan pengendalian melalui kegiatan inspeksi dan surveilan; ▪ Surveilans merupakan kegiatan inspeksi yang harus dilakukan oleh lembaga inspeksi dan sertifikasi untuk memastikan bahwa penerapan HACCP oleh Unit Penanganan dan pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL) berjalan secara konsisten dan efektif; ▪ Tujuan dilaksanakannya surveilan adalah untuk memastikan penerapan GMP-SSOP dan HACCP di Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut berjalan secara konsisten dan efektif yang nantinya menjadi data dukung dalam penyusunan laporan surveilan tahunan. Hasil dari surveilan menjadi dasar bagi lembaga inspeksi dan sertifikasi dalam menerbitkan Sertifikat Kesehatan (<i>Health Certificate</i> /HC) ▪ Output dari pelaksanaan surveilan adalah penerbitan Surat Keterangan Hasil Surveilans (SKHS) yaitu surat keterangan yang diberikan kepada UPI/UPRL yang telah menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara efektif sebagai salah satu persyaratan dalam penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan (SKIPP) Ekspor; ▪ Sehubungan dengan hal tersebut, Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan kegiatan surveilan sebagai bentuk komitmen pengawasan terhadap konsistensi dan efektifitas penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Unit Pengolahan Rumput Laut (UPRL); ▪ Berdasarkan program tahunan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP lingkup Balai Besar KIPM Makassar Tahun 2024 yang telah disusun, pada triwulan III Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL, dari target 95 dapat direalisasikan 83 sehingga tingkat capaiannya adalah sebesar 87,36 %. ▪ Adapun 12,64 % yang tidak terealisasi disebabkan adanya unit pengolahan ikan sebanyak 15 UPI yang tidak melakukan kegiatan proses produksi dan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bermaterai dari pihak UPI yang bersangkutan dan 1 UPI yang tidak terealisasi disebabkan sertifikat HACCPnya expired. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Balai Besar KIPM Makassar telah menerapkan sistem pengendalian (<i>Official Control</i>) pada triwulan III Tahun 2024. ▪ Jika dibandingkan dengan realisasi TW II 2024 terjadi peningkatan capaian pelaksanaan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada UPI/UPRL dari 83 % menjadi 87,36 % atau terjadi peningkatan sebesar 4,36 %

yang disebabkan jumlah target berdasarkan program pada TW III lebih banyak dibandingkan dengan TW II Tahun 2024.

- Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2023;
- Untuk melaksanakan kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 184.440.000,- menjadi 198.370.000,- yang digunakan untuk :
 - (1) Belanja bahan semula sebesar **Rp. 960.000,-**; menjadi **Rp. 2.890.000,-**;
 - (2) Belanja barang persediaan bahan baku semula sebesar **Rp. 47.000.000,-** menjadi **Rp. 59.000.000,-**;
 - (3) Belanja perjalanan dinas biasa sebesar **Rp. 109.180.000,-**
 - (4) Belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar **Rp. 27.300.000,-**
- Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 adalah sebesar **Rp. 163.994.282,-** atau **82,67%**, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa (Rp.)
1	Belanja bahan	2.890.000	885.000	2.005.000
2	Belanja barang persediaan bahan baku	59.000.000	46.818.182	12.181.818
3	Belanja perjalanan dinas biasa	109.180.000	89.050.100	20.129.900
4	Belanja perjalanan dinas dalam kota	27.300.000	27.191.000	109.000
	Jumlah	198.370.000	163.994.282	34.425.718

- Realisasi anggaran untuk TW III adalah sebesar **Rp. 163.994.282. atau 82,67 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 198.370.000,;** jika dibandingkan dengan realisasi anggaran di TW II sebesar **Rp. 124.364.282. atau 67,43 %** dari total anggaran sebesar **Rp. 184.440.000** . Terjadi peningkatan sebesar **15,24 %**;
- Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan surveilan pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 19 orang Inspektur Mutu.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Anggaran untuk pelaksanaan kegiatan surveilan di TW III untuk belanja perjalanan dinas dalam kota sudah tidak tersedia.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melaksanakan kegiatan surveilan penerapan GMP-SSOP dan HACCP pada unit Pengolahan ikan/unit Pengolahan Rumput Laut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021;
- Telah melakukan pelaporan ke Plt. Kepala Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pasca Panen terkait dengan laporan surveilan penerapan GMP/SSOP dan HACCP TW III Tahun 2024 pada tanggal 01 Oktober 2024;
- Telah dilaksanakan pelaporan kegiatan surveilan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Berkas kelengkapan kegiatan surveilan merupakan salah satu persyaratan pada saat pengajuan laporan giat sebelum ditanda tangani pimpinan sehingga sangat membantu dalam proses kelancaran administrasi.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Penyampaian kepada seluruh inspektur mutu dan asisten inspektur mutu tentang alternatif metode pelaksanaan kegiatan surveilan GMP-SSOP dan HACCP pada Unit Pengolahan Ikan/Unit Pengolahan Rumput Laut secara daring/virtual sesuai Keputusan Kepala BKIPM No.32 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Points.	Katimja Pengendalian Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Triwulan IV 2024

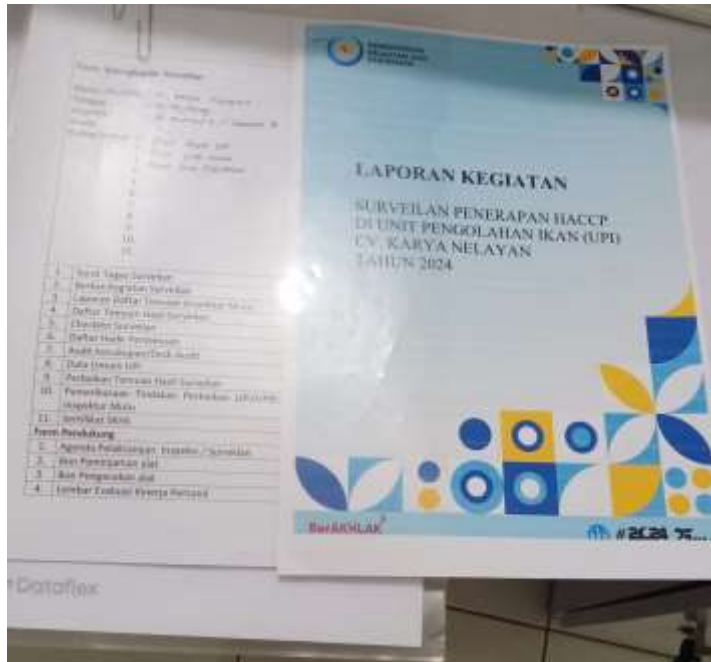
Adapun Rincian Nama-nama Unit Pengolahan Ikan dan Unit Pengolahan Rumput Laut yang telah terealisasi pada Triwulan III 2024 adalah sebagai berikut :

No.	Nama UPI/UPRL	Alamat
1.	PT. Tujuh Samudra Jaya	Jl. Malino Desa Nirannuang, Kec. Bontomarannu, Gowa, South Sulawesi - Indonesia
2.	PT. Rika Rayhan Mandiri	Jl. Kima IV KAV. P-3A, KIMA Makassar, South Sulawesi - Indonesia
3.	PT. Cahaya Cemerlang	Jl. Ir Sutami 22, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
4.	UD. Seaweed Sukses Sejahtera	Jl. Ir. Sutami Blok E3 NO.10, Komp. Pergudangan Parangloe Indah, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
5.	CV. Anugerah Lin Perkasa	Jl. Kima No. 20 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Makassar, South Sulawesi - Indonesi
6.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima Raya ID - 2C Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
7.	PT. Ocean Champ Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Kawasan Industri Makassar, Kec. Biringkanaya, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
8.	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Jl. Jembatan Tua No. 89 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
9.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10 Kav. C - 3A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
10.	PT. Marindo Jaya Maros	Jl. Dr. Ratulangi (Poros Makassar - Pangkep) Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kab. Maros South Sulawesi - Indonesia
11.	CV. Najwa Bahari	Jl. Sabutung Baru III No. 25 Kel. Camba Berua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
12.	PT. South Suco	Jl. KIMA VI Blok G - 4, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
13.	PT. Hasil Indo Sejahtera	Jl. Ir. Sutami, Komplek Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G8, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
14.	CV. Alga Marina Sukses	Jl. Ir. Sutami 107, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
15.	PT. Keumkang Industri Indonesia	Jl. KIMA 15 Kav. R4D-R4E, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
16.	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Jl. Kima 10T - 2B, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
17.	PT. Maa Ataita Indah	Jl. Kapasa Raya No.29 B, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
18.	PT. Asnur Anton Jaya	Jl. Tol Lama Pergudangan Karunia Sulawesi Blok G No. 11, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
19.	CV. Karya Murni	Kampung Parang Dusun Jonggo Batu, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
20.	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima III Kav. 5AB, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
21.	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. KIMA Raya I Kav. D-1B Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
22.	PT. Anugrah Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
23.	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Hombes, Kelurahan Batu Walenrang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, South Sulawesi-Indonesia
24.	PT. Mari Sejahtera Indonesia	Jl. KIMA 4 Gudang 3 Kav. M-1a, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
25.	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima Raya 1 Blok D-2B Kawasan Industri Makassar
26.	PT. Mina Timur Indonesia	Jl. Pendidikan No. 8, Desa Bontolanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
27.	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N-4-B1 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
28.	PT. Rahmat Bahari	Jl. Poros Pattene, Kompleks Pergudangan Pattene Busines Park, Blok H No. 1 Kel. Temmappadaue, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
29.	CV. Lintas Samudera Mandiri	Kompleks PPI Lonrae Kav. 3, Kel. Lonrae, Kec. Tanete Riattang Timur, Kab. Bone, South Sulawesi - Indonesi
30.	PT. Lontara Jaya Sakti	Jl. Pasar Ikan Beba, Desa Tamasaju, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
31.	CV. Faris Indo Seafood	Pattene Business Park Blok K No. 2, Desa Pabentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia

32.	PT. Siriman Jaya Abadi	Palalakkang, Kel. Pa'lalakkang, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
33.	CV. Anugrah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu Runcing No. 99 Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
34.	PT. Kelola Mina Laut	Jl. Kima 17 Blok DD No. 15 - 16 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
35.	PT. Prima Indo Tuna	Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami No.32, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
36.	PT. Celebes Berkah Niaga (Garuda)	Pergudangan Garuda Blok B2, Jl. Lantebung No.42, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
37.	PT. Sakinah Bahari Indonesia	Pusat Distribusi Regional, Jl. KIMA-8, Kelurahan Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
38.	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K-9/Kav.B2 Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
39.	PT. Biota Laut Ganggang	Jl. Kebangkitan No.8, Dusun Belabelawa, Desa Polewali, Kecamatan Suppa, Kab. Pinrang, South Sulawesi - Indonesia
40.	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No.1 Bulu-Bulu, Kelurahan Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
41.	PT. Simpul Agro Globalindo	Patene Business Park Blok C No. 11 Maros, South Sulawesi - Indonesia
42.	CV. Nur Bahari Abadi	Jl. Sultan Abdullah Raya, Kel. Buloa, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
43.	CV. Buana Laut Nusantara	Jl. Kima VI Kav. F.1 B1, Kota Makassar, 90243, South Sulawesi - Indonesia
44.	PT. Elitism Makassar	Jl. Andi Mappainga Ruko 58, Kel. Barombong, Kec. Tamalate, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
45.	PT. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 38 Makassar, South Sulawesi - Indonesia
46.	PT. Tobiko Utama	Jl. Sultan Alauddin No. 47-54, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
47.	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng Batu - Batu, Galesong Utara, Kabupaten Takalar, South Sulawesi Indonesia
48.	PT. Kenndo Fisheries Indonesia	Jl. Tol Lama No. 3 (1 KM dari Ujung Jembatan Tol), Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
49.	CV. Maros Timur Jaya	Jalan Poros Makassar - Maros Dusun Bulu Tanae Desa Marumpa, Kec. Marusu, South Sulawesi - Indonesia
50.	PT. Sukses Raya Food	Jl. Bahagia No. 2 Kel. Sudiang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
51.	CV. Asryl Perkasa	Perumahan Citra Sanggalea Indah, Blok D4 No. 4, Kel. Taroada, Kec. Turikale, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
52.	PT. Aiki Megah Jaya	Jl. Perintis Kemerdekaan Kima 2 No. 3, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
53.	CV. Anugrah Lestari	Kunjung Mae, Jl. Pendidikan Desa Bonto Lanra, Kec. Galesong Utara, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
54.	PT. Inti Mulia Cahaya	Jln. Pelabuhan Paotere Makassar, South Sulawesi - Indonesia
55.	PT. Dwira Masagena	Jl. Kima Raya 1 Kav. B5, Kawasan Industri Makassar, South Sulawesi - Indonesia
56.	PT. Anugrah Cahaya Samudera	Jl. Ir. Sutami Komp. Pergudangan Lantebung Blok A11 No. 9B, Kel. Parang Loe, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
57.	CV. Adi Tirta	Kompleks Pelabuhan Perikanan Untia, Jalan Salodong, Kel. Untia, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
58.	PT. Giwang Citra Laut	Jln. Poros Pabrik Gula Takalar KM.1,5 Desa Parappunganta, Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
59.	CV. Anugrah Bahari	Jl. Sabutung Baru No. 14, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
60.	Kospermindo Koperasi	Jl. Kima 8 Kav. 3A1 Makassar South Sulawesi - Indonesia
61.	PT. Bahari Makmur Sejati	Jl. KIMA 16 Kav BB No. 4 Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
62.	PT. Celebes Berkah Niaga/ Pelita Agro	Pergudangan Pelitagro Blok A No.15, Jl. Ir. Sutami No 24, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
63.	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No. 1 Gudang A Makassar, South Sulawesi - Indonesia
64.	CV. Guna Agung	Jl. Kapasa Raya No 1 Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
65.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Ujungpandang Baru No. 17 Makassar, South Sulawesi - Indonesia

66.	CV. Guna Bahari Indonesia (Patene)	Pergudangan Patene 88 Blok N No.1, Jl. Business Park, Ds.Pabentengan, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
67.	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamelleng No. 42 Km. 147 Bojo Barru Kec. Mallusetasi, Barru, South Sulawesi - Indonesia
68.	PT. Trans Anugrah Mulia	Pattene Business Park Blok U 3B, Maros, South Sulawesi - Indonesia
69.	PT. Blue Ocean Resources	Jl. Kompleks Perhubungan No. 5, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
70.	CV. Adiwandi Hanania Mandiri	Jl. Kapasa Raya No. 1 Gudang Blok 1, Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
71.	CV. Anugerah Jaya Fishery	Jl. Poros Maros, Ruko Graha Cemerlang Blok C No. 10-11, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
72.	PT. Armita Laut Nusantara	Jl. Tarakan Lr 155 No. 14, Kel. Malimongan Tua, Kec. Wajo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
73.	PT. Karya Lautan Jaya Utama	Jl. Lantebung No. 99 Kel. Bira, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
74.	PT. Sumber Gratia Mandiri	Pergudangan Pattene Business Park Blok B No. 8-9, Desa Pa`bentengang, Kec. Marusu, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
75.	PT. Sumber Lautan Nusantara	Jl. Lantebung No. 168, Makassar, South Sulawesi - Indonesia
76.	CV. Karya Nelayan	Ruko Graha Cemerlang Blok E No. 16-17 Poros Makassar- Maros Km 21, Kelurahan Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, South Sulawesi - Indonesia
77.	PT. Perikanan Indonesia (Persero) Cabang Makassar	Jl.Sabutung I No.1, Kelurahan Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
78.	PT. Arti Buana Lautan Indonesia	Jln. Sabutung No. 3, Kel. Gusung, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
79.	CV. Sumber Marina Semesta	Jl. Poros Makassar Maros No. 138, Kel. Marumpa, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, South Sulawesi - Indonesia
80.	PT. Sumberguna Makasarnusa	Jl. Sultan Abdullah Raya No. 53, Kelurahan Tallo, Kec. Tallo, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia
81.	CV. Gembira Galesong	Jl. Abdul Kadir, Desa Galesong Kota, Kec. Galesong, Kab. Takalar, South Sulawesi - Indonesia
82.	CV. Sugarindo Trading Co	Jl. Bakau No.60, Kel. Balandai, Kec. Bara, Kota Palopo, South Sulawesi - Indonesia
83.	CV. Basma Bahari	Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern Blok. D1 Nomor 15, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanya, Kota Makassar, South Sulawesi - Indonesia

DOKUMENTASI PELAPORAN PERJALANAN DINAS YANG DISERTAI DENGAN BERKAS KELENGKAPAN SURVEILAN



DOKUMENTASI KEGIATAN SURVEILAN DAN PENGAMBILAN SAMPEL di UNIT PENGOLAHAN IKAN DALAM RANGKA OFFICIAL CONTROL



LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif
Nama IKU 7	:	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan <i>Quality Assurance</i> Sesuai Standar Sistem dan Regulasi lingkup UPT Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	-	-	-	-	18	18	18	18	18
Realisasi	0	0	0	0					
% Capaian	0	0	0	0					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan
Tw4Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2
Sm2 = Capaian Q3 +
Capaian Q4 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2023

<p>Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)</p> <p>Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pemenuhan kebutuhan protein dunia, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan strategi ekonomi biru yang bertujuan mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekologi dan ekonomi dalam pengelolaan sektor kelautan dan perikanan yang akan membuahkan kesejahteraan masyarakat. Strategi ekonomi biru meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan air tawar (darat) yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah plastik di laut. Kegiatan Verifikasi <i>Quality Assurance</i> ini mendukung Program Prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, Pesisir, dan Darat yang berkelanjutan</p> <p>Dalam mendukung program prioritas KKP ketiga, BPPMHKP melakukan pengawasan yang ketat terhadap kualitas hasil budidaya untuk memastikan produk perikanan yang dihasilkan aman dikonsumsi dan diterima di negara tujuan. Selain itu, BPPMHKP mendukung pembudidaya untuk memenuhi standar internasional dalam meningkatkan mutu hasil perikanan melalui sertifikasi hasil budidaya yang memenuhi standar (CPIB, CBIB). BPPMHKP juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan bahan kimia dan obat-obatan dalam budidaya untuk memastikan tidak adanya residu berbahaya dalam produk akhir dan penerapan praktek penggunaan bahan kimia yang aman.</p> <p><i>Quality Assurance</i> sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan, untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan. BPPMHKP selaku otoritas kompeten mendapat mandat dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dengan melakukan verifikasi, evaluasi dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>Tahun 2024 Verifikasi <i>Quality Assurance</i> terhadap produksi hulu-hilir berdasarkan manual IKU BKIPM, formula IKU diukur dengan menghitung jumlah lokasi yang telah dilakukan yaitu Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya.</p> <p>Adapun lokasi kegiatan Verifikasi QA tahun 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2023 tentang Lokasi Kampung Nelayan Maju sebanyak 4 (empat) lokasi dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya</p>
--

sebanyak 14 (empat belas)

- Lokasi Kampung Nelayan Maju :
 1. Pontap Desa/Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur , Kabupaten/Kota Palopo
 2. Bonto Lebang, Desa/Kelurahan Bonto Lebang, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng
 3. Mattirotasi, Desa/Kelurahan Matirotasi, Kecamatan Matirosompe, Kabupaten Pinrang
 4. Lonrae, Desa/Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone

- Lokasi Kampung Perikanan Budidaya :
 1. Rumput laut, Kabupaten Bantaeng,
 2. Bandeng, Kabupaten Bone
 3. Rumput laut, Kabupaten Luwu
 4. Bandeng, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
 5. Windu, Kabupaten Pinrang
 6. Rumput laut, Kabupaten Takalar
 7. Rumput laut, Kabupaten Wajo
 8. Mas, Kabupaten Toraja Utara
 9. Nila, Kabupaten Bulukumba
 10. Nila, Kabupaten Enrekang
 11. Nila, Kabupaten Gowa
 12. Rumput laut, Kabupaten Maros
 13. Nila, Kabupaten Sinjai
 14. Nila, Kabupaten Soppeng

Pada triwulan III tahun 2024, kegiatan Verifikasi QA terhadap produk perikanan hulu –hilir di Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya dengan 18 (delapan belas) lokasi belum dilaksanakan karena adanya kebijakan penambahan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Jumlah sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan Quality Assurance terdiri dari inspektur Mutu Ahli Madya, Inspektur Mutu Ahli Muda, Asisten Inspektur Mutu dan dukungan manajerial.

Kegiatan pendukung

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2024	Revisi	Realisasi
1.	3990.PBR.001 Penambahan ruang lingkup paramater uji yang terakreditasi di UPT BKIPM dalam rangka <i>Quality Assurance</i> produk hasil perikanan	90.000.000	70.000.000	28.275.957 (40,39 %)
2.	3990.PDD.001 Jumlah Unit kerja yang dapat melakukan pengujian Parameter <i>Destructive Fishing</i>	65.000.000	56.500.000	6.589.630 (11,66 %)
3.	3990.PDD.002 Penerapan sistem manajemen lembaga inspeksi (ISO 17020) untuk mendukung BKIPM sebagai <i>Quality Assurance</i> produk hasil perikanan	25.000.000	20.000.000	18.439.600 (9,20 %)

4.	3990.QIA.001 Verifikasi Penerapan Standar <i>Quality Assurance</i> pada proses produksi perikanan budidaya (Program Unggulan KKP)	179.580.000	185.000.000	-
----	---	-------------	-------------	---

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan kegiatan Verifikasi Penerapan Standar *Quality Assurance* pada proses produksi perikanan budidaya berubah menjadi kegiatan Inspeksi Penerapan Sertifikasi Produk Primer yang divalidasi

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2024 bersumber pada kegiatan usaha perikanan yang menerapkan *Quality Assurance* sesuai standar, sistem dan regulasi dengan total anggaran sebesar Rp. 199.000.000, terjadi revisi anggaran menjadi Rp. 185.000.000.

Jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 28.000.000 terdapat kenaikan yang cukup signifikan atau sebesar 560%.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Kegiatan Verifikasi QA Kampung Nelayan Maju dan Kampung Perikanan Budidaya sampai dengan Triwulan III tidak dapat dilaksanakan karena menunggu pendelegasian dari Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer.

Tindakan Yang Telah Dilaksanakan

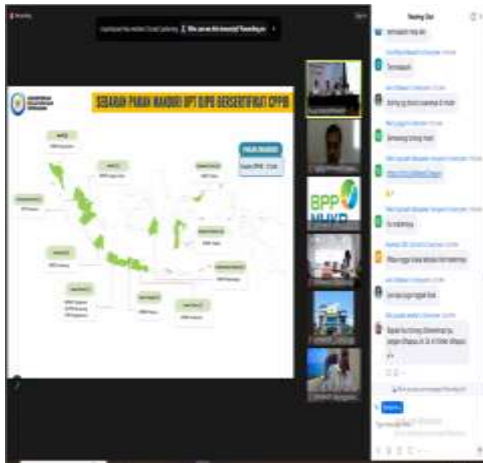
- Tanggal 20 Agustus 2024 Balai Besar KIPM Makassar melaksanakan koordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan tentang inisiasi penyusunan perjanjian kerjasama antara BPPMHKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan se Indonesia pada kesempatan tersebut di bahas poin - poin kerjasama tentang pelaksanaan jaminan mutu hasil kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan (existing) oleh DKP provinsi Sulsel dan Balai Baesar KIPM Makassar serta meminta masukkan kegiatan sinergitas pusat dan daerah.
- Pada tanggal 12 September 2024 Balai Besar KIPM Makassar telah mengikuti kegiatan Sosialisasi secara daring Petunjuk Teknis Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB), Cara Pembuatan Obat Yang Ikan Baik (CPOIB), dan Cara Distribusi Obat Ikan Yang Baik (CDOIB) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produk Primer, untuk meningkatkan kompetensi inspektur Mutu dan Asisten Inspektur. Output kegiatan berupa sertifikat hasil kegiatan.

Rekomendasi rencana aksi	PenanggungJawab	Periode
Koordinasi pelaksanaan kegiatan pengendalian pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan hulu hilir dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Selatan	Katimja Penerapan Standar dan Metode Uji Kesehatan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Q4 2024

**KOORDINASI DENGAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROPINSI SULAWESI SELATAN**



**MENGIKUTI KEGIATAN SOSIALISASI PENINGKATAN KOMPETENSI
YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN MUTU PRODUK PRIMER**



Platform pembelajaran online dengan fitur diskusi dan tanya-jawab.

Cara Pembuatan Obat Baru (CPOB)

proses untuk mengidentifikasi, menemukan, mengembangkan, menguji, dan memproduksi obat baru yang memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan.

Perbedaan Cara Pembuatan Obat Baru (CPOB)

ada beberapa yang membedakan antara CPOB dan cara pembuatan obat baru konvensional.

Cara Pembuatan Obat Baru yang Baru (CPOB)

adalah cara untuk mengidentifikasi, menemukan, mengembangkan, menguji, dan memproduksi obat baru yang memenuhi persyaratan regulasi yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan.

Perbedaan Cara Pembuatan Obat Baru yang Baru (CPOB)

ada beberapa yang membedakan antara CPOB dan cara pembuatan obat baru konvensional.

Logo BPP dan N-XP.



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TRIWULAN III TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 8	:	Indeks profesionalitas ASN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (Indeks)

T/R	TAHUN							Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	
Target	81	81	81	81	84	84	84	84
Realisasi	56,32	90,05	90,05	89,16				
% Capaian	69,53	111,17 %	111,17 %	110,07%				

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw.3 dan Tw.4;

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2;

Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4;

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, pengertian dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya;

Pengukuran IP ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN;

IP ASN dihitung berdasarkan 4 unsur yaitu berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin dengan keterangan sebagai berikut :

1. Kualifikasi pendidikan adalah pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh seorang ASN dengan nilai maksimal bobot 25.

Nilai pendidikan tersebut dibobot lagi berdasarkan jenjang jabatan :

Jenjang Jabatan	Pendidikan yang diperoleh						
	S3	S2	S1/D-IV	D-III	D-II/D-I/SLTA/Sederajat	Dibawah SLTA	
Jabatan Pimpinan Tinggi	25	23	20	15	10	5	
Jabatan Administrator	25	23	20	15	10	5	
Jabatan Pegawai	25	23	21	20	15	10	
Jabatan Pelaksana	25	23	22	21	20	15	
Jabatan Fungsional(keterampilan)	25	23	22	21	20	15	
Jabatan Fungsional(kahlian)	25	23	20	15	10	5	

2. Kompetensi adalah pengembangan diri seorang ASN dengan mengikuti Diklat, Bimtek dan seminar dengan nilai bobot 40.

Nilai akan dihitung berdasarkan data yang bersumber pada :

- Komponen Diklat Fungsional diambil dari data kursus dengan tipe kursus “Diklat Fungsional”. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani diklat fungsional ditahun berapapun;
- Komponen Diklat 20JP diambil dari data kursus dengan tipe “Diklat Fungsional atau Diklat Teknis” yang dilaksanakan ditahun bersangkutan. Total Kumulatif jumlah JP akan dihitung apabila sama atau melebihi dari 20 maka akan memperoleh nilai untuk komponen diklat 20JP;
- Komponen Seminar diambil dari data kursus dengan tipe kursus Workshop, Pelatihan Manajerial, Pelatihan Sosio Kultural, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis. Nilai Komponen akan dihitung apabila pegawai tersebut pernah menjalani hal tersebut selama 2 tahun terakhir;

Nilai Kompetensi dilakukan pembobotan lagi:

- a. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas maka diberikan nilai bobot sebagai berikut :
 - Diklat Pimpinan bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - b. Bagi ASN yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu maka nilainya :
 - Diklat Fungsional bobot nilai 15
 - Diklat 20 JP bobot nilai 15
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 10
 - c. Bagi ASN yang tidak menduduki Jabatan Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu atau disebut sebagai Fungsional Umum, maka diberi nilai bobot adalah :
 - Diklat 20 JP bobot nilai 22,5;
 - Seminar, Workshop, Sosialisasi bobot nilai 17,5
3. Kinerja adalah penilaian akhir Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP) yang terdiri dari Nilai SKP dan nilai PKP seorang ASN dengan Nilai bobot maksimal 30
Adapun untuk penilaian komponen kinerja sebagai berikut :
- a. Nilai 30 (Sangat baik)
 - b. Nilai 25 (Baik)
 - c. Nilai 20 (Butuh perbaikan)
 - d. Nilai 15 (Kurang)
 - e. Nilai 10 (Sangat kurang)

Tabel gambar

Kuadran Kinerja	Pemetaan Nilai Komponen Kinerja IP ASN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang	15
Sangat Kurang	10

4. Disiplin adalah penjatuhan hukuman disiplin kepada ASN. dengan Nilai bobot 5
Adapun nilai tersebut untuk IP Disiplini sebagai berikut :
 - a. Tidak Pernah 5
 - b. Ringan 3
 - c. Sedang 2
 - d. Berat 1

Target Tahunan IP ASN 2024 adalah 84 :

Semester I : 81
Semester II : 84

Rincian perhitungan nilai masing-masing unsur adalah sebagai berikut :

(1) Kualifikasi pendidikan Nilai maksimal 25

Kualifikasi Pendidikan adalah pendidikan terakhir yang di tempuh oleh seorang ASN dengan penilaian :

1. S3	:	=	0 pegawai x 25	=	0
2. S2	:	- Jabatan Pimpinan Pratama	=	0 pegawai x 23	=	0
	:	- Jabatan Fungsional Keahlian	=	8 pegawai x 23	=	<u>184</u>
						184
3. S1	:	- Jabatan Fungsional Keahlian	=	12 pegawai x 20	=	240
	:	- Jabatan Pengawas	=	1 pegawai x 21	=	21
	:	- Jabatan Pelaksana	=	5 pegawai x 22	=	110
	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	1 pegawai x 22	=	<u>22</u>
						393
4. D3	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	3 pegawai x 21 =	63	
	:	- Jabatan Pelaksana	=	1 pegawai x 21 =	<u>21</u>	
						84
5. SMA	:	- Jabatan Pelaksana	=	4 pegawai x 20	=	80
	:	- Jabatan Fungsional Keterampilan	=	1 pegawai x 20	=	<u>20</u>
						100
Jumlah Total						761

Jadi nilai untuk Kualifikasi Pendidikan adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kualifikasi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{761}{36} = 21,14$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kualifikasi pendidikan **21,14**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai kualifikasi pendidikan sebesar **21,14** ini berarti nilai kualifikasi pendidikan mengalami kenaikan sebesar 0,08 dari nilai pada triwulan II tahun 2024 yaitu 21,06 hal ini disebabkan karena adanya perubahan pegawai yang mutasi masuk sebanyak 4 orang pegawai.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 20,43 maka terjadi peningkatan sebesar 0,71.

(2) Kompetensi Nilai Maksimal 40

-	31 pegawai ASN mendapat nilai 40	=	31 x 40	=	1.240
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 39,25	=	1 x 39,25	=	39,25
-	2 pegawai ASN mendapat nilai 34,75	=	2 x 34,75	=	69,5
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 30	=	1 x 30	=	30
-	1 pegawai ASN mendapat nilai 15	=	1 x 15	=	15
	Jumlah			=	1.393,75

Untuk perhitungan nilai Kompetensi adalah jumlah seluruh bobot nilai dibagi Jumlah ASN.

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP kompetensi ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{1.393,75}{36} = 38,72$$

Jadi pada triwulan III diperoleh nilai rata-rata kompetensi ASN sebesar **38,72**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai Kompetensi ASN sebesar **38,72** ini berarti ada Penurunan sebesar 0,26 karena pada nilai kompetensi pada triwulan II diperoleh nilai 38,98. Penurunan tersebut disebabkan adanya pegawai mutasi masuk sebanyak 4 pegawai dimana terdapat 2 pegawai masih memperoleh nilai sedang dan sangat rendah.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 39,61 maka terjadi penurunan 0,89. Penurunan nilai tersebut dikarenakan 2 pegawai yang mutasi masuk tersebut 1 pegawai yang masih memperoleh nilai sedang dan 1 pegawai dengan nilai sangat rendah.

(3) Kinerja nilai Maksimal 30

Untuk nilai bobot kinerja

- 35 orang ASN memperoleh nilai Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) dengan predikat baik sehingga mendapat bobot nilai $25 = 35 \times 25 = \underline{875}$
- 1 orang ASN tidak mendapat penilaian Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai (PPKP) sehingga mendapat bobot nilai $0 = 1 \times 0 = \underline{0}$
- Sehingga Total Kinerja adalah $875 + 0 = 875$

Untuk perhitungan nilai Kinerja adalah :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP Kinerja ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{875}{36} = 24,31$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata kinerja **24,31**

Pada triwulan III tahun 2024 nilai kinerja sebesar 24,31 ini berarti ada penurunan nilai kinerja sebesar 0,69 dibanding nilai kinerja triwulan II tahun 2024 sebelumnya yaitu 25. Terjadinya penurunan nilai disebabkan adanya mutasi pegawai masuk 1 orang pegawai yang tidak di nilai untuk nilai kinerja SKP oleh UPT asal.

Jika dibandingkan capaian pada triwulan III tahun 2023 yang nilainya 24,41 maka terjadinya penurunan sebesar 0,10 disebabkan oleh adanya 1 orang mutasi pegawai masuk yang tidak di nilai untuk nilai kinerja SKP yang disebabkan dari sejak UPT asal belum melakukan sinkronisasi dari aplikasi myasn pegawai ke SIASN dimana hal tersebut berada diluar kendali untuk pembinaan di BBKIPM Makassar karena hal tersebut merupakan penilaian saat masih berada di UPT asal .

(4) Disiplin nilai 5

Untuk perhitungan nilai disiplin atau penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut :

- 36 orang ASN mendapat nilai $5 = 36 \times 5 = 180$

Untuk perhitungan nilai disiplin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah seluruh nilai IP disiplin ASN}}{\text{Jumlah seluruh ASN}}$$

$$\frac{180}{36} = 5$$

Jadi pada triwulan III tahun 2024 diperoleh nilai rata-rata disiplin **5**.

Pada triwulan III tahun 2024 nilai disiplin sebesar 5 ini berarti tidak ada perubahan pada nilai disiplin untuk nilai triwulan II tahun 2024 sebelumnya.

Dan untuk perbandingan triwulan III tahun 2023 juga sama tidak ada perubahan dengan triwulan III tahun 2024.

Pencapaian untuk Triwulan III Tahun 2024 nilai capaian sebesar 89,16 indeks profesionalitas (IP) yaitu :

1. Kualifikasi pendidikan = 21,14 IP
2. Kompetensi = 38,72 IP
3. Kinerja = 24,31 IP
4. Disiplin = 5 IP

Nilai Realisasi IP ASN = Kualifikasi Pendidikan + Kompetensi + Kinerja + Disiplin

$$= 21,14 + 38,72 + 24,31 + 5,00$$

$$= 89,16$$

Untuk Perbandingan nilai IP ASN dengan beberapa UPT lain di Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat disajikan sebagai berikut :

1. Balai Besar KIPM Jakarta I dengan nilai IP ASN 83,22 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 89,16 masih lebih tinggi dengan selisih 5,94
2. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal PDSPKP dengan nilai IP ASN 84,58 dengan kategori tinggi maka untuk perbandingan ini berarti Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai IP ASN 89,16 masih lebih tinggi dengan selisih 4,58

Sumber data : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn> pertanggal 8 dan 9 Oktober 2024

Seluruh pegawai ASN sebanyak 36 orang terlibat dalam pencapaian target indikator ini, yang terdiri dari :

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Plt. Kepala	1
2.	Kepala Subbagian Umum	1
3.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	4
4.	Inspektur Mutu Hasil Perikanan/Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	19
5.	Arsiparis	1
6.	Fungsional Umum	10

SDM pengelola yang terlibat dalam kegiatan tersebut sebanyak 6 pegawai, yaitu Kepala Subbagian Umum, Fungsional APK APBN dan pengelola kepegawaian terdiri dari Arsiparis, Pengolah Data dan Pengadministrasi persuratan;

Untuk mendukung kegiatan pengelolaan kepegawaian tahun 2024, dialokasikan anggaran semula Rp. 77.285.000,- menjadi Rp.73.833.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	12.000.000	11.000.000
2.	Refreshment panelis organoleptik	3.560.000	3.560.000
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	25.211.000	22.759.000
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	36.514.000
	Jumlah	77.285.000	73.833.000

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 73.833.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. **66.363.865,-** atau **89,88%**, terjadi kenaikan sebesar 73,96% dari triwulan II tahun 2024 yang realisasinya 15,92 %; dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Peningkatan kompetensi SDM sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	11.000.000	7.326.430	66,60
2.	Refreshmen panelis organoleptik	3.560.000	1.950.840	54,80
3.	Layanan organisasi dan tata kelola internal	22.759.000	22.749.660	99,96
4.	Layanan manajemen SDM	36.514.000	34.336.935	94,04
	Jumlah	73.833.000	66.363.865	89,88

Jika dibandingkan dengan periode yang sama yakni triwulan III tahun 2023 yang realisasi anggarannya 57,02%, maka terjadi kenaikan sebesar 32,86 %.

Untuk memudahkan pemantauan pada seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal KKP telah menyediakan aplikasi yang dapat diakses oleh pengelola kepegawaian pada seluruh unit kerja di lingkungan KKP melalui alamat website www.ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)	
<p>Meskipun Balai Besar KIPM Makassar mendapat nilai IP ASN 89,16 dengan kategori tinggi namun capaian tersebut belum mencapai nilai IP ASN secara maksimal karena untuk pegawai mutasi yang masuk masih ada yang memperoleh nilai dengan kategori sedang dan kategori sangat rendah dan diperlukan peningkatan nilai IP ASN bagi pegawai yang bersangkutan melalui diklat pengembangan kompetensi dan salah satu penyebab masih rendahnya nilai pegawai tersebut karena adanya nilai kinerja SKP pegawai tersebut dimana saat dari UPT asal belum melakukan sinkronisasi dari aplikasi myasn pegawai ke SIASN dan hal tersebut berada diluar kendali untuk pembinaan di BBKIPM Makassar karena hal tersebut merupakan penilaian saat masih berada di UPT asal;</p>	
Tindakan yang telah dilaksanakan	
<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah disampaikan kepada pegawai untuk mengikuti seminar pengembangan kompetensi serta melakukan penginputan sertifikat diklat/pelatihan pada aplikasi myasn.bkn.go.id; 2) Telah dilakukan verifikasi dan approval data pelatihan yang telah dikirimkan pegawai pada myasn.bkn.go.id; 3) Beberapa kegiatan yang telah terlaksana dalam mendukung kegiatan peningkatan kompetensi kepegawaian yaitu : <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan pembinaan kepegawaian yang dilaksanakan di BBKIPM Makassar dengan nara sumber dari Sekretariat BPPMKHP Bapak Wawing Walidi yang diikuti oleh seluruh ASN, PPNP dan PJLP BBKIPM Makassar pada tanggal 6 September 2024. Output yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta (ASN, PPNP dan PJLP) tentang regulasi dan ketentuan terkait rekrutment PPPK tahun 2024 di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. - Kegiatan Persiapan Implementasi alat ukur kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dilaksanakan oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi secara daring dengan menggunakan alat tes <i>Situational Judgement Test (SJT)</i> di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang akan digunakan pada Tahun 2025 pada tanggal 30 September 2024. Output yang dicapai adalah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman peserta terkait Implementasi alat ukur kompetensi manajerial dan sosial kultural di lingkungan Kemenerian Kelautan dan Perikanan. - Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan Fungsional Kepegawaian yang diikuti oleh Muhammad Arman, S.A.P yang dilaksanakan oleh BKN secara daring pada tanggal 26, 29, 30 dan 31 Juli 2024. Output yang dihasilkan yang bersangkutan masih belum memenuhi syarat untuk proses perpindahan jabatan. - Kegiatan Ujian Dinas Kenaikan Pangkat dari Golongan II ke golongan III yang diikuti oleh 2 orang pegawai an. Oktovianus dan Halim yang dilaksanakan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi di Surabaya pada tanggal 8 s/d 9 September 2024. Output yang dihasilkan yang bersangkutan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk di usulkan kenaikan pangkat/golongan. 	

- Surat Sekretaris BPPMHKP nomor B.2953/BPPMHKP.1/KP.520/VIII/2024 tertanggal 9 Agustus 2024 perihal penyampaian hasil uji kompetensi yang menyatakan pegawai an. Taufiq,S.PKP dinyatakan lulus dalam uji kompetensi Perpindahan dari Asisten Inspektur Mutu Penyelia menjadi Inspektur Mutu Ahli Pertama.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
1) Melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian UPT Asal Terkait nilai IP ASN pegawai yang masih sangat rendah . 2) Melaksanakan sharing session kepegawaian pada rapat bulanan. 3) Akan melaksanakan pemeriksaan kesehatan panelis organoleptic.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan III Tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan :

Screen shoot capaian nilai IP ASN

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibukung	Kualifikasi (Bobot 20)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 10)		TOTAL	Kemungkinan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARAT BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU NASAL KELAUTAN DAN PERIKANAN	66	21,09	84,38 %	22,33	80,82 %	25	83,33 %	4,72	94,4 %	83,16	TINGGI
2	PUSAT KARBANTENSIAN	0	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	0 %	0	SANGAT BENDAH
3	PUSAT PENGENDALIAN MUTU	31	20,94	83,70 %	36,92	92,3 %	25,18	83,97 %	4,9	98 %	87,92	TINGGI
4	PUSAT STANDARISASI SISTEM DAN KEPETAHAN	33	21,95	86,2 %	32,45	81,13 %	29	81,21 %	5	100 %	84	TINGGI
5	BALAI BESAR KPM JAKARTA	20	20,8	92,7 %	22,42	91,05 %	25	83,33 %	5	100 %	83,22	TINGGI
6	BALAI BESAR KPM MAKASSAR	26	21,14	81,34 %	28,72	86,8 %	24,31	81,03 %	5	100 %	80,96	TINGGI
7	BALAI KPM DENPASAR	16	21,69	96,76 %	32,66	81,65 %	25	83,33 %	5	100 %	84,34	TINGGI
8	BALAI KPM SURABAYA 1	46	21,3	85,2 %	37,93	94,83 %	25,71	85,7 %	5	100 %	88,34	TINGGI
9	BALAI KPM MEDAN 1	19	21,17	84,88 %	36,39	90,95 %	25	83,33 %	5	100 %	81,54	TINGGI
10	BALAI KPM BALKEMAS	17	20,76	83,04 %	37,94	94,85 %	29,41	98,03 %	5	100 %	85,12	SANGAT TINGGI
11	BALAI KPM JAYAPURA	10	21,6	86,4 %	34,59	86,48 %	25	83,33 %	5	100 %	86,78	TINGGI
12	BALAI KPM JAKARTA 2	19	21,47	85,88 %	36,16	90,41 %	25	83,33 %	5	100 %	87,66	TINGGI
13	BALAI KPM SURABAYA 3	41	21,1	84,4 %	36,39	90,47 %	25	83,33 %	5	100 %	80,48	TINGGI
14	BALAI KPM MATARAM	16	21,85	87,24 %	39,41	98,52 %	27,3	91,07 %	5	100 %	83,73	SANGAT TINGGI

→ Tidak aman ropeg.kkp.go.id/4080/ip-asn/2024/uniker/689

Google merekomendasikan setelan Chrome sebagai default [Jadikan default](#)

IP ASN 2024 Dashboard Eselon Pegawai FAQ IP ASN 2023

Isikan ketik Nama Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dibukung	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase	IP	Persentase		
1	SEKRETARAT DITJEN PENKUYATAN GAYA SAHNG PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	76	21.91	80.04 %	33.08	75.22 %	25.2	84 %	1	100 %	81.8	TINGGI
2	DIREKTORAT LOGISTIK	49	22.08	88.32 %	32.09	80.23 %	24.29	82.3 %	1	100 %	83.86	TINGGI
3	DIREKTORAT PENGOLAHAN	49	22.1	88.4 %	35.27	88.17 %	25.1	83.67 %	1	100 %	87.47	TINGGI
4	DIREKTORAT PEMASAKAN	57	21.6	86.4 %	35.18	87.97 %	25.08	83.63 %	1	100 %	84.67	TINGGI
5	DIREKTORAT PEMBUDIDAYAAN USAHA	38	21.34	85.36 %	33.48	83.65 %	25.73	85.77 %	1	100 %	85.59	TINGGI
6	SALAH BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	30	21.9	84.6 %	33.31	83.28 %	25.0	83.33 %	1	100 %	84.58	TINGGI

Microsoft Teams

Search 17:05 06/10/2024

Aktifitas Operator Sistem Informasi Kepegawaian



**FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 9	:	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	82,00	82,00	-	82	82	82	82		82
Realisasi	49,61	12,71	-	10,66	-	-	-		
% Capaian	60,50	15,5	-	13	-	-	-		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.</p> <p>Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan penyesuaian terhadap kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.</p> <p>Capaian diukur dengan instrument Lembar Kerja Evaluasi. Penilaian dilakukan terhadap 4 (empat) parameter yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30 % Pada aspek ini menyampaikan dokumen perencanaan yang berupa : Renstra 2020-2024, Renja, RKAKL dan Rencana Aksi. Pada Aspek ini telah menyampaikan dokumen Renstra 2020-2024, Renja dan Rencana Aksi yang telah terealisasi pada triwulan I dan II 2. Pengukuran Kinerja dengan Bobot 30 % Pada Aspek ini menyampaikan dokumen pengukuran kinerja yang berupa : Penyusunan Manual IKU tahun 2024 yang telah diselesaikan pada triwulan I 3. Pelaporan Kinerja dengan Bobot 15 % Pada Aspek Pelaporan Kinerja tahun 2024, dokumen yang harus disiapkan adalah Laporan Kinerja Triwulan I , Triwulan II, Triwulan III, triwulan IV dan Tahunan. Pada Triwulan III telah terealisasi untuk laporan kinerja Triwulan III tahun 2024 sehingga terealisasi tercapai 3 % 4. Evaluasi Kinerja dengan Bobot 25 %

Evaluasi kinerja dilaksanakan secara internal oleh Balai Besar KIPM Makassar dan secara eksternal oleh Sekretariat BPPMHKP, Sekretariat Jenderal KKP dan Inspektorat Jenderal secara berkala (triwulanan). Evaluasi secara internal dilakukan oleh Tim Balai Besar KIPM Makassar sebelum dilakukan penyusunan Laporan Kinerja, sedangkan evaluasi eksternal dilakukan setelah diselesaikan penyusunan Laporan Kinerja. Hasil akhir dari evaluasi eksternal berupa pengesahan nilai NPSS dalam Aplikasi Kinerja yang dapat dijadikan dasar dalam pembayaran tunjangan kinerja pegawai.

Pada Triwulan III telah dilakukan evaluasi kinerja secara internal dan eksternal. Evaluasi Eksternal berupa revidu penilaian Kinerja yang telah dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektorat Jenderal KKP di Bandung pada tanggal 9 Juli 2024, sehingga realisasi tercapai 10%.

Bobot realisasi capaian :

$$\text{Parameter 1 (0\%)} + \text{parameter 2 (0\%)} + \text{parameter 3 (3\%)} + \text{parameter 4 (10\%)} = 13\%$$

$$\begin{aligned} \text{Realisasi capaian} &= \text{Bobot realisasi capaian} \times \text{Target} \\ &= 13\% \times 82 \\ &= 10,66 \end{aligned}$$

Dengan demikian realisasi capaian indikator ini pada triwulan III adalah 10,66 dari 82

Hasil penilaian SAKIP sampai dengan Triwulan III 2024 adalah :

Nilai Triwulan I + Nilai triwulan II + Nilai Triwulan III

$$49,61 + 12,71 + 10,66 = 72,98$$

Berdasarkan hasil money pada aplikasi kinerja.kkp.go.id diperoleh nilai 83,8 yang meliputi komponen perencanaan dengan nilai 25,50, pengukuran kinerja dengan nilai 25,50, pelaporan kinerja dengan nilai 12,30, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan nilai 20,50.

ID	RANK	UNIT KERJA	PERSENTASIAN AMDAK (%)	PERSENTASIAN AMDAK (%)	PELAPORAN KINERJA (%)	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (%)	NILAI AKUNTABILITAS	PREDIKAT
1	1	DINAS RIWAYAT KIPM (KIPM)	25,50	25,50	12,30	20,50	83,8	A

Jika dibandingkan dengan hasil revidu Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Jenderal KKP diperoleh nilai 84,10 dengan predikat A (sumber data *simwas.kkp.go.id*), maka hasil penilaian secara eksternal lebih dari nilai target. Adapun rincian penilaian sebagai berikut :

No	Kategori/Unit Kerja/Program/Kelembagaan	Substansi	Nilai (Mencapai/Target)
1.	PERENCANAAN KINERJA	30	27.00 / 27.00
2.	PENGURAIAN KINERJA	30	26.70 / 26.70
3.	PELAPORAN KINERJA	10	10.00 / 10.00
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	30	21.70 / 18.70
Jumlah		100	96.73 / 100.00

- Untuk melaksanakan Indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang mengalami beberapa revisi terdiri dari :

Kegiatan	Anggaran		
	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III
3987.EBA.958. Layanan Hubungan masyarakat	Rp 12.470.000	Rp 10.970.00,-	Rp 12.575.000,-
BA.963 Layanan Data dan Informasi	Rp 14.028.000	Rp 14.028.000	Rp 26.093.000,-
Jumlah	Rp 26.498.000,-	Rp 24.998.000,-	Rp 38.668.000,-

- Adapun realisasi sampai pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 37.405.199 atau 96,73 % sedangkan pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp 5.593.000 atau 22,37 %, mengalami kenaikan sebesar 74,36%
- Jika dibandingkan realisasi triwulan III tahun 2023 sebesar Rp 9.249.584 atau 79,74%, maka triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 37.405.199 atau 96,73 % mengalamii kenaikan sebesar 16,99 %

Untuk mendukung tercapainya IKU ini didukung SDM sebanyak 7 orang terdiri dari Kasubbag Umum, Pejabat Pembuat Komitmen, Fungsional APK APBN Madya, APK APBN Muda, APK APBN Pertama, Staf Pengelola Anggaran (Bendahara Pengeluaran)

Dapat dibandingkan Nilai SAKIP Balai Karantina Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan Denpasar dengan nilai 81.55 (Predikat A) sedangkan Balai Besar KIPM Makassar dengan nilai 84.10 (Predikat A).

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Berdasarkan hasil reuiu Inspektorat Jenderal KKP pada tanggal 9-14 Juli 2024 dinyatakan bahwa pada kolom tindakan yang telah dilaksanakan berupa kegiatan peningkatan kompetensi/sharing session belum dapat menggambarkan output yang dihasilkan dari kegiatan tersebut

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2455/BPPMHKP.1/TU.330/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024 hal Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2024 yang diadakan di Bandung yang dihadiri oleh Tim Itjen, perwakilan dari Pusat Pengendalian Mutu, Balai Besar KIPM Makassar, Balai KIPM Denpasar, Balai KIPM Bandung,
 - telah melakukan revisi Laporan Tahunan yang telah di Audit oleh Itjen meliputi benchmark Indikator IP ASN, Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Balai Besar KIPM Makassar, Indikator Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar
 - Melengkapi informasi pada LKj, terkait efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan informasi keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja beserta upaya nyata perbaikannya

2. Telah Menindaklanjuti adanya perubahan target IKU pada indikator Kinerja Utama Unit Penanganan dan /atau pengolahan Ikan menerapkan sistem traceability

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi Hasil reviu Inspektorat KKP terkait perlunya output kegiatan yang harus dicantumkan pada laporan kinerja. - Melakukan Perbaikan Laporan Kinerja pada Triwulan IV 	<p style="text-align: center;">Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial</p>	<p style="text-align: center;">Triwulan IV Tahun 2024</p>

PENILAIAN SAKIP REVIU INSPEKTORAT JENDERAL KKP



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 10	:	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	100	100	100	100	100	100	100	-	100
Realisasi	100	100	100	100					
% Capaian	100%	100%	100%	100%					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 : Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4;
Sm I : Capaian Q1 + Capaian Q2;
Sm II : Capaian Q3 + Capaian Q4;
Tahunan: Capaian di akhir tahun 2024;

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Dalam rangka mempertanggungjawabkan pengelolaan kegiatan dan anggaran oleh Satuan Kerja, maka secara periodik dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal (Inspektorat Jenderal) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemerisa Keuangan (BPK) dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan setelah laporan keuangan disusun oleh obyek pemeriksaan (Kementerian/Lembaga Negara, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah), dan diserahkan kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran dimaksud berakhir;</p> <p>Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Satker BKIPM merupakan pernyataan profesional pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian intern;</p> <p>Indikator kinerja “Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)” dihitung berdasarkan dokumen formal yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK dan dokumen bukti tindak lanjut penyelesaiannya. Formulasi perhitungannya menggunakan pendekatan sebagai berikut :</p> $\% P = (A/B) \times 100\%$ <p>Keterangan :</p> <p>%P = Persentase penyelesaian temuan; A = Jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tahun anggaran 2023 yang diselesaikan pada LHP atas kepatuhan; B = Nilai temuan BPK tahun 2023;</p> <p>Pada triwulan III tahun 2024 tidak diterima temuan BPK yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan secara formal, sehingga tingkat capaiannya 100%;</p> <p>Jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2024, maka capaiannya sama yaitu 100%;</p> <p>Kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan III tahun 2023 karena uraian indikator kinerja berbeda;</p> <p>Pencapaian target indikator kinerja ini didukung oleh pengelola anggaran sebanyak 11 orang, yang terdiri dari :</p>

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran;
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen;
- (3) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
- (4) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- (5) Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan;
- (6) Bendahara Penerimaan;
- (7) Bendahara Pengeluaran;
- (8) Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai;
- (9) Verifikator Keuangan (3 orang);

Pengelola anggaran yang melaksanakan indikator kinerja ini sama dengan periode triwulan II tahun 2024 yakni 11 orang.

Untuk mendukung kegiatan, dialokasikan anggaran semula Rp. 11.644.000,- direvisi menjadi Rp.4.270.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu Semula (Rp.)	Menjadi (Rp.)
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	8.044.000	1.042.000
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer suplies	3.600.000	3.228.000
	Jumlah	11.644.000	4.270.000

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.270.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.262.500,- atau 99,82% yang digunakan untuk penjiilidan dan penggandaan laporan Rp. 1.042.000,- serta pengadaan alat tulis kantor dan komputer suplies Rp. 3.220.500,-, terjadi kenaikan sebesar 82,41% dari triwulan II tahun 2024 yang realisasinya 17,41%, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Uraian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
1.	Belanja bahan penggandaan dan pelaporan	1.042.000	1.042.000	0,00
2.	Belanja alat tulis kantor dan komputer suplies	3.228.000	3.220.500	99,77
	Jumlah	4.270.000	4.262.500	99,82

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, dengan pagu anggaran semula sebesar Rp. 16.400.000,- yang direvisi menjadi Rp. 11.600.000,- dapat direalisasikan anggaran sebesar Rp. 9.249.584,- atau 79,74%. Dengan demikian terjadi kenaikan realisasi sebesar 20,08% pada periode yang sama tahun 2024;

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

- Potensi terjadinya tuntutan ganti rugi (kelebihan belanja) dikarenakan pengelola anggaran kurang cermat dalam melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran belanja;
- Perbedaan pemahaman dalam implementasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Melakukan verifikasi secara berjenjang pada dokumen tagihan pembayaran belanja mulai dari PPABP, verifikator keuangan, bendahara pengeluaran, PPK dan PPSPM;
- Telah direalisasikan anggaran kegiatan pemantauan dan evaluasi sebesar 99,82% sampai dengan triwulan III tahun 2024;
- Mengikutkan pegawai pengelola anggaran pada pelatihan peningkatan kompetensi. Pada triwulan III tahun 2024, upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi pengelola anggaran adalah dengan menugaskan pegawai untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan tugas yang diemban, dengan uraian sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai	Nama Pelatihan	Penyelenggara
1	2	3	4
1	Kamdani	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Bagi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) : <i>Microlearning</i> Tata Cara Pembayaran Menurut PMK Nomor 62/PMK.05/2023 Tahap II Tahun 2024 Tanggal 1-15 Juli 2024	Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
2	Kamdani	Pendidikan Profesional Berkelanjutan Bagi PPK Negara Tersertifikasi (PNT) : <i>Microlearning</i> Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tahap II Tahun 2024 Tanggal 16-31 Juli 2024	Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu
3	Kamdani Karwit	Sosialisasi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tanggal 21 Agustus 2024	Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal KKP
4	Kamdani Bakhtiar	Webinar Edukasi Perpajakan : Cara Mudah dan Tips Pembuatan e-Bupot Unifikasi Hingga Pelaporan SPT Masa Tanggal 25 Juli 2024	Pajakind
5	Kamdani Bakhtiar	Webinar Edukasi Perpajakan : Strategi Efektif dalam Menangani SP2DK atau Himbauan Tanpa Pemeriksaan Tanggal 21 Agustus 2024	Pajakind

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<i>Refreshment</i> regulasi pengelolaan anggaran;	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan IV Tahun 2024

Dokumentasi Kegiatan :





**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 11	:	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	80	80	80	80	80	80	80		80
Realisasi	100	100	100	100					
% Capaian	125	125	125	125					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumberdaya telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan. Pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik;

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut;

Indikator Kinerja ini dihitung dari persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP pada Balai Besar KIPM Makassar berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) yang terbit pada Triwulan IV tahun 2023 s/d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Balai Besar KIPM Makassar yang menjadi obyek pengawasan, dengan formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti;

$\sum N$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan ;

Pada triwulan III tahun 2024 tidak terdapat audit kinerja dari Inspektorat Jenderal KKP, sehingga realisasi indikator kinerja ini 100%, sama seperti pada periode triwulan III tahun 2023 tidak terdapat audit dari Inspektorat Jenderal KKP sehingga nilai capaian kinerja adalah sebesar 125%.

Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja pada triwulan III tahun 2023, maka nilainya sama yaitu 100%.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran yang telah direvisi dari Rp.665.222.000,- menjadi Rp.681.026.000,- yang sampai dengan triwulan III tahun 2024 terealisasi sebesar Rp.316.184.398,- atau 46,43% yang digunakan untuk belanja keperluan perkantoran, belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja honor operasional satuan kerja, Belanja honor output kegiatan, belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Adapun progress peningkatan penggunaan anggaran dari triwulan II ke triwulan III sebesar 14,76%. Jika dibandingkan alokasi anggaran pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 11.600.000,- terjadi peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5770,91%. Hal ini disebabkan terjadinya perubahan kegiatan yang mendukung indicator kinerja ini, yang semula hanya berasal dari anggaran pemantauan dan evaluasi, menjadi belanja operasional perkantoran.

Adapun realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2023 dari pagu Rp. 11.600.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 9.248.584,- atau 79,73%, secara persentase lebih besar 33,3% dari realisasi triwulan III tahun 2024.

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IK ini sebanyak 14 orang yang terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Pejabat Pengadaan 1 orang, Pejabat Penerima dan Pemeriksa Barang 1 orang, Pengurus BMN 1, Bendahara 2 orang, Bendahara Penerimaan Pembantu 1 orang, Staf KPA 2 orang, Staf PPK 3 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah sdm yang terlibat sebanyak 23 orang sehingga terjadi efisiensi penggunaan sdm dalam mendukung iku ini.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Potensi masalah kurang cermatnya pengelola kegiatan dan anggaran dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan itjen.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan hasil audit itjen melalui aplikasi SIDAK;
2. Telah dilaksanakan briefing kepada tim pengelola kegiatan dan anggaran pada tanggal 9 September 2024, dengan substansi briefing salah satunya adalah pengelolaan kegiatan dan anggaran dan pemantauan hasil audit oleh itjen KKP.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Operator SIDAK memantau aplikasi SIDAK secara berkala.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan IV tahun 2024



NO	Uraian	Anggaran	Realisasi	Status
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Briefing tgl 9 September 2024



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 12 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKIPM

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	93,76	93,76	93,76	93,76				-	93,76
Realisasi	74,91	98,93	98,93	97,55					
%Capaian	79,89	105,49	105,49	104,02					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.</p> <p>Ruang lingkup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. IKPA merupakan alat penilaian kinerja pelaksanaan anggaran belanja K/L atas pelaksanaan DIPA. 2. Penilaian kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan secara periodik dengan memperhatikan aspek evaluasi dan perbaikan kinerja pelaksanaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan di bidang pelaksanaan anggaran. <p>Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (<i>spending better</i>) dan mendukung pemulihan ekonomi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas perencanaan; 2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan; 3. Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek; 4. Melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ); 5. Meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran dana Bansos dan Banper; 6. Meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (<i>value for money</i>); 7. Meningkatkan monitoring dan evaluasi. <p>Pengukuran capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dilakukan atas penilaian dari berbagai aspek yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas perencanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) 2. Kualitas pelaksanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontraktual (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (menjadi pengurang nilai IKPA) 3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran <ol style="list-style-type: none"> a. Capaian Output (25%)

Capaian nilai IKPA pada triwulan III tahun 2024 sebesar 97,55 atau 104,02% dari target 93,76 dengan rincian sebagai berikut :

1. Aspek kualitas perencanaan anggaran

- a. Revisi DIPA (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu semester.

Pada triwulan III Tahun 2024 tidak terdapat revisi yang mempengaruhi nilai IKPA sehingga capaiannya adalah :

$$(100/100) \times 10\% = 10\%$$

- b. Deviasi Halaman III DIPA (15%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran Satker berdasarkan rata-rata nilai kinerja bulanan Deviasi Halaman III DIPA. Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap RPD bulanan pada setiap jenis belanja dan memperhitungkan proporsi pagu masing-masing jenis belanja, berdasarkan pemutakhiran RPD pada Halaman III DIPA yang disampaikan oleh Satker paling lambat pada hari kerja kesepuluh awal triwulan. Rata-rata deviasi kumulatif diperoleh dari nilai aplikasi OMSPAN sampai September 2024 sebesar 90,78 sehingga nilai deviasi halaman III DIPA sebagai berikut :

Dengan demikian nilai Deviasi Halaman III DIPA adalah $(90,78/100) \times 15\% = 13,61\%$.

2. Aspek kualitas pelaksanaan anggaran

- a. Penyerapan Anggaran (20%) merupakan indikator kinerja yang digunakan mengukur kualitas pelaksanaan anggaran Satker kesesuaian eksekusi belanja dengan target penyerapan anggaran triwulanan, dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Nilai kinerja, diperoleh dari rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan setiap triwulan. Berdasarkan nilai penyerapan yang tertera pada aplikasi Monev PA 94,67 maka diperoleh bobot sebagai berikut :

$$94,67 \times 20\% = 18,93\%$$

Belanja kontraktual (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur upaya akselerasi belanja kontraktual pada Satker, dihitung berdasarkan nilai komposit antara nilai kinerja (1) Komponen akselerasi kontrak dini (bobot 40%), (2) Komponen akselerasi belanja modal (bobot 40%), dan (3) Komponen akselerasi kontrak (bobot 20%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 tidak terdapat kontrak dini, belanja modal dan akselerasi kontrak, sehingga perhitungannya sebagai berikut :

- Akselerasi kontrak dini	: 1 x 40% =	40
- Akselerasi belanja modal	: 1 x 40% =	40
- Akselerasi kontrak	: 1 x 20% =	20
Jumlah		= 100

Dengan demikian capaian indikator kinerja belanja kontraktual adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

- b. Penyelesaian tagihan (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM-LS kontraktual Satker, dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN mitra. Pada triwulan III tahun 2024 seluruh SPM-LS kontraktual telah disampaikan tepat waktu sehingga perhitungannya sebagai berikut :

$$100 \times 10\% = 10.$$

- c. Pengelolaan UP dan TUP (10%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban UP (GUP) dan pertanggungjawaban TUP (PTUP), efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, dan penggunaan UP kartu kredit pemerintah, dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen (1) Pengelolaan UP dan TUP tunai (bobot 90%), dan (2) Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah (bobot 10%). Untuk pengelolaan UP dan TUP tunai dihitung berdasarkan nilai komposit dari (1) Ketepatan waktu (bobot 50%), (2) Persentase GUP (bobot 25%), dan (3) Setoran TUP (bobot 25%).

Pada triwulan III tahun 2024 pengelolaan UP dan TUP dihitung sebagai berikut :

(1) Perhitungan nilai pengelolaan UP dan TUP tunai :

- Ketepatan waktu	: 100 x 50%	= 50
- Persentase GUP	: 100 x 25%	= 25
- Setoran TUP	: 100 x 25%	= 25
Jumlah		= 100

Jadi nilai UP dan TUP tunai adalah : $(100/100) \times 90\% = 90.$

(2) Perhitungan pengelolaan UP kartu kredit pemerintah :

Pengelolaan UP kartu kredit pemerintah telah dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga nilainya adalah 100.

Jadi nilai kinerja pengelolaan UP kartu kredit pemerintah adalah $(100/100) \times 10\% = 10\%$.

Dengan demikian nilai kinerja pengelolaan UP dan TUP adalah : $(90 + 10)/100 \times 10\% = 10\%$.

d. Dispensasi SPM (0%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kepatuhan Satker dalam menyampaikan SPM sesuai dengan batas waktu penyampaian SPM diakhir tahun anggaran yang diatur dalam ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran, dihitung berdasarkan rasio antara jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan pengajuan SPM melebihi batas waktu yang ditentukan terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN mitra di triwulan IV.

Pada triwulan III tidak terdapat dispensasi SPM sehingga nilai dispensasi SPM adalah 0.

3. Aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran

Capaian output (25%) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur ketepatan waktu penyampaian data dan ketercapaian output pada Satker, dihitung berdasarkan komposit nilai kinerja (1) Komponen ketepatan waktu (bobot 30%), dan (2) Komponen capaian RO (bobot 70%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024, perhitungan capaian output adalah sebagai berikut :

- Ketepatan waktu	: 100 x 30%	= 30
- Capaian RO	: 100 x 70%	= 70
	Jumlah	= 100

Dengan demikian nilai kinerja capaian output adalah $(100/100) \times 25\% = 25\%$.

Dari tiga aspek penilaian tersebut diperoleh nilai dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
	Revisi DIPA	Deviasi Hal III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Capaian Output	
Nilai	100	90,78	94,67	100	100	100	0	100	97,55
Bobot	10	15	20	10	10	10	0	25	
Nilai Akhir	10	13,62	18,93	10	10	10	0	25	
Nilai Aspek	95,39		98,67					100	

Dibandingkan dengan realisasi IKPA triwulan II 2024 yaitu sebesar 98,93, maka terjadi penurunan sebesar 1,38 atau 1,39% pada triwulan III 2024 (97,55). Hal ini disebabkan penyerapan anggaran tidak sesuai dengan rencana yang tertuang dalam halaman III DIPA sehingga capaian penyerapan anggaran hanya 94,67.

Realisasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) periode triwulan III tahun 2024 adalah 97,55 dari target tahunan sebesar 93,78 atau tingkat capaiannya 104,02%. Jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 yang nilainya 97,44, mengalami peningkatan nilai IKPA sebesar 0,11%, hal ini terjadi karena adanya peningkatan pada nilai kualitas perencanaan anggaran dari 92,95 menjadi 95,40, dan nilai unsur kualitas pelaksanaan anggaran yang semula 98,43 menjadi 98,67;

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 setelah revisi sebesar Rp. 9.468.000,- dari anggaran sebelumnya Rp.10.632.000,-. Sampai dengan triwulan III tahun 2024 telah direalisasikan Rp. 9.440.000,- atau 99,70% yang digunakan untuk belanja alat tulis kantor dan supplies komputer, perjalanan pembinaan keuangan, dan perjalanan konsultasi perpajakan;

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2024 yang besarnya 85,56%, maka terjadi kenaikan sebesar 14,14%;

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 dengan periode yang sama yang sebesar 77,01%, maka terjadi kenaikan sebesar 22,69%;

Untuk mendukung tercapainya indikator kinerja ini didukung SDM sebanyak 11 orang terdiri atas KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Verifikator Keuangan (3 orang), Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan, dan Operator BMN.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Terjadinya penurunan nilai IKPA triwulan III 2024 sebesar 1,39% dari triwulan II 2024.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah dilakukan pemantauan realisasi capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan.



2. Mengikuti Treasury Award KPPN Makassar II semester I 2024 pada tanggal 25 september 2024.



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mentaati pencairan anggaran disesuaikan dengan rencana penarikan dana; 2. Melakukan revisi halaman III DIPA sesuai kebutuhan. 	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan IV

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis : Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 13 : Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Balai Besar KIPM Makassar

T/R	Tahun 2024							Capaian Th.2024	Target Th.2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm2	Tahunan		
Target	82	82	82	82	0	0	82		82
Realisasi	0	47,46	47,46	74,24	0	0	0		
%Capaian	0	57,88	57,88	90,53	0	0	0		

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

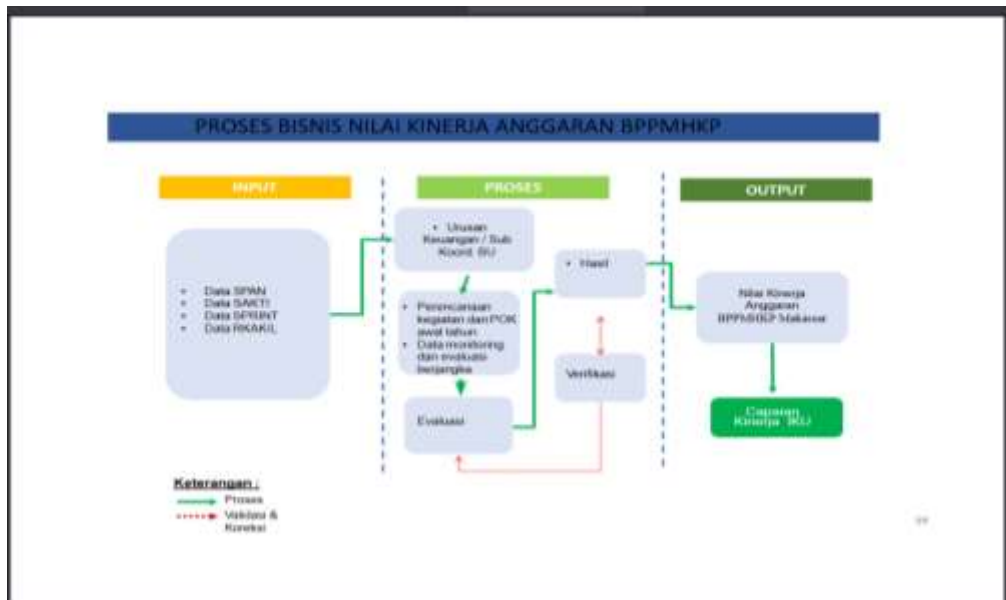
Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Menteri keuangan melaksanakan evaluasi kinerja anggaran sebagai salah satu instrument penganggaran berbasis kinerja untuk pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan fungsi peningkatan kualitas. Fungsi akuntabilitas bertujuan untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga, unit eselon I / dan / satuan kerja bersangkutan. Sedangkan fungsi peningkatan kualitas dimaksud bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor- faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA- K/L dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan.</p> <p>Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran digunakan sebagai salah satu dasar untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan tema, sasaran, arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan yang direncanakan; • Penyusunan reviu angka dasar; • Penyusunan alokasi anggaran tahun berikutnya dan/atau penyesuaian anggaran tahun berkenan; dan • Pemberian penghargaan dan/atau pengenaan sanksi <p>Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran, Menteri Keuangan dapat melibatkan Kementerian/Lembaga; dan/atau pihak-pihak lain, yang antara lain meliputi akademisi, pakar dan praktisi.</p> <p>Untuk memantau Nilai Kinerja Anggaran, Kementerian Keuangan telah membuat suatu aplikasi yaitu Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Hal ini dimaksudkan agar setiap organisasi dapat selalu memantau dashboard kinerja anggaran dan melakukan peningkatan pada aspek-aspek penunjang Nilai Kinerja Anggaran tersebut.</p> <p>Pada Triwulan II Tahun 2024 terdapat perubahan pada Aplikasi Monev Kementerian Keuangan. Pada tahun 2024 pengukuran Nilai kinerja Anggaran berdasarkan pada 2 kategori yaitu Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan untuk tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya Nilai kinerja anggaran didasarkan dari 4 aspek yaitu Aspek Penyerapan, Konsistensi, Capaian realisasi Output, dan Nilai Efisiensi.</p>

Berikut adalah proses bisnis terbentuknya data pada dashboard Aplikasi Money Kemenkeu



Dashboard Aplikasi Money Kemenkeu

Penjelasan Dashboard Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan Triwulan III tahun 2024



1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 25,46 %
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 48,78 %

Total Nilai Kinerja Anggaran TW III 2024 adalah sebesar 74,24 atau "Cukup"

Nilai Kinerja Anggaran pada dashboard adalah "Cukup" artinya Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar KIPM Makassar cukup baik, tetapi masih perlu perbaikan dari segi Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berikut adalah dashboard Indikator Pengukur Nilai Kinerja Anggaran :

1. Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran : Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektifitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian pemetaan SBK untuk menilai efisiensi. Dibawah ini adalah Dashboard aplikasi yang menampilkan Nilai kinerja Perencanaan Anggaran.

Tampilan Dashboard Komponen Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Dashboard Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

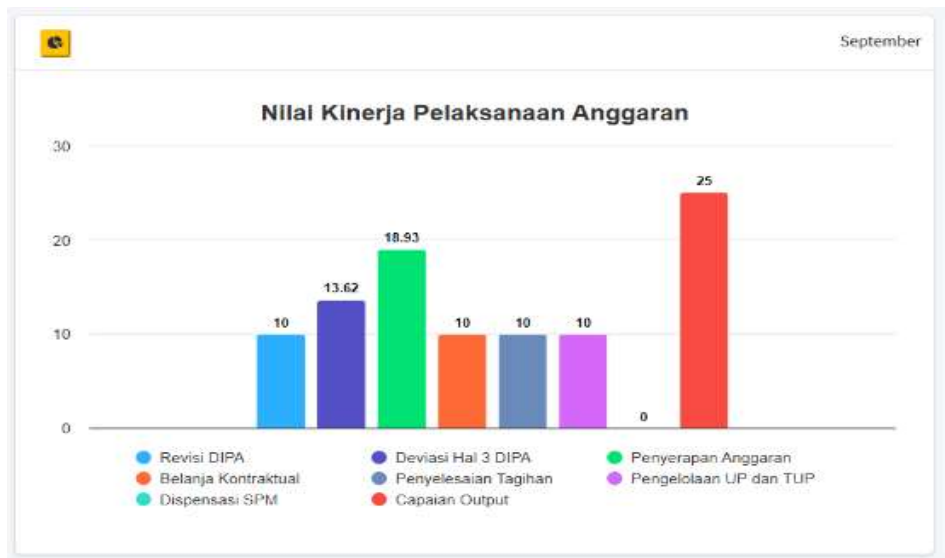


Dengan demikian nilai kinerja perencanaan anggaran yang diperoleh adalah 25,46%. Hal ini ditunjukkan pada dashboard aplikasi sebagai berikut:



2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran : Pengukuran Nilai kinerja Pelaksanaan Anggaran di dukung oleh 7 indikator yaitu: Revisi DIPA, Penyerapan Anggaran, Penyelesaian Tagihan, Deviasi Halaman 3 DIPA, Belanja Kontraktual, Pengelolaan UP dan TUP, dan Capaian output.

Tampilan Dashboard Komponen Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



Berikut adalah bobot masing-masing indikator:

- Revisi DIPA (10) = Capaian % 100
- Deviasi Hal 3 DIPA (15) = Capaian % 90.78
- Penyerapan Anggaran (20) = Capaian % 94.67
- Belanja Kontraktual (10) = Capaian % 100
- Penyelesaian Tagihan (10) = Capaian % 100
- Pengelolaan UP dan TUP (10) = Capaian % 100
- Capaian Output (25) = Capaian % 100

Dengan demikian nilai kinerja perencanaan anggaran yang diperoleh adalah 48.78%. Hal ini ditunjukkan pada dashboard aplikasi sebagai berikut:



Aplikasi Monev Kemenkeu tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu karena adanya perbedaan indikator pengukuran untuk mendapatkan nilai Nilai Kinerja Anggaran. Namun dari segi Nilai Capaian Kinerja Triwulan III 2024 dan 2023 adalah 74,24 % dan 83,26 %. terjadi penurunan Triwulan III tahun 2024 sebesar 9.02 %. Hal ini dipengaruhi penyerapan anggaran TW III tahun 2023 lebih besar dibandingkan tahun 2024.

Capaian indikator kinerja ini didukung dengan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp80.159.000 setelah revisi dari pagu anggaran sebelumnya sebesar Rp71.621.000. Adapun sampai dengan triwulan III Tahun 2024 telah terealisasi sebesar Rp74.642.304 atau 93,12% yang digunakan untuk:

- Belanja ATK tercapai 100 %
- Belanja perjalanan dinas biasa tercapai 93.06 %

Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 5,56% dari triwulan II 2024 ke triwulan III 2024.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kegiatan ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp99.022.000 dengan realisasi anggaran TW III 2023 adalah Rp73.780.508 atau 74,51%. Terjadi kenaikan realisasi anggaran sebesar 18,61 % pada triwulan III 2024 jika dibandingkan triwulan III 2023. Hal ini disebabkan karena pagu anggaran tahun 2023 lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2024

Jumlah SDM yang terlibat dalam mendukung tercapainya IKU ini sebanyak 10 orang, terdiri atas KPA 1 orang, PPK 1 orang, PPSPM 1 orang, Bendahara Pengeluaran 1 orang, Staf KPA 3 orang, Staf PPK 2 Orang, Pejabat Pengadaan 1 orang.

Komitmen untuk terus meningkatkan kinerja berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara menjadi prioritas Balai Besar KIPM Makassar. Komitmen ini juga telah mendapat apresiasi dari kementerian keuangan. Pada tgl 25 September 2024 Balai Besar KIPM Makassar menerima penghargaan terbaik III dengan predikat Satuan Kerja dengan transaksi Digipay I Tertinggi yang diserahkan pada acara Treasury Award semester I 2024 yang diselenggarakan oleh KPPN Makassar II . Adapun Balai Besar KIPM Makassar sendiri merupakan salah satu satker mitra KPPN Makassar II diantara 201 satker mitra.

Berikut satker mitra KPPN Makassar yang mendapatkan penghargaan:

Juara I Balai Diklat Keuangan Makassar

Juara II Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

Juara III Balai Besar KIPM Makassar

Tujuan kegiatan Treasury Award adalah untuk memberikan motivasi kepada satker selaku mitra kerja dalam meningkatkan tata kelola perencanaan anggaran, pelaksanaan maupun pertanggung jawaban keuangan. Penghargaan ini menjadi bukti Balai Besar KIPM Makassar untuk selalu menjaga integritas dan kualitas pengelolaan keuangan serta memberikan spirit kepada pihak-pihak yang terlibat untuk meningkatkan kinerja dan performanya.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

Penyerapan anggaran di TW III belum mencapai target 75%. Realisasi di TW III 2024 baru mencapai 64%.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Operator telah melakukan konsultasi terkait proses bisnis Monev Kementerian Keuangan pada layanan SAPA ANGGARAN.



Jawaban: • [KMK-466-2023-PPKA-dan-EKA-Perencanaan-Anggaran.pdf](#) (2.17 MB)



Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melaksanakan rapat pembahasan percepatan penyerapan anggaran untuk TW IV 2024.	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial	Triwulan IV Tahun 2024

DOKUMENTASI

Foto penerimaan sertifikat penghargaan



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) TW II BALAI BESAR KIPM MAKASSAR
TAHUN 2024**

Nama Sasaran Strategis	:	Terkelolanya pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 14	:	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian	Target
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan	Th. 2024	Th. 2024
Target	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		80,00
Realisasi	54,49	4,69	56,04	29,97					
% Capaian	68,11	5,86	70,04	23,97					

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Istu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa adalah dengan mewujudkan pengadaan yang menghasilkan value for money. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan pasar pengadaan yang efisien dan dunia usaha yang berdaya saing.</p> <p>Perlunya kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, serta Petunjuk Pelaksananya. Jika tidak mematuhi ketentuan yang berlaku, maka pengadaan barang/ jasa akan berpotensi menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) 2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%) 3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%) 4. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30 %) <p>Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur: sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Rencana Umum Pengadaan telah di upload ke dalam aplikasi SIRUP (20%) <ul style="list-style-type: none"> Untuk melaksanakan program kegiatan dan anggaran pengadaan Barang/ Jasa yang mudah diakses masyarakat, akuntabel dan transparan pada instansi pemerintah khususnya lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan maka perlu disusun Rencana Umum Pengadaan berbasis aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), berkaitan dengan hal tersebut Balai Besar KIPM Makassar sebelum melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah menyusun Rencana Umum Pengadaan yang diupload di palikasi SIRUP. Adapun rincian paket RUP yang telah diupload dengan rincian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Paket Penyedia sebanyak 6 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 711.256.000,- b. Paket Swakelola sebanyak 41 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 1.467.538.000,- c. Paket Penyedia dalam swakelola sebanyak 68 kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 4.294.232.000,-

Rencana umum pengadaan yang telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP telah direalisasikan pada Triwulan I sehingga capaian pada Triwulan III menjadi = 0%;

2. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui LPSE (30%)

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar tidak mempunyai anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli tahun 2024 terdapat revisi anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa Sarana Pengujian Mutu senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III pengadaan belanja modal tersebut belum dilaksanakan karena tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan pada alat laboratorium tersebut.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%;

3. Persentase Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa (20%)

Dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/ jasa telah dilakukan pencatatan dan penginputan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Pelaksanaan penginputan di lakukan secara berjenjang dari Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul GLP dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Adapun laporan penyelenggaraan barang/ jasa bersifat tahunan dengan dilengkapi Berita Acara Serah Terima Barang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai bentuk pertanggungjawaban PPK terhadap KPA.

Realisasi laporan penyelenggaraan pengadaan barang/ jasa = (0 %)

4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (30 %)

Semua proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Triwulan III 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Adapun tahapan pelaksanaan adalah :

- a. Melakukan perencanaan pengadaan barang/ jasa;
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan barang/ jasa;
- c. Melakukan pemilihan penyedia barang/ jasa;
- d. Melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang

Progres pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa Balai Besar KIPM Makassar pada periode triwulan III menggunakan system Digipay - Marketplace yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-20/PB.2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui

Sistem Marketplace dan Digital Payment Pada Satuan Kerja, dan secara teknis diatur dengan Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada table dibawah ini :

REKAPITULASI BELANJA TRIWULAN III MENGGUNAKAN DIGIPAY - MARKETPLACES								
JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER		
JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL	JUMLAH BARANG	HARGA SATUAN	TOTAL
44	2.002.500	3.872.500	-	-	-	21	873.000	1.000.000

Total pengadaan menggunakan digipay sebesar Rp. 4.872.500,- (*empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Untuk progress pengadaan belanja barang baik secara eletronik dan konvensional dapat dilihat pada table dibawah ini :

Realisasi	Belanja Barang (manual)	Belanja Digipay
7.797.806.606	7.792.934.106	4.872.500

Dari table diatas terlihat belanja barang secara konvensional mencapai 99,93% karena beberapa belanja barang tidak dapat dilaksanakan secara eletronik, seperti :

1. Belanja perjalanan dinas pegawai;
2. Belanja jasa penyedia jasa lainnya perorangan;
3. Belanja Honor PPNPN;
4. Belanja Langganan daya dan jasa;
5. Belanja honor pengelola anggaran;
6. Eksploitasi kendaraan dinas.

Seluruh pengadaan belanja barang diatas telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga nilai bobot pada unsur ini telah terealisasi 30%.

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan III adalah :

Unsur 1 (0%) + Unsur 2 (0%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (29,97%) = 29,97 % dari target 80%

Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(29,97\%/80\%) \times 100\% = 23,97\%$.

Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan III tahun 2023 dengan nilai capaian 64,51% maka terjadi penurunan signifikan sebesar 59,82%.

Adapun sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja ini selama tahun 2024 sebanyak 9 orang yang terdiri dari: KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Operator SIRUP dan Operator SAKTI (Modul Persediaan, Aset Tetap dan GLP).

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini pada triwulan III tahun 2024 sebesar 149.156.000,- berbeda dengan anggaran pada triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.165.810.000,- dimana terjadi revisi kurang sebesar Rp.16.654.000,-. dapat dilihat pada table dibawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai/ Pakaian Kerja	43.546.000	41.048.950	2.497.050	94,27
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pengadaan Makanan/ Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	13.110.000	8.547.820	4.562.180	65,20
3	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Pas Pelabuhan Laut/ Udara	8.500.000	3.800.000	4.700.000	44,71
4	Operasional dan Pemeliharaan Kantor pertemuan/ Jamuan Delegasi/ Misi/ Tamu	84.000.000	63.923.638	20.076.362	76,10
TOTAL		149.156.000	117.320.408	31.835.592	78,66

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)
 Lambatnya progres penyerapan anggaran pada akun belanja modal peralatan laboratorium karena menunggu persetujuan sehubungan dengan tidak tersedianya produk dalam negeri yang memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipersyaratkan;

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Telah melakukan revisi anggaran untuk kegiatan penambah daya tahan tubuh dan operasional pas pelabuhan/udara.
- Plt. Kepala Balai Besar KIPM Makassar telah bersurat ke Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor B.2345/BBKIPM.MKS/PL.410/IX/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Permohonan Persetujuan Pengadaan Barang/Jasa untuk barang yang nilai TKDNnya kurang dari 25% dan Produk Impor.
- Pada triwulan III telah dilaksanakan Uji Kompetensi Fungsional Pengelola Barang/Jasa tanggal 17 September 2024 atas nama Abdul Mubarak Azis dan dinyatakan lulus dengan Sertifikat Kompetensi LKPP Nomor: 08-00628-0924.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan langkah strategis pengadaan belanja modal peralatan dan mesin berupa alat laboratorium yang Tingkat Komponen Dalam Negerinya tidak mencapai 25 %; - Melakukan revisi RKAKL disesuaikan dengan kebutuhan. - Melakukan update SIRUP sesuai revisi RKAKL yang telah disahkan. - Menyusun dokumen pengadaan barang/jasa sesuai regulasi yang berlaku. 	Ketua Tim Kerja Dukungan Manajemen	Triwulan IV Tahun 2024

DOKUMENTASI KOORDINASI DAN KOMUNIKASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA DENGAN PENYEDIA BARANG



SERTIFIKAT UJI KOMPETENSI



SEMULA

MENJADI

RENCANA KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024						
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI						
SATKER RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI						
ALOKASI Rp. 12.843.852.000						
KODE	PROGRAM KEGIATAN AND/OR KOMPONEN SUBPROGRAM/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD	CP
		VOLUME	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0119	Bidang Penyelenggaraan Layanan			41.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			37.000.000		
	- Peningkatan Kapasitas	37.000.000	1000,00	37.000.000		
	- Peningkatan PPKM	37.000.000	1000,00	37.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			3.000.000		
0110	Bidang Penelitian Dasar, Teknik, Terapan			8.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			3.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	3.000.000	1000,00	3.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			5.000.000		
0118	Bidang Penyelenggaraan Layanan			4.200.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			4.200.000		
	- Peningkatan Kapasitas	4.200.000	1000,00	4.200.000		
	- Peningkatan PPKM			1.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			3.200.000		
0115	Bidang Penyelenggaraan Layanan			9.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			9.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	9.000.000	1000,00	9.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			1.000.000		
0117	Bidang Penyelenggaraan Layanan			8.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			8.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	8.000.000	1000,00	8.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			1.000.000		
0209	Bidang Penyelenggaraan Layanan			887.852.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			887.852.000		
	- Peningkatan Kapasitas	887.852.000	1000,00	887.852.000		
	- Peningkatan PPKM			40.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			7.852.000		

RENCANA KERTAS KERJA SATKER T.A. 2024						
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI						
SATKER RISET, TEKNOLOGI, DAN INOVASI						
ALOKASI Rp. 12.843.852.000						
KODE	PROGRAM KEGIATAN AND/OR KOMPONEN SUBPROGRAM/DETL	PERHITUNGAN TAHUN 2024			SD	CP
		VOLUME	BIAYA SATUAN	JUMLAH BIAYA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0119	Bidang Penyelenggaraan Layanan			41.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			37.000.000		
	- Peningkatan Kapasitas	37.000.000	1000,00	37.000.000		
	- Peningkatan PPKM	37.000.000	1000,00	37.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			3.000.000		
0110	Bidang Penelitian Dasar, Teknik, Terapan			8.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			3.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	3.000.000	1000,00	3.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			5.000.000		
0118	Bidang Penyelenggaraan Layanan			4.200.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			4.200.000		
	- Peningkatan Kapasitas	4.200.000	1000,00	4.200.000		
	- Peningkatan PPKM			1.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			3.200.000		
0115	Bidang Penyelenggaraan Layanan			9.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			9.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	9.000.000	1000,00	9.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			1.000.000		
0117	Bidang Penyelenggaraan Layanan			8.000.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			8.000.000		
	- Akumulasi Hibah/Grant/Donasi/Kelembagaan/Struktur/Prosedur	8.000.000	1000,00	8.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			1.000.000		
0209	Bidang Penyelenggaraan Layanan			887.852.000		99
	- RPKM (Rakor) (1)			887.852.000		
	- Peningkatan Kapasitas	887.852.000	1000,00	887.852.000		
	- Peningkatan PPKM			40.000.000		
	- Peningkatan Mutu/Manajemen/Kelembagaan/Struktur/Prosedur			7.852.000		

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2024

Nama Sasaran Strategis	:	Terkelolanya pemerintahan yang baik lingkup BKIPM
Nama IKU 15	:	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Balai Besar KIPM Makassar (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2024	Target Th. 2024
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	-	80.00
Realisasi	54,56	8,99	63,55	8,29	-	-	-	-	
% Capaian	68,20	11,23	79,43	10,36	-	-	-	-	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4
 Sm 1 = Capaian Q1 + Capaian Q2
 Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4
 Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya?)
<p>Pengelolaan BMN dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan untuk mengelola BMN yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan barang, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik negara, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara. Sedangkan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.</p> <p>Pengelolaan BMN diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lainnya yang mengatur secara khusus tentang pengelolaan BMN. Hal ini penting untuk menjamin bahwa semua barang milik negara digunakan secara efisien dan efektif. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2022. Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Maret 2022 dan mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013.</p> <p>Evaluasi pengelolaan BMN di KKP memiliki beberapa tujuan strategis, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Meningkatkan Akuntabilitas untuk memastikan bahwa pengelolaan BMN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Ini termasuk memeriksa apakah setiap tahap pengelolaan BMN sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ● Optimalisasi Penggunaan Aset untuk mengidentifikasi potensi penggunaan BMN yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat membantu kementerian dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengelolaan aset. ● Kepatuhan terhadap Regulasi: untuk memastikan bahwa semua proses pengelolaan BMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini penting untuk mencegah potensi pelanggaran hukum yang dapat merugikan negara. ● Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Dengan pengelolaan BMN yang baik, diharapkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. <p>Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai beberapa unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%)

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %)
3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%)
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)
5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %)

Adapun unsur yang dilaksanakan pada triwulan III, yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024 (bobot 12,5%).
Pada penyusunan RKAKL Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan September 2023 telah mengacu pada RKBMN Tahun 2022 yang disusun pada Tahun 2022. RKBMN Tahun 2024 mencakup pengadaan kendaraan dinas pimpinan; pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan gedung dan bangunan serta pemeliharaan alat laboratorium. Adapun pemanfaatan dari ke-4 rencana kebutuhan BMN tersebut sebagai berikut:

- Kendaraan dinas pimpinan tidak terakomodir dalam RKAKL Tahun 2024.
- Pemeliharaan kendaraan senilai Rp.318.899.000,-.
- Pemeliharaan gedung dan bangunan senilai Rp.295.884.000,-.
- Pemeliharaan peralatan dan mesin senilai Rp.241.609.000,-.

Adapun kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan pada triwulan III adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan kendaraan telah terealisasi senilai Rp.144.663.630,- dari nilai pagu anggaran Rp.318.899.000,- atau 45,36 %
2. Pemeliharaan gedung dan bangunan telah terealisasi senilai Rp.295.730.017,- dari pagu anggaran Rp.295.884.000,- atau 99,95 %
3. Pemeliharaan peralatan dan mesin telah terealisasi senilai Rp.127.493.712,- dari pagu anggaran Rp.241.609.000,- atau 52,77 %

Dengan demikian, unsur ini sudah terealisasi sebesar 12,5 % dari nilai bobotnya, atau capaiannya sebesar :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times \text{Bobot}$$

$$= \frac{\text{Rp.567.887.359}}{\text{Rp.856.392.000}} \times 12,5 \%$$

$$= 8,29\%$$

2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal Tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25 %).

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar tidak mempunyai anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli 2024 terdapat revisi anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III kegiatan belanja modal belum terlaksana, sehingga usulan penetapan status BMN pengadaan belanja modal tahun 2024 belum terealisasi.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%.

3. Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 (bobot 25%).

Sampai dengan triwulan III tahun 2024 Balai Besar KIPM Makassar belum mengusulkan penghapusan BMN dengan kondisi rusak berat karena menunggu hasil penetapan pelimpahan aset Kementerian Kelautan dan Perikanan ke Badan Karantina Indonesia.

Dengan demikian, IKU ini terealisasi sebesar 0%.

4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25 %)

Indikator ini sebelumnya sudah mencapai nilai bobotnya karena sampai periode triwulan II tahun 2024 tidak ada anggaran belanja modal. Pada periode triwulan III bulan Juli 2024 terdapat revisi anggaran, dimana pada revisi tersebut terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp. 691.334.000,-. Sampai dengan periode triwulan III kegiatan belanja modal belum terlaksana, sehingga penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/ Berita Acara Pemakaian belum dilaksanakan.

Dengan demikian perhitungan nilai bobot pada unsur ini kembali menjadi realisasi 0%.

5. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5 %) Pada Triwulan III operator mudud persediaan telah menginput seluruh transaksi belanja barang persediaan dan telah di kompilasi dengan modul aset tetap sehingga terbentuk satu neraca aset lancar dan aset tetap tingkat satuan kerja. Untuk penyusunan/penyampaian laporan BMN semesteran telah di laksanakan pada akhir periode 30 Juni 2024 sedangkan untuk penyusunan/penyampaian laporan tahunan akan di sampaikan pada akhir periode laporan/triwulan IV.

Dengan demikian realisasi Indikator Kinerja ini sampai triwulan III adalah :

Unsur 1 (8,29%) + Unsur 2 (0%) + Unsur 3 (0%) + Unsur 4 (0%) + Unsur 5 (0%) = 8,29 % dari target 80% Sehingga tingkat capaiannya sebesar $(8,29\%/80\%) \times 100\% = 10,36 \%$.

Alokasi anggaran pada tahun 2024 untuk mendukung indikator kinerja ini sebesar Rp. 10.857.494.000,- (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri dari :

NO	URAIAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA ANGGARAN (Rp)	REALISASI (%)
1	Layanan BMN	8.182.000	3.432.000	4.750.000	41,95
2	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	12.575.000	11.366.000	1.209.000	90,39
3	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	22.759.000	22.749.660	9.340	99,96
4	Layanan Umum	15.645.000	14.711.760	933.240	94,03
5	Layanan dan Informasi	26.093.000	26.089.199	3.801	99,99
6	Layanan Perkantoran	10.641.829.000	8.329.964.030	2.311.864.970	78,28
7	Layanan Manajemen SDM	36.514.000	34.336.935	2.177.065	94,04
8	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	80.159.000	74.642.304	5.516.696	93,12
9	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4.270.000	4.262.500	7.500	99,82
10	Layanan Manajemen Keuangan	9.468.000	9.440.000	28.000	99,70
TOTAL		10.857.494.000	8.530.994.388	2.326.499.612	78,57

Adapun beberapa rincian kegiatan yang tingkat penyerapannya sangat minim diantaranya :

- Langganan Surat Kabar/Majalah, nilai Pagu Rp. 18.000.000,- realisasi sebesar Rp. 2.070.000,-
- Pengiriman surat/dokumen barang, nilai pagu Rp.57.048.000,- realisasi sebesar Rp.2.237.196,-
- Perpanjangan STNK Kendaraan Roda 2, nilai pagu Rp.4.180.000,- realisasi sebesar Rp.788.000,-
- Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan), nilai pagu Rp.8.000.000,- realisasi sebesar Rp.3.800.000,-

Dengan demikian realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 2.326.499.612,- atau (78,57%).

Jika dibandingkan tahun 2023 dengan pagu total pendukung kegiatan sebesar Rp.42.339.000,-. Dan realisasi anggaran triwulan III tahun 2023 sebesar Rp.21.750.500,- atau (51,37%) terjadi kenaikan realisasi yang sangat signifikan sebesar 27,17% di triwulan yang sama.

Sumberdaya manusia yang melaksanakan indikator kinerja untuk tahun 2024 ini sebanyak 9 orang yang terdiri :

1. Kuasa Pengguna Anggaran,
2. Kepala Sub Bagian Umum,
3. Fungsional APK APBN Madya/Pejabat Pembuat Komitmen
4. Pejabat Pengadaan,
5. Operator SAKTI Modul Aset Tetap,
6. Operator SAKTI Modul Persediaan,
7. Operator SAKTI Modul GLP,
8. Pengelola BMN,
9. Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

Akar Masalah (Mengapa hal tersebut terjadi?)

1. Sebanyak 3 unit kendaraan roda 2 belum perpanjangan STNK.
2. Belum terlaksananya kegiatan Belanja Modal senilai Rp. 691.334.000,-.
3. Masih ada anggaran Pas Bandar Udara (pas orang dan kendaraan) senilai Rp.4.700.000,- yang terdiri dari Pas Kendaraan Rp.1.400.000,- dan Pas Orang Rp.3.300.000,-
4. Kurang diberdayakannya Pengelola BMN dan Pengadmintrasi Sarana dan Prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah melaksanakan pemeliharaan 5 unit kendaraan roda 2, hanya saja beberapa kendaraan tidak sampai pada perbaikan odometer sehingga belum mengajukan eksploitasi bahan bakar secara berkala. Perbaikan odometer sebanyak 2 unit kendaraan belum terealisasi karena penanggungjawab kendaraan belum menyerahkan kendaraannya ke bagian pemeliharaan.
2. Telah mengaupdate penanggungjawab kendaraan dinas sesuai surat tugas yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Balai Besar KIPM Makassar Nomor B.24/BBKIPM.MKS/KKP.440/I/2024 tanggal 3 Januari 2024. (terlampir).
3. Mengikuti FGD Strategi Penggunaan dan Pemanfaatan BMN di Lingkungan Kementereian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal KKP secara luring dan daring pada tanggal 29 Juli 2024.
4. Mengikuti kegiatan penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2026 yang di laksanakan oleh Sekretariat BPPMHKP tanggal 17 – 20 September 2024 di Bandung secara daring.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
<ol style="list-style-type: none"> 1. Segera melaksanakan perpanjangan STNK 3 unit kendaraan roda 2. 2. PPK dan Pejabat Pengadaan segera melaksanakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 3. Merevisi akun anggaran Pas Bandara ke kegiatan lain. 4. Memberdayakan Pengelola BMN dan Pengadministrasi Sarana dan Prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya. 	<p>Ketua Tim Kerja Dukungan Manajerial</p>	<p>Triwulan III Tahun 2024</p>

KEGIATAN PEMELIHARAAN KENDARAAN RODA 2



**KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG DAN BANGUNAN
(PEMELIHARAAN ATAP DAN RUANG PELAYANAN)**



KEGIATAN PEMELIHARAAN KENDARAAN



